

**PERJUANGAN SULTAN MUHAMMAD SIRAJUDDIN
MENENTANG BELANDA DI DOMPU
TAHUN 1886 - 1934**

**OLEH :
TIM PENELITI**

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL DENPASAR
PROYEK PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH BALI
2004**

**PERJUANGAN SULTAN MUHAMMAD SIRAJUDDIN
MENENTANG BELANDA DI DOMPU
TAHUN 1886 - 1934**

351802
NOR
P

**OLEH :
TIM PENELITI**

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL DENPASAR
PROYEK PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH BALI
2004**

**PERJUANGAN SULTAN MUHAMMAD SIRAJUDDIN
MENENTANG BELANDA DI DOMPU
TAHUN 1886 - 1934**

OLEH :
Nuryahman, S.S.
I Ketut Sudharma Putra, S.S.
Raj. Riana Dyah Prawitasari, S.Si.

**KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
BALAI KAJIAN SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL DENPASAR
POYEK PEMANFAATAN KEBUDAYAAN DAERAH BALI
2004**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa berkat rahmatNya, penulisan sejarah mengenai Perjuangan Sultan Muhammad Sirajuddin Dalam Menentang Belanda di Dompu Tahun 1886-1934 telah dapat diselesaikan sesuai rencana dan waktu yang telah ditentukan. Kegiatan ini merupakan program dari Aspek Kesejarahan di Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Denpasar Tahun Anggaran 2004.

Perjuangan melawan imperialisme, kolonialisme Belanda yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Sirajuddin di Dompu tahun 1886-1934 dipandang perlu dan menarik untuk dikaji guna menambah khasanah penulisan sejarah. Hal ini mengingat betapa besar peran tokoh pejuang ini dalam membangkitkan semangat anti penjajahan dan nasionalisme di Dompu khususnya dan rasa kebanggaan terhadap tanah air Indonesia pada umumnya, sehingga Beliau sampai menerima hukuman buangan ke Kupang.

Sikap patriotisme tersebut perlu dikembangkan karena sarat akan nilai-nilai kepahlawanan dan rela berkorban demi tanah air serta rakyatnya, nilai tersebut sangat dibutuhkan oleh bangsa kita yang sedang terancam disintegrasi bangsa, konflik sosial, dan krisis multidimensional. Semangat yang telah diwariskan oleh Sultan Muhammad Sirajuddin tersebut perlu diteladani bagi generasi penerus bangsa demi cita-cita dan keutuhan bangsa.

Kajian ini merupakan studi awal untuk menambah dan memberikan dukungan bagi pengusulan Sultan Muhammad Sirajuddin memperoleh gelar Pahlawan Nasional. Namun demikian hasil penulisan ini masih jauh dengan apa yang diharapkan dari kesempurnaan, kami selalu mengharapkan saran serta kritik yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaannya.

Mengetahui
Kepala Balai Kajian Sejarah dan
Nilai Tradisional Denpasar



Drs. Made Purna, M.Si
Nip. 131754561

Denpasar, Desember 2004
Pemimpin Proyek
Pemanfaatan Kebudayaan
Daerah Bali

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I Wayan Rupa'.

Drs. I Wayan Rupa
Nip. 131871165

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Permasalahan.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Ruang Lingkup.....	10
1.5. Metode Penelitian.....	11
BAB III DOMPU DARI NAKA KE KESULTANAN.....	13
2.1. Asal Mula Kerajaan Dompu.....	13
2.2. Pengaruh Budha dan Hindu di Dompu.....	16
2.3. Masuknya Islam di Dompu.....	18
2.4. Masuknya Belanda di Dompu.....	28
BAB III SULTAN MUHAMMAD SIRAJUDDIN MENENTANG KEKUASAAN BELANDA.....	29
3.1. Memangku Jabatan Sultan.....	40
3.2. Menegakkan Syareat Islam.....	43
3.3. Pembangkangan yang Dilakukan.....	49
3.4. Diasingkan ke Kupang.....	58
3.5. Dompu Setelah Kepergian Sultan Muhammad Sirajuddin.....	62
BAB IV PEMINDAHAN KERANGKA JENASAH SULTAN MUHAMMAD SIRAJUDDIN DARI KUPANG KE DOMPU.....	63
4.1. Perencanaan.....	64
4.2. Pelaksanaan.....	66

4.2.1. Keberangkatan ke Kupang	66
4.2.2. Penggalian Makam Sultan Muhammad Sirajuddin.....	71
4.2.3. Membawa Kembali Kerangka Jenasah Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin ke Dompu.....	75
4.2.4. Pemakaman Kembali Kerangka Jenasah Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin di Dompu.....	77
4.4. Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional.....	84
 BAB V PENUTUP.....	 87
5.1. Kesimpulan	87
5.2. Saran-saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pulau Sumbawa yang sekarang ini merupakan bagian dari wilayah Propinsi Nusa Tenggara Barat. Pada masa lalu terdiri dari berbagai kerajaan yang mempunyai pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang raja. Mulai dari Pulau Sumbawa bagian barat terdapat beberapa kerajaan yaitu Sumbawa, Dompu, Sanggar, Tambora, Papekat dan Bima. Menurut Helius Syamsudin pada tahun 1815 di Pulau Sumbawa terdapat enam unit politik berupa kerajaan yaitu Bima, Dompu, (Dompo), Sumbawa, Sanggar, Tambora dan Papekat. Tiga kerajaan yang pertama adalah kerajaan yang besar serta termasuk *State Government*, sedangkan tiga kerajaan yang terakhir merupakan kerajaan kecil *Minimal Government*. Kriteria besar dan kecil ini tentunya ditetapkan berdasarkan luas wilayah pemerintahan, besarnya jumlah penduduk, kekuasaan dan kewenangan pemerintahan, serta kuatnya sentralisasi, hirarki dan diferensiasi kekuasaan¹.

Sebelum kedatangan Belanda kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa menjalin hubungan baik dengan Makasar. Namun setelah Sultan Hasanuddin menyerah kepada Belanda dengan menandatangani Perjanjian Bongaya

¹ Helius Syamsudin dalam: "Sumbawa Hubungan Antar Pulau dan Interaksi Antar Suku Bangsa". Makalah Seminar Sejarah Lokal Tahun 1982 hlm.1.

pada tahun 1667,² pihak Belanda juga mengikat kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa dengan berbagai perjanjian pula. Perjanjian dengan Bima dan Dompu pada tahun 1669, perjanjian dengan Sumbawa pada tahun 1674, selanjutnya dengan kerajaan-kerajaan kecil di Pulau Sumbawa. Kontrak-kontrak perjanjian ini dinamakan Kontrak Jangka Panjang atau *Large Politic Contract* yang diadakan antara pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintah kerajaan yang harus direnovasi atau diperbaharui oleh setiap Sultan atau raja yang memerintah. Setiap periode pemerintahan kontrak tersebut harus diperbaharui dengan penyesuaian dan perbaikan sampai dengan abad ke-19 dan abad ke-20. Isi kontrak jangka panjang ini cukup luas mencakup pengakuan kedaulatan kerajaan, kesultanan dengan kewenangan penuh memerintah wilayahnya sendiri dan memberlakukan hukum adatnya sendiri. Sedangkan pemerintah Hindia Belanda berada di wilayah kerajaan hanya sebagai perwakilan dari Gubernur Hindia Belanda dengan ketentuan harus menghormati dan menjaga hak dan kewajiban Sultan atau Raja yang mempunyai wilayah.

Kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa termasuk dalam kategori Daerah yang tidak langsung diperintah oleh Belanda yang disebut *Indirect Bestuurgebeid*. Akibat meletusnya Gunung Tambora pada tahun 1815 maka dengan Beslit Gubernur Jenderal Ned Indie tahun 1866 tertanggal 2

² Mengenai Perjuangan Sultan Hasanuddin, baca Sagimun, M.D. *Sultan Hasanuddin Menentang VOC*. (Jakarta: Depdikbud, 1982).

September No. 127 maka Kerajaan Tambora dan Papekat dilikuidasi atau dibubarkan. Hal itu disebabkan oleh letusan gunung tersebut yang begitu dahsyat yang menghancurkan kota kerajaan dan menewaskan hampir seluruh rakyat.³ Kemudian Kerajaan Sanggar dilikuidasi atau dibubarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1929 dan digabung dengan Kerajaan Bima sebagai pengganti wilayah Bima di Manggarai, Flores yang dijadikan bagian dari Pulau Flores.⁴ Sehingga pada tahun 1930 dan seterusnya di Pulau Sumbawa hanya ada tiga Kesultanan yaitu Kesultanan Sumbawa, Dompu dan Bima yang tetap berkedudukan sebagai *Zelfbesturende Landschepen* atau daerah yang mempunyai wilayah dan berpemerintahan sendiri⁵.

Kerajaan Dompu merupakan salah satu unit politik besar *State Government* yang ada di Pulau Sumbawa.⁶ Sebelum terbentuknya suatu kerajaan di Dompu terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang disebut *Nyaka*. Setelah itu berkuasa beberapa kepala suku yang disebut *Ncuhi*.⁷ *Ncuhi-ncuhi* tersebut antara lain: *Ncuhi Hu'u*, *Ncuhi Saneo*, *Ncuhi Noa* dan *Ncuhi Tonda*. Diantara ke empat *ncuhi* tersebut yang paling berpengaruh adalah *Ncuhi Hu'u*.

³ Mengenai letusan Gunung Tambora dan Akibatnya baca: I Gde Parimartha, *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815 – 1915*. (Jakarta : Djambatan, 2003), hlm. 111-120.

⁴ Baca : Moh. Yamin, "Runtuhnya Kerajaan Sanggar Abad XVII". (Naskah Belum Diterbitkan).

⁵ Siti Maryam R. Salahuddin, "Selintas Sejarah Pulau Sumbawa". Makalah Dialog Kesejarahan dalam Rangka Lawatan Sejarah Sumbawa - Bima, tanggal 24 Juni 2003 di Istana Bima, hlm 2.

⁶ Helius Syamsudin, *op.cit.*

Berdasarkan keterangan dari Bo Istana Bima (Bo Sangaji Kai) yaitu sekitar abad 11 Masehi, Bima dan Dompu baru meninggalkan jaman *Ncuhi* (yaitu jaman Proto Sejarah), memasuki jaman Sejarah (periode Sejarah).⁸ Menurut Cerita Rakyat, di negeri Woja berkuasa seorang *Ncuhi* bernama Sang Kula yang mempunyai seorang putri bernama Komba Rame. *Ncuhi* tersebut kemudian dikenal sebagai *ncuhi* Patakula. Pada saat itu putra Raja Tulang Bawang di daerah Woja yang sengaja mengembara di wilayah bagian timur terdampar di tempat ini. *Ncuhi* Patakula kemudian menikahkan putrinya dengan putra Raja Tulang Bawang tersebut. Berdasarkan kesepakatan para *ncuhi*, putra raja Tulang Bawang tersebut kemudian dinobatkan sebagai Raja Dompu yang pertama. Kerajaan Dompu mempunyai pusat pemerintahan kurang lebih 10 km dari ibukota Kabupaten Dompu sekarang ini yang dikenal dengan nama Negeri Tonda. Raja Dompu yang kedua adalah Dewa Indra Dompu yang merupakan putra dari Indra Komala dengan putri Dewa Batara Dompu.⁹

Berturut-turut raja yang menguasai daerah ini adalah Dewa Mbora Bisu, Raja Dompu yang ketiga yang menggantikan kakaknya Dewa Indra

⁷ El - Hayyat Ong. *Dompu Tempatku Mengabdikan* (Grobogan : Pustaka Jumdistia, 2004), hlm. 24.

⁸ Hilir Ismail, "Pemahaman Kembali Sejarah Bima dan Daerah Lain di Pulau Sumbawa (Suatu Tinjauan Lokal)". Makalah dalam Dialog Kesejarahan di Istana Bima dalam Rangka Lawatan Sejarah Sumabwa – Bima, Juni 2003, hlm. 3. Lihat juga Henri Chambert - Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, *Bo' Sangaji Kai Catatan Kerajaan Binu*. (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 36 – 37.

⁹ Lalu Wacana, dkk., *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat..* (Jakarta : Depdikbud, 1983/1984), hlm. 21.

Dompu, cucu dari Indra Komala yaitu Dewa Mbora Balanda. Raja keempat sebagai pengganti Dewa Mbora Belanda adalah putranya yang bernama Dewa yang Punya Kuda. Raja kelima adalah Dewa yang Mati di Bima, beliau adalah raja yang memerintah secara diktator sehingga sebelum masa pemerintahannya berakhir telah diturunkan takhta oleh rakyatnya, kemudian beliau meninggal di Bima. Selanjutnya adalah Dewa yang bergelar Mawaa La Patu, raja ini sebenarnya yang akan dinobatkan sebagai raja Dompu yang menggantikan Dewa yang Mati di Bima, namun beliau pergi ke Bima dan memerintah di sana. Pada masa pemerintahan ini (pada tahun 1344 M), Kerajaan Majapahit melakukan ekspedisi yang dipimpin oleh Panglima Nala, namun ekspedisi tersebut mengalami kegagalan. Raja ini dikenal oleh rakyat Dompu sebagai raja yang disiplin dalam menjalankan pemerintahan, teratur dalam sosial ekonomi dan politik, sehingga oleh rakyat Dompu dijuluki Dewa Mawaa Taho yang semula dikenal dengan nama Dadela Nata. Beliau merupakan raja Dompu yang terakhir sebelum masuknya Agama Islam di Dompu. Pusat pemerintahannya di Tonda. Pada tahun 1357 M, ekspedisi Majapahit yang kedua dibantu oleh laskar dari Bali yang dipimpin oleh Panglima Soka, namun sumber lain menyebutkan laskar Bali dipimpin oleh Pasung Garigis.¹⁰ Ekspedisi kedua tersebut berhasil sehingga Kerajaan Dompu selanjutnya bernaung di bawah pengaruh kekuasaan Majapahit.

¹⁰ Manggaukang Raba, Mars Ansory Wijaya, *Dompu Dulu, Kini dan Esok, (Fakta-fakta Tentang Dompu)*. (Dompu : Pemerintah Kabupaten Dompu, 2002), hlm. 25.

Pada perkembangan selanjutnya Kerajaan Dompu sangat dipengaruhi oleh Makasar, dengan masuknya Islam dan pengaruh Makasar yang begitu kuat akhirnya Dompu menjadi sebuah Kesultanan. Seperti telah disinggung di atas raja terakhir yang berkuasa adalah Dewa Mawa Taho. Pada tahun 1640 M atas bantuan rakyat Dompu dan bantuan Makasar diangkatlah Sultan Sirajuddin putra raja Dompu Mawa Tonggo Dese menjadi Sultan Dompu I dan mulai saat itu Kerajaan Dompu berubah menjadi Kesultanan.¹¹ Namun setelah Makasar mengalami kemunduran sebagai akibat kekalahan Sultan Hasanuddin dan ditandatanganinya perjanjian Bongaya tahun 1667, Dompu juga berada di bawah kekuasaan Belanda dengan menandatangani kontrak panjang atau *Large politic contract* yang diperbaharui pada setiap periode sampai abad ke-19 dan abad ke-20.

Pada abad ke XIX, Kerajaan Dompu diperintah oleh raja-raja yang lemah. Kerajaan dikacaukan oleh pemberontakan pada tahun 1803 yang memerlukan campur tangan residen. Sejak Sultan Abdul Azis, putra Sultan Abdullah yang menggantikan Sultan Yakub tidak dapat berbuat banyak untuk memajukan kerajaannya, pada tahun 1810 – 1814 seluruh kerajaan diancam perompak-perompak yang menghancurkan desa-desa. Pada tahun 1809 Gubernur Jenderal Daendels menugaskan Gubernur Van Kraam untuk memperbaharui perjanjian dengan Dompu yang diselenggarakan di Bima. Penggantinya Sultan Muhammad Tajul Arifin I, putra Sultan Abdul Wahab.

¹¹ Hilir Ismail, *op. cit.* hlm. 14

Sultan Muhammad Tajul Arifin I digantikan Sultan Abdulrrasul II, adik beliau. Pada tanggal 5 12 April 1815 Gunung Tambora meletus yang menyebabkan kurang lebih 1000 orang penduduknya meninggal dunia. Kemudian Sultan Abdulrrasul II memindahkan istana Bata ke istana Bata Baru karena itu beliau digelar Sultan Bata Bou. Beliau kemudian digantikan oleh putranya yaitu Sultan Muhammad Salahuddin yang mulai mengadakan perbaikan dalam sistem hukum dan pemerintahan dengan menetapkan berlakunya hukum Islam dan hukum adat di wilayah kekuasaannya. Dalam memimpin kerajaan beliau dibantu oleh majelis *hadat* dan majelis hukum.¹²

Sultan Muhammad Salahuddin digantikan oleh Sultan Abdullah putranya. Sultan Abdullah tidaklah sebijaksana ayahandanya. Pada masa pemerintahannya beliau menandatangani kontrak panjang pada tahun 1886. Beliau kemudian digantikan putranya yaitu Sultan Muhammad Sirajuddin yang memperbaharui kontrak pada tahun 1905. Sultan Muhammad Sirajuddin lahir pada tahun 1848, beliau dinobatkan sebagai Sultan pada tanggal 25 Februari 1886 atau pada tanggal 21 Oktober 1886 atau pada tanggal 18 Oktober 1886.¹³ Beliau merupakan Sultan yang ke-20 di Kesultanan Dompu atau Raja yang ke – 29. Beliau merupakan Sultan Dompu yang paling lama berkuasa yaitu hampir selama 48 tahun memegang jabatan

¹² Lalu Wacana, dkk., *op. cit.* hlm. 127

¹³ Perbedaan tersebut dikarenakan Sultan Muhammad Sirajuddin mendapat SK dari Gubernur Jenderal sebanyak tiga kali. Lihat Helius Syamsudin dalam : Sejarah Dompu, Sketsa Perubahan Sosial Politik Sebuah Masyarakat. Lihat juga El – Hayyat Ong, *op. cit.*, hlm. 67

(1886 – 1934). Sultan Muhammad Sirajuddin sangat keras menentang kebijakan politik pemerintahan Hindia Belanda seperti yang tertuang pada *large politic contract*.

Sultan Muhammad Sirajuddin sangat ketat menjalankan syareat Islam yang sangat bertentangan dengan politik dominasi dependensi Belanda. Beliau juga menentang adanya kerja paksa (rodi), menolak membayar upeti dan menolak peredaran dan perdagangan candu di wilayahnya.

Sebagai akibat pembangkangannya terhadap kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda, Sultan Muhammad Sirajuddin dibuang ke Kupang bersama dua orang putranya yakni Abdul Wahab Sirajuddin (Ruma Toi) dan Abdullah Sirajuddin (Ruma Boa). Sultan Muhammad Sirajuddin meninggal di pembuangan (di Kupang) pada tahun 1937. Beliau dimakamkan di Batu Kadera, Kupang. Kedua putranya kembali ke Dompu setelah ayahandanya wafat. Sultan Muhammad Sirajuddin mendapat gelar Manuru Kupa atau Manuru Kupang untuk mengenang bahwa Beliau diasingkan di Kupang.

Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2002, Pemerintah Kabupaten Dompu dan pihak keluarga Sultan Muhammad Sirajuddin membongkar kembali makam Sultan Muhammad Sirajuddin di pemakaman muslim Batu Kadera Kupang. Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2002, kerangka jenazah Sultan Muhammad Sirajuddin dimakamkan kembali di pemakaman keluarga Sultan di Masjid Agung Baiturrahman Dompu. Pemerintah Kabupaten Dompu pada tanggal 25 Januari 2002 mengusulkan kepada

pemerintah pusat untuk mengangkat Sultan Muhammad Sirajuddin sebagai pahlawan nasional, hal tersebut juga dikuatkan melalui rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat tanggal 10 Nopember 2002. Hal tersebut dilakukan semata-mata untuk mengenang jasa-jasa Sultan Muhammad Sirajuddin dalam menentang penjajahan Belanda.

1.2. Permasalahan

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam kajian ini adalah, bagaimana sesungguhnya Perjuangan Sultan Muhammad Sirajuddin dalam menentang kekuasaan Belanda di Dompu sehingga sampai dibuang atau diasingkan ke Kupang? Agar permasalahan tersebut dapat dibahas secara mendalam, maka pokok permasalahan itu dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi Sultan Muhammad Sirajuddin berjuang menentang kekuasaan Belanda di Dompu ?
2. Seberapa jauh pengaruh terhadap perubahan kebijakan pemerintah Belanda di Dompu dalam menghadapi Sultan Muhammad Sirajuddin ?
3. Apa akibat yang ditimbulkan setelah Sultan Muhammad Sirajuddin menentang kekuasaan Belanda bagi wilayah Dompu?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bukan hanya bertujuan untuk mengungkapkan apa yang telah terjadi dan kapan terjadinya peristiwa perjuangan Sultan Muhammad

Sirajuddin dalam menentang kekuasaan Belanda di Dompu, melainkan mengungkapkan bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Persoalan-persoalan yang terkandung dalam peristiwa tersebut di dalamnya mengacu kepada hal-hal yang berkaitan dengan sebab musabab dan faktor kondisional yang ada dan berkembang atau apa yang mendasari tindakan Sultan Muhammad Sirajuddin menentang kekuasaan Belanda sehingga dibuang ke Kupang.

Disamping itu, penelitian juga bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi kesejarahan dalam rangka menggali sejarah lokal. Di lain pihak juga untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang masa lampau yang akan mempunyai makna penting dan amat berguna di dalam membangun kekinian dan hari esok.

1.4. Ruang Lingkup

Penelitian sejarah dibatasi oleh dua ruang lingkup yaitu lingkup spasial atau batasan tempat dan lingkup temporal atau batasan waktu. Batasan tempat yang diambil dalam kajian ini adalah wilayah Dompu di Pulau Sumbawa, tepatnya di bekas wilayah Kesultanan Dompu. Sedangkan untuk batasan temporal atau waktu yang diambil adalah periode tahun 1886 – 1934 M, tahun 1886 yaitu saat Sultan Muhammad Sirajuddin dinobatkan menjadi Sultan ke-20 atau Raja ke-29 di Kesultanan Dompu. Sedangkan periode

sampai pada tahun 1934 dimana Sultan Muhammad Sirajuddin ditangkap dan diasingkan ke Kupang.

1.5. Metode Penelitian

Metode yang akan digunakan dalam penelitian dan penulisan ini adalah metode sejarah,¹⁴ yaitu proses penelitian dan penulisan sejarah kritis yang mencakup empat langkah. Pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan sebanyak mungkin sumber-sumber sejarah yang berkenaan dengan objek penelitian, baik sumber primer maupun sekunder. Mengenai sumber sejarah tertulis dapat berasal dari berbagai tulisan, baik berupa dokumen, buku, majalah, surat kabar, makalah, naskah atau karya ilmiah lain yang dapat memberikan informasi tentang topik kajian ini.

Langkah kedua yang ditempuh adalah dengan kritik terhadap sumber yang berhasil dikumpulkan. Kritik tersebut berupa kritik intern maupun ekstern guna menetapkan sumber tersebut menjadi fakta yang valid. Dengan demikian akan dapat diputuskan bahwa sumber-sumber tersebut layak atau tidak digunakan sebagai dasar dari suatu penulisan.

Langkah ketiga yaitu melakukan interpretasi untuk merangkaikan berbagai fakta yang dibutuhkan dalam rangka pembuatan suatu gambaran dan juga penjelasan tentang perjuangan Sultan Muhammad Sirajuddin

¹⁴ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*. (Terjemahan Nugroho Notosusanto). (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 34

menentang Belanda di Dompu. Kemudian pada langkah selanjutnya menyusun sebuah rekonstruksi sejarah mengenai peristiwa tersebut dengan merangkaikan berbagai fakta yang diperoleh dari kegiatan sebelumnya. Dengan demikian, maka pada tahap akhir dari seluruh kegiatan ini adalah historiografi atau penulisan yang akan melahirkan kisah sejarah tentang “Perjuangan Sultan Muhammad Sirajuddin menentang Belanda di Dompu tahun 1886 – 1934”.

BAB II

DOMPU : DARI NAKA SAMPAI KE KESULTANAN

2.1 Asal Mula Kerajaan Dompu

Berdasarkan catatan dari Bo Istana Bima (Bo Sangaji Kai) pada sekitar abad ke-11 Dompu baru meninggalkan jaman Ncuhi (Jaman Proto Sejarah memasuki Jaman Sejarah) atau periode kerajaan.¹ Kerajaan Dompu merupakan salah satu kerajaan kuno yang sudah ada sebelum abad ke-15, walaupun tidak ada catatan khusus yang dapat dirujuk kapan dan bagaimana kerajaan Dompu pada zaman kuno, namun yang jelas kerajaan di pulau Sumbawa bagian tengah ini sudah ada sejak jaman Majapahit. Periode terpenting dalam sejarah Dompu dimulai pada abad ke-14, yaitu dengan disebutkannya nama "Dompou" dalam buku *Negarakertagama* yang ditulis oleh Mpu Prapanca pada tahun 1364.

Di dalam ceritera mengenai munculnya kerajaan Dompu banyak disebutkan bahwa kerajaan Dompu lama sejak Batara Guru sampai pada cicitnya yang bernama Sang Kula yang mempunyai puteri bernama Kombe Rame. Dia dikenal dengan sebutan Ncuhi Patakula yang kawin dengan seorang putera raja Tulang Bawang yang mengunjungi negeri-negeri timur dan kemudian menetap di Woja. Oleh Ncuhi Patkula, putra raja Tulang

Bawang ini dikawinkan dengan putrinya yang bernama La Kombe Rame. Atas kesepakatan para Ncuhi, putra raja Tulang Bawang ini kemudian kemudian dinobatkan menjadi raja Dompu yang pusat pemerintahannya berada di negeri Tonda.²

Sebelum terbentuknya kerajaan Dompu, awalnya adalah kelompok-kelompok masyarakat yang disebut Naka, kemudian berkembang beberapa kelompok suku yang dikepalai oleh seorang kepala suku yang disebut Ncuhi. Di Dompu terdapat empat Ncuhi yang terkenal yaitu ³ :

1. Ncuhi Hu'u yang mempunyai wilayah daerah Hu'u dan sekitarnya
2. Ncuhi Saneo yang mempunyai wilayah daerah Saneo dan sekitarnya
3. Ncuhi Nowa yang mempunyai wilayah daerah Nowa dan sekitarnya
4. Ncuhi Tonda yang mempunyai wilayah di daerah Tonda dan sekitarnya

Diantara Empat Ncuhi di atas yang paling besar pengaruhnya adalah Ncuhi Hu'u. Dari hasil perkawinan antara putra Indra Komala dengan putra Dewa Batara Dompuy lahirlah Dewa Indra Dompu yang merupakan Raja Dompu yang kedua, hal itu terjadi pada abad ke-10 Masehi. Selanjutnya secara

¹ Hilir Ismail, "Pemahaman Kembali Sejarah Bima dan Dacrah lain di pulau Sumbawa (Suatu Tinjauan Sejarah Lokal)". Makalah pada Dilaog Kesejarahan di Istana Bima dalam rangka Lawatan Sejarah Sumbawa- Bima, Juni 2003. hal. 23.

² Manggaukang Raba, Mars Ansory Wijaya, *Dompu : Dulu, Kini dan Esok (Fakta-Fakta Tentang Dompu)*. Dompu : Pemkab Dompu, 2002). hal. 18.

³ *Ibid.*, lihat juga Lalu Wacana, dkk., *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. (Jakarta : Depdikbud 1977/1978). hal. 21.

singkat yang pernah berkuasa di kerajaan Dompu Kuno secara kronologis adalah sebagai berikut ⁴ :

Pada abad ke-10 Dewa Mambora Mbisa menjadi raja Dompu yang ketiga. Ia berasal dari Dewa Indra Dompu. Abad ke-11 sampai 12, Dewa Mambora Balanda menjadi raja Dompu keempat, ia merupakan saudara dari Mambora Mbisa dan Dewa Indra Dompu. Pada masa ini di Jawa Timur berdiri kerajaan besar yaitu Kediri dibawah Dharmawangsa. Pada Abad ke-12 dan 13, Dewa yang punya Kuda menjadi raja Dompu kelima, ia adalah putra dari Mambora Mbisa yang bernama Tana Rua. Di Jawa Timur saat itu tumbuh kerajaan Singasari. Pada awal abad ke- 13 sampai abad 14, Dewa yang mati di Bima menjadi raja Dompu keenam. Ia adalah putra dari Dewa yang punya Kuda. Ia dikenal sebagai raja yang diktator dalam memerintah sehingga diturunkan oleh rakyatnya dan ia pergi ke Bima dan meninggal disana.

Pada awal abad ke-14, Mawaa La Patu yang seharusnya menggantikan Dewa yang mati di Bima, namun karena ia pergi ke Bima dan menjadi raja disana dan bergelar Mawaa Laba. Pada masa ini kerajaan Majapahit tumbuh menjadi besar dengan rajanya yang pertama bernama Kertarajasa Jayawardhana yang memerintah tahun 1298-1309. Pada masa pemerintahan Mawaa La Patu terjadi ekspedisi tahap pertama dari kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Panglima Nala pada tahun 1344 M namun

⁴ *Op. cit.*, hal. 24-26.

mengalami kegagalan. Pada abad ke-14 kerajaan Dompu dipimpin oleh Mawaa Taho, ia merupakan putra dari saudara Mawaa La Patu. Ia merupakan raja ketujuh dan dikenal sebagai raja yang disiplin dalam menjalankan pemerintahan, teratur dalam menata perekonomian maupun politik. Karena itu ia diberi gelar oleh rakyat Dompu dengan sebutan Mawaa La Taho. Pada masa pemerintahannya, ekspedisi tahap kedua dari kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Panglima Nala pada tahun 1357 yang dibantu oleh laskar Bali pimpinan Panglima Soka atau ada yang menyebutnya Pasung Garigis berhasil menguasai Dompu. Sejak saat itu Dompu berada dalam pengaruh kerajaan Majapahit.⁵ Setelah abad ke-15 Dompu sebagai kerajaan otonom tidak banyak lagi ditelusuri sejarahnya. Namun yang dapat dipahami bahwa tradisi kerajaan masih tetap berlangsung terutama dalam pengangkatan raja, hal tersebut berlangsung hingga pada abad ke-16 yaitu runtuhnya Majapahit hingga Dompu menjadi sebuah kerajaan yang merdeka lagi dan menjadi sebuah Kesultanan.

2.2 Pengaruh Budha dan Hindu di Dompu

Sebagai sebuah kerajaan kuno, Dompu sudah dikenal sejak kerajaan Tulang Bawang di Sumatera Selatan atau jaman kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 sampai abad ke-9 Masehi. Hal ini berarti bahwa awalnya Dompu

⁵ Lalu Wacana, *Sumbawa pada Masa Lalu (Suatu Tinjauan Sejarah)*. (Surabaya : Rinta, 1984), hal., 49.

mendapat pengaruh Budha, karena kerajaan Maritim Sriwijaya merupakan kerajaan nusantara pertama di Indonesia dan merupakan kerajaan yang mengalami perkembangan pesat di bidang agama yaitu agama Budha.

Setelah kerajaan Sriwijaya mengalami keruntuhan dan diganti pengaruhnya oleh kerajaan Majapahit hampir seluruh wilayah nusantara mendapat pengaruh agama Hindu dari kerajaan tersebut, termasuk Dompu. Pengaruh Hindu ini berlangsung cukup lama yaitu sampai masuknya Islam pada abad ke-15 sampai 16 Masehi di Dompu.

Dompu mendapat pengaruh Hindu dan Budha sebagai agama dan kebudayaan berlangsung selama sembilan abad yaitu dari abad ke-7 sampai 16 Masehi. Hal tersebut telah mengantarkan masyarakat Dompu memasuki jaman sejarah, sekaligus membawa perubahan dalam struktur masyarakat yaitu dengan adanya kedudukan raja, para bangsawan, agamawan dan bentuk serta sistem pemerintahan kerajaan. Demikian juga dalam pola pikir dengan adanya bentuk keagamaan baru tersebut. Dengan sendirinya tata cara kehidupan dan adat serta pola perilaku masyarakat ikut berubah pula. Oleh sebab itu kebudayaan yang dilahirkan masyarakat Dompu zaman kuno sangat dipengaruhi oleh agama dan pandangan hidup berdasarkan agama Budha dan Hindu yang kemudian mempengaruhi dan menentukan perkembangan selanjutnya bagi kebudayaan Dompu.

Mengenai pengaruh Budha, dimulai sejak jaman Sriwijaya pada sekitar abad ke-7 Masehi. Sejarah telah mencatat bahwa sekitar tahun 690 Masehi,

Sriwijaya mengembangkan sayapnya dan menaklukan kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Sementara itu, pengaruh Hindu berawal dari ditaklukkannya Dompu oleh Majapahit sekitar 1357 dan berlangsung sampai dikuasainya Dompu oleh kerajaan Gowa-Tallo (Makasar) sekitar tahun 1618 Masehi. Jadi secara garis besar dapat disimpulkan bahwa :

Pengaruh Budha di Dompu berlangsung selama 7 abad yaitu sejak abad ke-7 sampai abad ke-14, atau sejak jaman Sriwijaya sampai ditaklukkannya Dompu oleh Majapahit pada masa pemerintahan Hayam Wuruk tahun 1357. Sedangkan pengaruh Hindu di Dompu berlangsung selama hampir tiga abad, yaitu sejak ditaklukkannya Dompu oleh Panglima Nala tahun 1357 sampai ditaklukkannya Dompu oleh kerajaan Gowa-Tallo dari Makasar sekitar tahun 1628. Setelah itu baru pengaruh Islam sejak tahun 1628 sampai sekarang, walaupun menurut berbagai sumber Islam telah masuk ke Dompu sejak tahun 1528 melalui Jawa dan Sumatera.

2.3 Masuknya Islam di Dompu

Guna mengetahui kapan dan bagaimana Islam masuk ke Dompu, banyak berbagai sumber telah menceritakan. Kita mulai menelusuri bagaimana perjuangan para pedagang/mubaligh dari Demak, Banten, Ternate dan daerah lain yang silih berganti datang ke pulau Sumbawa. Menurut Panambo Lombok “ Pengislaman di pulau Lombok terjadi pada masa pemerintahan Sunan Prapen, putra Sunan Giri yang telah

menundukkan kerajaan-kerajaan yang ada di pulau Sumbawa termasuk didalamnya Dompu". Menundukkan yang dimaksud adalah keberhasilan para pedagang atau mubaligh Giri untuk mengislamkan sebagian masyarakat di pulau Sumbawa.

Sunan Prapen adalah salah seorang anak Raden Paku atau Syekh Ainul Yakin yang lebih populer dengan nama Sunan Giri, karena pusat kegiatannya berada di Giri (Gresik) di sebelah utara Surabaya, Jawa Timur. Pada waktu itu Giri menjadi pusat ilmu keagamaan Islam yang termashur. Dari segala penjuru baik dari kalangan atas maupun bawah banyak yang pergi ke Giri untuk berguru kepada Sunan Giri. Daerah penyiaran Sunan Giri sampai ke Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara dan Madura.⁶ Setelah Sunan meninggal kemudian diganti oleh Sunan Dalem, Sunan Margi, Sunan Prapen, kemudian Sunan Prapen meninggal tahun 1597.

Sumber lain juga mengatakan, mubaligh Islam memulai penyiaran agama Islam ke pulau Sumbawa antara tahun 1540 dan tahun 1550. Setelah Majapahit mengalami kemerosotan pada abad ke-16, kerajaan Dompu mulai bebas kembali yang berarti pengaruh dari kerajaan Majapahit sudah berkurang. Bersamaan itu pula munculah kerajaan-kerajaan Islam, Raden Patah mendirikan kerajaan Demak dengan bantuan daerah-daerah lainnya seperti Jepara, Tuban dan Gresik. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1500-

⁶ Solihin Salam, *Sekilas Wali Songo*. (Kudus: Menara Kudus, 1960)

1550, mulai saat itu Demak menjadi pusat perdagangan dan penyiaran agama Islam.

Mulai tahun 1478 para pedagang Demak, Tuban, Gresik melakukan penyiaran Islam ke wilayah bagian timur termasuk di dalamnya wilayah Sumbawa, Dompu dan Bima. Pada tahun 1511, Malaka sebagai pusat perdagangan dan penyiaran Islam di Asia Tenggara jatuh ke tangan Portugis. Sejak saat itu pusat penyiaran agama Islam di Asia Tenggara berpindah ke Demak. Proses Islamisasi di wilayah Nusantara bagian Timur tetap meluas dan lancar. Peranan Demak sebagai pusat penyiaran Islam mulai menurun ketika wafatnya Sultan Trenggono tahun 1546, dan kerajaan berpindah ke pedalaman yaitu Pajang dengan rajanya Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir. Karena letaknya di pedalaman maka Pajang kurang mampu berperan sebagai pusat perdagangan dan penyiaran agama Islam. Pada tahap ini penyiaran agama Islam di pulau Sumbawa dilanjutkan oleh pedagang dari Ternate yang sebelumnya belajar agama Islam di Giri (Gresik), Tuban dan Demak.

Pada kurun waktu tahun 1478 sampai 1583 Masehi, raja-raja Bima, Sumbawa, dan Dompu termasuk raja Gowa, Tallo, Luwu dan Bone belum memeluk agama Islam. Hal ini membuat Portugis merasa optimis untuk mengkatolikan raja-raja yang menguasai pusat-pusat perdagangan penting. Namun maksud Portugis ini tidak menjadi kenyataan, walau Malaka, Demak dan Ternate belum berhasil mengislamkan raja-raja Bima, Sumbawa, Dompu

dan raja-raja di Sulawesi Selatan, namun masih ada kerajaan Aceh dan kemudian muncul Banten sebagai pusat perdagangan dan penyiaran agama Islam. Pada tahun 1607-1636 Kesultanan Aceh diperintah oleh Sultan Iskandar Muda yang terkenal gigih melawan Portugis dan Belanda serta giat menyiarkan agama Islam. Kesempatan tersebut digunakan oleh Sultan Ternate Taufid Barkat untuk meminta bantuan kepada Sultan Iskandar Muda dalam mengislamkan raja-raja di wilayah nusantara bagian timur terutama raja-raja Sulawesi Selatan. Akhirnya Sultan Iskandar Muda mengirimkan tiga Ulama berdarah Minangkabau yang bernama Abdul Makmur Khatib Tunggal (Datuk Ri Bandang), Khatib Sulaiman (Datuk Ri Patimang) dan Datuk Khatib Bungsu (Datuk Ri Tiro). Mereka berhasil mengislamkan raja Tallo pada tanggal 22 September 1605 dan diberi nama Sultan Abdullah Awalul Islam, dan pada tahun yang sama raja Gowapun memeluk Islam diberi nama Sultan Alaudin. Sebelumnya pada tahun 1603 Raja Luwu memeluk Islam diberi nama Sultan Muhammad diikuti raja Wajo dan Sopeng tahun 1610, kemudian raja Bone tahun 1611. Islamnya raja Gowa, Tallo, Luwu dan Bone sangat menentukan perkembangan Islam di kerajaan-kerajaan pulau Sumbawa. Karena diantara mereka telah terjalin hubungan keluarga dan kerjasama di bidang politik, ekonomi dan kebudayaan.

Pada awal abad ke-16 boleh dikatakan merupakan abad kebangkitan dan penyebaran Islam secara besar-besaran di wilayah nusantara. Bahkan beberapa kerajaan menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan.

Demikian juga Dompu yang pada abad ke-16 bangkit sebagai kerajaan Islam dengan bentuk Kesultanan bersama kerajaan lain di pulau Sumbawa yaitu Kesultanan Sumbawa dan Kesultanan Bima. Telah diuraikan di atas bahwa agama Islam masuk ke Dompu melalui mubaligh-mubaligh sekaligus pedagang seperti Umar dan Bantam dari Madiun, Syekh Hasanuddin dari Sumatera dan Syekh Abdullah dari Makasar. Dengan demikian bersumber dari berbagai catatan, Islam masuk ke Dompu melalui mubaligh sekaligus pedagang dari pulau Jawa, Sumatera dan Sulawesi Selatan. Ini berarti pada jaman kerajaan Mataram di Jawa dan kerajaan Gowa-Tallo (Makasar) Sulawesi Selatan.

Peranan Sunan Giri dalam mengislamkan wilayah nusantara juga patut diberi catatan. Sebagai salah satu dari Wali Songo dikenal sebagai tokoh yang giat menyebarkan agama Islam dengan bantuan para murid-muridnya yang tersebar dimana-mana terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Menurut berbagai sumber bahwa Syekh Umar dan Bantam adalah murid dari Sunan Giri dari Gresik. Sedangkan Syekh Hasanuddin adalah mubaligh dari Pagaruyung sebuah kerajaan di tanah Minangkabau, Sumatera Barat. Beliau datang dan menyebarkan agama Islam ke Sumbawa Timur dan Tengah (Dompu dan Bima) sekaligus menetap disana. Sedangkan Syekh Abdullah adalah Mubaligh dari kerajaan Gowa-Tallo (Makasar). Dalam kaitannya dengan kerajaan Gowa-Tallo, berbagai sumber mencatat bahwa kerajaan di pulau Sumbawa (Bima, Dompu dan Sumbawa) sangat

dipengaruhi kerajaan-kerajaan dari Makasar tersebut dan bahkan telah menjadi wilayah kekuasaannya. Dengan mengadakan suatu perjanjian bahwa Islam harus menjadi agama resmi kerajaan. Maka mulai pada ke-17 Islam menjadi agama resmi di Kesultanan Dompu. Sebagai Sultan yang pertama yaitu Sultan Syamsuddin putra dari raja Mawaa Taho dan bergelar Mawaa Tunggu. Dilantik menjadi Sultan pada tanggal 24 September 1545 atau bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 952 H pada hari Jum'at.⁷

Akhirnya Dompu menjadi sebuah Kesultanan dan Islam menjadi agama resmi kerajaan, yaitu pada zaman Raja Dompu ke -9 yaitu Sultan Syamsuddin dengan gelarnya MawaaTunggu. Berturut-turut berdasarkan Tambo Kerajaan Dompu menyebutkan 29 raja atau Sultan yang memerintah antara tahun 1545 sampai dengan 1958 selama 413 tahun adalah sebagai berikut ⁸ :

1. **Sultan Syamsuddin** yang bergelar Mawaa Tunggu berkuasa mulai tahun 1545, sebagai Sultan Pertama di Dompu. Beliau merupakan raja ke-9 dan pertama kali masuk Islam. Beliau memerintah di Istana Tonda dan mendirikan Istana Bata (Doro Bata), terkenal sebagai raja yang ulet dan bijaksana.
2. **Sultan Jamaluddin** memerintah sesudah Sultan Syamsudin sampai dengan tahun 1640. Beliau merupakan putra dari Sultan Syamsuddin dan

⁷ Manggaukang Raba, Mars Ansory Wijaya, *op. cit.*, hal. 28.

mengangkat dirinya menjadi Raja Bicara Dompu serta bertahta di Doro Ngao.

3. **Sultan Sirajuddin** yang berkuasa mulai tahun 1640-1682 dan bergelar Manuru Bata, putra dari Sultan Syamsuddin juga dan merupakan saudara Sultan Jamaluddin. Pada tahun 1669 menandatangani perjanjian politik (kontrak politik) yang pertama dengan Belanda di benteng Rotterdam Makasar.
4. **Sultan Ahmad** yang berkuasa mulai tahun 1682-1686 dan bergelar Manuru Kilo karena setelah lama tinggal Betawi dan pulang kemudian tinggal di Labuhan Kilo, merupakan putra dari Sultan Sirajuddin.
5. **Sultan Abdul Rasul** yang bergelar Manuru Laju, putra Sultan Sirajuddin yang ibunya anak raja Manggarai dan merupakan saudara dari Sultan Ahmad. Dikenal sebagai Sultan yang gagah berani, berkuasa mulai tahun 1686 sampai 1701.
6. **Sultan Usman** bergelar Manuru Parabo berkuasa tahun 1701-1702, merupakan putra dari Sultan Abdul Rasul, meninggal di Makasar.
7. **Sultan Ahmadsyah** yang bergelar Manuru Kempo I, merupakan saudara dari Sultan Usman putra dari Sultan Abdul Rasul. Berkuasa mulai tahun 1702-1717 dan wafat di Kempo sepulang dari Makasar.

⁸ *Ibid.*, hal. 29-31, lihat juga dalam Naskah Bo Sangaji Kai, hal. 34, mengenai silsilah raja Dompu dan Sumbawa.

8. **Sultan Abdul Kadir** yang bergelar Mawaa Losa (Mawaa Alus), yang juga masih putra dari Sultan Abdul Rasul (Manuru Laju), masih saudara Sultan Ahmadsyah dan Sultan Usman, berkuasa dari tahun 1727-1737.
9. **Sultan Syamsuddin** yang bergelar Mawaa Sampela mulai berkuasa tahun 1727-1737. Merupakan putra dari Sultan Usman yang ibunya dari Sumbawa. Dikenal sebagai raja yang sangat keras dalam memerintah, pada tahun 1727 pernah mengikuti pertemuan ulama di Madiun Jawa Timur.
10. **Sultan Kamaluddin** putra dari Sultan Usman dan merupakan saudara Sultan Syamsuddin yang berkuasa mulai tahun 1737, berkuasa hanya sebentar kemudian lari ke Sumbawa karena persoalan cinta.
11. **Sultan Abdul Kahar** bergelar Manuru Hidi yang berkuasa mulai tahun 1737-1746. Dilantik di Makasar pada tahun 1737 sebagai Daeng Mamu.
12. **Sultan Abdurahman** bergelar Manuru Kempo berkuasa mulai tahun 1746-1748, putra dari Sultan Abdul Kadir. Wafat dalam sebuah pertempuran di Kempo pada waktu perang perbatasan antara Dompu dengan Tambora.
13. **Sultan Abdul Wahab** bergelar Mawaa Cau berkuasa tahun 1749-1792. Merupakan putra Sultan Abdul Kadir, ibunya keturunan Ncuhi Ncando. Pernah mendapatkan bintang Gubernur Jenderal.
14. **Sultan Abdullah** bergelar Mawaa Saninu, berkuasa tahun 1793-1798. Merupakan putra Sultan Abdurrahman, wafat tahun 1799.

15. **Sultan Yakub** berkuasa tahun 1798-1799, merupakan saudara dari Sultan Abdullah. Diberi gelar oleh rakyat Dompu sebagai Negeri Mpuhi karena gilirannya.
16. **Sultan Abdullah Tajul Arifin** bergelar Membawa Baharu (Mawaa Bou) berkuasa dari tahun 1799-1801. Merupakan Sultan Abdul Wahab, ibunya orang Bali, anak dari Ompu Hawa.
17. **Sultan Abdul Rasul II** bergelar Yang Punya Bata Baharu, berkuasa tahun 1801-1857. Putra dari Sultan Abdul Wahab dan satu ibu dengan Sultan Muhammad Tajul Arifin.
18. **Sultan Muhammad Salahuddin** bergelar Sultan Mawaa Adi, berkuasa tahun 1857-1870. Putra dari Sultan Abdul Rasul, meninggal tanggal 23 Agustus 1870.
19. **Sultan Abdullah II** bergelar Membora Bara Ncihi Ncawa (Ma Hidi Mbojo) berkuasa tahun 1871-1882. Putra Sultan Muhammad Salahuddin, diangkat sebagai Sultan tanggal 3 Juni 1871 dan wafat tanggal 25 Pebruari 1882.
20. **Sultan Muhammad Sirajuddin** yang bergelar Manuru Kupa, diangkat menjadi Sultan tanggal 21 Oktober 1882. Putra dari Sultan Abdullah, dikenal sebagai raja yang membangkang pada Belanda. Pada tahun 1886 menandatangani kontrak dengan Belanda dan diperbaharui lagi pada tahun 1905. Pada tanggal 12 Maret 1908 bersurat kepada Tuan H.N. Sourdi di Makasar yang isinya agar Belanda mengangkat putranya Sultan Abdul

Wahab sebagai Raja Muda di Dompu, namun Belanda tidak menyetujuinya. Karena membangkang terhadap Belanda akhirnya dibuang ke Kupang pada tahun 1934 bersama kedua anaknya (Abdul Wahab dan Abdullah). Beliau meninggal di Kupang pada tahun 1939 dan dikuburkan disana. Pada Tahun 2002 kerangka jenazahnya dipindahkan ke Dompu oleh Pemerintah Kabupaten Dompu dan diusulkan sebagai Pahlawan Nasional.

21. **Sultan Muhammad Tajul Arifin** bergelar Mawaa Sama - Mawaa Sapau (Ruma To'I), berkuasa tahun 1947-1958. Boleh dikatakan sebagai Sultan terakhir di Dompu, karena setelah itu Dompu menjadi Daerah Swapraja dan akhirnya menjadi Kabupaten sekarang. Merupakan putra dari Abdul Wahab Sirajuddin serta cucu dari Sultan Muhammad Sirajuddin. Diangkat menjadi Sultan setelah Kesultanan Dompu dihidupkan kembali yang pada waktu digabungkan dengan Kesultanan Bima, saat itu Negara Indonesia Timur terbentuk. Dilantik pada tanggal 12 September 1947. Ketika Dompu menjadi Daerah Swapraja Dompu, Beliau diangkat menjadi Kepala Daerah Swapraja Dompu serta Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Dompu tahun 1958-1960. Beliau wafat pada tanggal 12 September 1963.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa Sultan Muhammad Tajul Arifin merupakan Sultan terakhir di Kesultanan Dompu. Beliau sekaligus menjabat Kepala Daerah Swapraja Dompu dan Kepala Daerah Swatantra Tingkat II Dompu pada tahun 1958-1960, setelah Daerah pulau Sumbawa dilikwidasi

oleh Pejabat Sementara Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Nusa Tenggara Barat yaitu R. Ar. Muhammad Ruslan Cakraningrat pada tanggal 22 Januari 1959. Setelah itu digantikan oleh H. A. Rahman Mahmud sampai tahun 1960 sebagai Bupati pertama di Kabupaten Dompus. Tahun 1966-1967 Dompus dijabat sementara oleh I Gusti Ngurah sebelum terpilihnya Bupati baru yaitu Suwarno Atmojo yang bertugas mulai tahun 1967-1979. Berikutnya Bupati Dompus secara berturut adalah : H. Heru Sugiyo (1979-1984), H. Moh Yakub MT (1984-1989), H. Umar Yusuf (1989-1994), Drs. H. Hidayat Ali (1994-1999), Tahun 1999-2000 dijabat oleh Plh. Drs. H. Lalu Djafar Suryadi, kemudian H. Abubakar Ahmad, SH (2000-sekarang).⁹

2.4 Masuknya Belanda di Dompus

Kedatangan Belanda di sebelah Timur Nusantara mendapat perlawanan sengit dari Sultan Hasanuddin dari Makasar. Terjadi pertempuran beberapa kali di laut Makasar dan laut Buton antara Belanda dibawah pimpinan Admiral Speelman dengan armada laut Sultan Hasanudin yang dibantu oleh armada laut kesultanan Bima pimpinan Sultan Abil Khair Sirajuddin sultan ke-2 Bima. Dengan susah payah Belanda akhirnya dapat mengalahkan pasukan Sultan Hasanuddin dan terjadilah perjanjian paksa yang terkenal dengan nama Perjanjian Bungaya atau Cappaya Ri Bungaya

⁹ *Ibid.*, hal. 41.

pada tanggal 18 Nopember 1667 yang telah merusak hubungan kerajaan di Makasar dengan kerajaan-kerajaan di pulau Sumbawa.

Isi perjanjian tersebut sangat merugikan Makasar dan kerajaan-kerajaan yang ada di pulau Sumbawa. Pasal-pasal yang merugikan kerajaan-kerajaan di pulau Sumbawa seperti yang dikutip dari terjemahan bebas buku *Het Bungaisch Verdrag* oleh Dr. W. Stape adalah sebagai berikut ¹⁰ : (pasal 14), Kerajaan Gowa harus menyerahkan Bima dan daerah-daerah taklukannya kepada Kompeni. (Pasall 15) Raja Gowa akan berusaha menyerahkan raja Bima, raja Dompou, raja Tambora dan raja Sanggar yang kesemuanya bersalah telah mengadakan pembunuhan kepada orang-orang Belanda di Bima, juga Karaeng Bonto Maranu harus diserahkan kepada Kompeni. Secara garis besar pasal-pasal perjanjian tersebut adalah Makasar mengakui monopoli Belanda di seluruh Indonesia Timur.

Sebagai lanjutan dari perjanjian tersebut pada tahun 1669 diadakan perjanjian antara Dompou, Bima dan Belanda di Benteng Rotterdam Makasar. Sultan Dompou saat itu yang menanda tangani adalah Sultan Sirajuddin atau Manuru Bata. Perjanjian dengan Speelman tahun 1669 menjadi awal daripada perjanjian-perjanjian berikutnya. Perjanjian tersebut hanya emuat pasal-pasal mengenai fasilitas perdagangan dan saling tolong menolong di laut dan izin untuk mendirikan rumah untuk Fetor (wakil Belanda) yang ada di

¹⁰ Hilir Ismail. *op. cit.*, hal. 17

Dompu dan Bima serta lain-lainnya yang tidak langsung menyangkut soal pemerintahan¹¹.

Walaupun demikian, Makasar rupanya tetap menjadikan pulau Sumbawa sebagai basis perlawanan menentang Belanda dengan bajak-bajak laut dan melakukan kekacauan di wilayah timur. Sadar akan hal tersebut, maka pada tahun 1673 Kompeni Belanda mendaratkan pasukannya di pulau Sumbawa dibawah pimpinan Kapten J.F. Holsteyner. Walaupun pada saat ini Belanda mendapat berbagai perlawanan yang ketat yang membuatnya tidak bisa berbuat banyak.

Tekad Belanda untuk menguasai kawasan Timur Nusantara belum merasa aman kalau belum dapat menguasai pulau Sumbawa. Maka pada tahun 1701 Belanda mulai lagi berusaha menduduki pulau Sumbawa dengan cara memecah belah dan bahkan mengadu domba kerajaan-kerajaan yang ada. Maka pada tanggal 13 September 1701 Belanda yang diwakili oleh Bernink memaksa raja-raja Bima, Dompu, Tambora, Pekat dan Sanggar untuk menandatangani suatu perjanjian. Kesultanan Dompu diwakili oleh Bumi Luma, sejak saat itu Belanda merasa aman di daerah pulau Sumbawa.

Walaupun para pemimpinnya atau para raja telah menandatangani berbagai perjanjian damai dengan pihak Belanda, namun rakyat Dompu terus bergolak dan melawan Belanda walaupun hanya dengan cara sporadis.

¹¹ Siti Maryam R. Salahudin, *op.cit.*, hal. 4.

Tersebutlah pemerintahan yang dipimpin oleh Daeng Talolo pada tahun 1718 di Dompu yang berlangsung sampai tahun 1727, walaupun akhirnya Daeng Talolo ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1728. Hal tersebut terjadi pada waktu Kesultanan Dompu diperintah oleh Sultan Syamsudin.

Sejak saat itu Belanda selalu mengintervensi pergantian raja (Sultan) dan setiap pengukuhan Sultan di Makasar selalu diikuti dengan perjanjian kontrak. Kontrak yang paling lengkap adalah kontrak tahun 1765, yang disusun oleh Gouverneur (Gubernur) Pemerintah Nederland Sche Oost Indische Compagnie dan ditandatangani bersama oleh :

- Sultan Abdul Kadim Muhammad Syah Zillullahi Fi'l Alam dari Bima.
- Ala'udin Datu Djerewe dari Sumbawa
- Sultan Ahmad Alaudin dari Dompu
- Sultan Abdul Sa'id Johan Kamalusyiah dari Tambora
- Sultan Muhammad Syah Johan dari Sanggar
- Sultan Abdul Rahman dari Papekat.

Setiap periode pemerintahan kontrak ini diperbaharui dengan penyesuaian dan perbaikan sampai pada abad ke-19 dan 20. Kontrak-kontrak ini dinamakan Kontrak Panjang atau Lange Politiek Contract yang diadakan antara Pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintah kerajaan yang harus direnovasi oleh setiap Sultan yang memerintah. Isi kontrak panjang cukup luas mengakui keberadaan Kesultanan dengan kewenangan penuh memerintah di wilayahnya sendiri dan memperlakukan hukum adatnya

sendiri. Pemerintah Belanda berada di wilayah kerajaan hanya sebagai perwakilan dari Gubernur (pemerintah) Hindia Belanda dengan ketentuan harus menghormati dan menjaga hak kewajiban Sultan yang mempunyai wilayah. Namun pada perkembangannya pengaruh Belanda semakin kuat, mereka terus ikut mengatur pemerintahan dan juga soal-soal kemasyarakatan. Mereka berusaha menghasut, mengadu domba dan mencampuri setiap pergantian raja/sultan.

Ketika Belanda berkuasa di pulau Sumbawa, kerajaan-kerajaan yang ada diadu domba oleh Belanda. Antara lain : pada tahun 1771 antara Bima dengan Dompu. Dompu dengan Sumbawa pada tahun 1788. Dompu dengan Tambora pada tahun 1799, pada tahun tersebut Sultan Abdurahman menyerang Tambora, beliau meninggal di arena pertempuran di Kempo. Mulai saat itu sebagian wilayah Tambora bagian selatan diserahkan kepada Dompu.¹²

Kekuasaan Belanda di Dompu semakin kuat, pada awal abad ke-19 di Dompu diperintah raja-raja (sultan) yang lemah Kerajaan dikacaukan oleh pemberontakan pada tahun 1803 yang memerlukan campur tangan residen. Sejak Sultan Abdul Azis putra Sultan Abdullah, yang mengganti Sultan Yakub tidak banyak berbuat untuk memajukan kerajaannya. Seluruh kerajaan antara tahun 1810-1814 diancam perompak-perompak yang menghancurkan desa-desa. Pada tahun 1809 Gubernur Jenderal Daendels menegaskan, Gubernur

Van Kraam untuk memperbaharui kontrak perjanjian dengan Dompu, perjanjian tersebut diadakan di Bima. Begitu pula penggantinya Sultan Muhammad Tajul Arifin I, Putra Sultan Abdul Wahab. Sultan Muhammad Tajul Arifin I diganti oleh Sultan Abdurasul II, adik beliau. Dari tanggal 5-12 April 1815 gunung Tambora meletus, sepertiga dari penduduk tewas dan sepertiganya melarikan diri. Akibat dari meletusnya Gunung Tambora juga dengan Belnit Gubernur Jenderal Ned Indie tahun 1866 tertanggal 2 September No. 127 Kerajaan Tambora dan Papekat dilikwidasi karena letusan yang begitu dahsyat memporak-porandakan bangunan dan menewaskan hampir seluruh rakyatnya.¹³ Sultan Abdurasul II memindahkan istana Bata ke Istana Bata Baru, karena itu ia diberi gelar Bata Bou. Beliau diganti oleh putranya Sultan Muhammad Salahuddin.

Sultan Muhammad Salahuddin mengadakan perbaikan sistem dan hukum pemerintahan. Berdasarkan hasil musyawarah dengan para ulama Islam beliau menetapkan hukum adat dan hukum Islam berlaku di wilayah kekuasaannya. Dalam menjalankan pemerintahan Sultan dibantu oleh majelis Hadat dan Majelis Hukum. Di dalam tata susunan kepangkatan Hadat dan Hukum mereka disebut manteri-manteri dengan sebutan : Raja Bicara, Rato Rasanae, Rato Parenta, dan Rato Renda. Mereka tergabung dalam

¹² Hilir Ismail, *op.cit.*, hal. 20.

¹³ I Gdc Parimartha, *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915*. (Jakarta : Djembatan, 2002), hlm. 111-120., Hilir Ismail, *Ibid.*, hlm. 22, Lalu Wacana, *op. cit.* hlm. 12., Siti Maryam R. Salahuddin, *op.cit.* hlm. 4.

suatu Dewan Hadat, merupakan badan kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Sultan. Hadat juga merupakan kelengkapan pemerintahan yang berfungsi menjalankan hukum agama yang dikepalai oleh Kadi atau sultan menurut keperluannya. Sultan Salahuddin ini menjalin hubungan baik dengan pemerintah Belanda. Menurut Zollinger, sejak mengadakan perjanjian kontrak dengan Belanda Dompu adalah teman setia pihak Belanda di pulau Sumbawa, tidak pernah ada perselisihan dengannya seperti di Bima. Penentangan mulai ada semenjak Dompu dipimpin oleh Sultan Muhammad Sirajuddin.¹⁴

Sultan Muhammad Salahuddin diganti oleh Sultan Abdullah putranya. Sultan ini kebanyakan mementingkan dirinya sendiri, tidak seperti ayahnya. Pada masa pemerintahannya, beliau menandatangani perjanjian kontrak panjang dengan Belanda tahun 1886. Beliau diganti oleh putranya Sultan Muhammad Sirajuddin yang memperbaharui kontrak panjang dengan Belanda pada tahun 1905.

Pada masa itu kekuasaan Belanda di pulau Sumbawa semakin kuat saja. Semua ingin diurus dan semua ingin dikuasai, bahkan pajak penghasilan harus diserahkan kepada pihak Belanda, sejumlah kerajaan semakin sadar akan hal itu. Melalui pendekatan kontrak seperti di atas, mulai tahun 1905 secara serempak sultan-sultan di pulau Sumbawa kehilangan

¹⁴ Lalu Wacana, dkk., *op. cit.* hal. 121-122.

sebagian kontrol atas perdagangan di wilayahnya, karena pada tahun-tahun ini sultan-sultan di Sumbawa mulai menandatangani suatu kontrak dengan pemerintah Belanda yang berisi suatu ketentuan membatasi wewenang mereka dalam pemasukan penghasilan dari pajak-pajak perdagangan di pelabuhan. Petugas pemerintah Belanda mulai melakukan kontrol langsung, mengatur pemasukan pajak perdagangan dari pemerintahan sultan. Oleh sebab itu, meskipun sultan disebut sebagai penguasa (*Zelfbesturder*) di seluruh wilayah, namun secara langsung (dalam praktek) ia hanya kepala dari wilayah distriknya sendiri. Koordinasi kekuasaan dipegang oleh wakil penguasa Belanda (*civiel gezaghebber*)¹⁵. Hal tersebut merupakan bibit kekecewaan di kalangan tokoh-tokoh penduduk dan cukup mendorong munculnya suatu perlawanan terhadap sistem kekuasaan yang ada. Sehingga timbulah berbagai ketidakpuasan dan perlawanan yang terjadi pulau Sumbawa antara lain : Perang Undru (1907-1908) di Sumbawa, Perang Baham di Lunyuk Sumbawa tahun 1923, Perang Dena tahun 1908 di Bima, Perang Donggo tahun 1909-1909, Perang Ngali di Bima tahun 1908 dan lain sebagainya.¹⁶

Namun semua perlawanan ini segera dapat dilumpuhkan setelah pasukan militer Belanda datang menyerangnya. Dengan munculnya berbagai

¹⁵ I Gde Parimartha, *op.cit.* hlm. 350

¹⁶ Baca : Lalu Wacana, *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Nusa Tenggara Barat..* (Jakarta : Depdikbud, 1983/1984), hlm. 59-105., lihat juga : Hilir Ismail, *op.cit.* hlm. 26

perlawanan ini telah membawa akibat jatuhnya sama sekali wewenang sultan-sultan untuk mengatur negerinya sendiri, dan kini diatur oleh petugas dari pemerintah Belanda. Maka perlawanan yang dipimpin oleh para bawahan sultan di tingkat pusat, dan desa-desa, serta tokoh-tokoh agama, memberi pertanda bahwa keadaan tertekan terjadi pada kalangan yang luas, sehingga sultan tidak dapat mengatasinya. Tampilnya kepala-kepala kampung di pantai (sekitar pelabuhan) dan haji-haji menjadi pemimpin gerakan, dapat dimengerti sebagai adanya kepentingan dagang dan semangat Islam di dalamnya. Helius Syamsudin antara lain menyatakan, bahwa posisi sultan saat itu memang sulit. Mereka terjepit antara kepentingan Belanda dan rakyat, hal ini menyebabkan wibawa sultan kian merosot.¹⁷

Dengan adanya berbagai kejadian ini wilayah kekuasaan di pulau Sumbawa tidak lagi terpecah ke dalam pemerintahan kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri atau merdeka satu sama lain, tetapi kini disatukan dibawah payung pemerintah Belanda. Untuk kelancaran tugas pengawasan, maka pada tahun 1909 Sumbawa di masukkan ke dalam Residensi Timor dan daerah taklukannya, serta menempatkan seorang petugas, *Asisten Residen* di Sumbawa Besar. Dengan ini seluruh wilayah di pulau Sumbawa menjadi satu daerah bagian (*afdeeling*) di bawah seorang *Asisten Residen* yang

¹⁷ Helius Syamsudin, *Perang Ngali dan Perang Sapugara di pulau Sumbawa tahun 1908*. (Jakarta : Depdikbud, 1981), hlm. 15.

berkedudukan di Sumbawa Besar. Di bawah Asisten Residen, di tiap daerah *Onder-Afdeeling* ditempatkan seorang pejabat sipil, *civil gezaghebber* yang dapat mengontrol tindakan-tindakan raja atau sultan di Sumbawa, ketentuan ini berlaku sejak 1 April 1909. Peristiwa pemisahan ini membuat diputusnya hubungan tradisi antara Sumbawa dan Makasar yang telah terjadi berabad-abad dan kini masuk ke dalam lingkungan Timor.¹⁸

Di dalam Peraturan Perundang-undangan Pemerintah Hindia Belanda ditetapkan 2 (dua) kategori daerah di Indonesia :

1. Daerah atau wilayah yang sebelum adanya Pemerintah Belanda di Indonesia sudah mempunyai susunan masyarakat yang berpemerintahan sendiri atas dasar Hukum Adat disebut : *Inheemse Zelfregerende Gebiedsdelen* atau Wilayah Pribumi yang berpemerintahan sendiri.
2. Daerah yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda, daerah-daerah ini disebut : *Gedecentraliscerde Zefregerende Gebiedsdelen* atau Daerah Desentralisasi yang berpemerintahan sendiri.

Kerajaan-kerajaan di pulau Sumbawa termasuk dalam kategori Daerah yang tidak langsung diperintah oleh Belanda yang disebut dengan *Indirec Bestuursgebeid* atau kategori I, sedangkan kategori II adalah daerah yang langsung diperintah oleh Pemerintah Hindia Belanda yang disebut *Direct Besteuursgebeid* (termasuk tiga daerah yang ada di pulau Lombok).

¹⁸ I Gdc Parimatha, *op.cit.*, hlm. 351-354.

Sampai pada abad ke-20 Kesultanan Dompu masih dapat dikatakan berada di lingkungan pemerintah Belanda, berdasarkan kontrak politik (*Lange Contract*) yang ditandatangani tahun 1905 oleh Sultan Muhammad Sirajuddin. Namun berdasarkan pertimbangan pemerintah Belanda, Dompu dianggap daerah yang kecil dan kurang berarti bagi perdagangan Belanda, selalu dicarikan daya upaya untuk menghapuskannya. Untuk urusan administrasi bagi Bima dan Dompu ditetapkan *Gekomiterden Kas* antara Bima-Dompu, uang pajak Dompu harus disetor ke Bima. Kebijakan ini secara terang-terangan ditolak oleh Sultan Muhammad Sirajuddin dari Dompu bersama hukumnya, namun Residen Timor di Kupang tidak menggubrisnya.

Dengan dalih yang dibuat-buat, pada tahun 1934 Sultan Muhammad Sirajuddin bersama keluarganya dibuang ke Kupang (Timor). Sejak saat itu Kesultanan Dompu dihapus dan digabungkan dengan Kesultanan Bima. Dalam lingkungan Kesultanan Bima, bekas wilayah Dompu dibagi menjadi dua kejenelian yaitu jeneli Dompu dan Jeneli Kempo. Dan sejak saat itu pula Dompu tidak mempunyai kepala pemerintahan yang dipimpin seorang sultan, melainkan langsung oleh Belanda melalui *Gezaghebber* yaitu Van Derplas yang dibantu oleh Jeneli Dompu dan Jeneli Kempo.¹⁹

Penguasaan Belanda di Dompu baru berakhir pada tahun 1942 bersamaan dengan masuknya Jepang yang mendarat di pulau Sumbawa tanggal 17 Juli 1942. Pada Jaman Jepang diadakan Perjanjian antara

Pemerintah Dai Nippon dengan Kesultanan Bima tanggal 11 Mei 1942 yang menetapkan bahwa Dompus masuk dalam wilayah Kesultanan Bima. Namun isi perjanjian ini banyak ditentang sebagian rakyat Dompus yang disponsori oleh para pemuda yang ingin mengembalikan status Kesultanan Dompus, karena perjanjian tersebut dibuat dibawah tekanan Jepang. Kesultanan Dompus baru dihidupkan kembali pada masa Negara Indonesia Timur, yaitu dengan dilantikannya Sultan Muhammad Tajul Arifin menjadi Sultan pada tanggal 12 September 1947.

¹⁹ M. El-Hayyat Ong, *Dompus Tempatku Mengabdikan*. (Grobogan : Pustaka Jurnalista, 2004), hlm. 69.

BAB III
SULTAN MUHAMMAD SIRAJUDDIN MENENTANG
KEKUASAAN BELANDA

3.1. Memangku Jabatan Sultan.

Dompu merupakan salah satu kerajaan / kesultanan yang termasuk Kesultanan Besar “ *State Government* ” yang ada di Pulau Sumbawa bersama dua rekannya yaitu Bima dan Sumbawa. Sedangkan tiga yang lainnya termasuk unit politik kecil atau kerajaan kecil “ *Minimal Government* ” yaitu Sanggar, Tambora dan Papekat. Kriteria besar dan kecil ini tentunya ditetapkan berdasarkan luas wilayah pemerintahan, serta kuatnya sentralisasi, hirarki dan diferensiasi kekuasaan.¹ Setelah Gunung Tambora meletus tahun 1815, Kerajaan Tambora dan Papekat lenyap karena separuh lebih penduduknya mati dan keadaan kota porak-poranda. Sedangkan Kerajaan Sanggar dimasukkan ke wilayah Bima sebagai ganti wilayah Bima di Manggarai.² Jadi di Pulau Sumbawa tinggal tiga kesultanan yaitu Bima, Sumbawa dan Dompu yang sekarang masing-masing menjadi Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu.

Sebelum menjadi sebuah Kesultanan Dompu telah terbentuk sebuah kesultanan yang berdaulat, keberadaannya telah ada sejak tahun 1364, yaitu

¹ Helius Syamsudin, Makalah dalam Seminar Sejarah Lokal tahun 1982 di Jakarta, hlm. 1

² Lebih jelasnya lihat : Moh. Yamin, “ Runtuhnya Kerajaan Sanggar Abad XVII ” Balai Kajian Sejarah Dan Nilai Tradisional Denpasar. Naskah belum diterbitkan tahun 2002.

masuknya nama "Dompu" dalam buku Negarakertagama karangan Empu Prapanca. Keberadaan kerajaan di mulai dari Dewa Betara Dompu yang bergelar Dewa yang punya Batawau Dompu kira-kira abad ke- 9 sampai Dewa Mawaa Taho pada abad ke 14. Pada masa berikutnya kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Sumbawa berada dalam pengaruh kerajaan Gowa -Tallo (Makasar). Ketika kerajaan Gowa- Tallo (Makasar) sudah menjadi kerajaan Islam/kesultanan, maka kerajaan-kerajaan di Pulau Sumbawa diikat dengan suatu perjanjian bahwa Islam harus menjadi agama resmi kerajaan. Begitulah sejak abad ke – 17 Islam menjadi agama resmi di Kerajaan Dompu dan berubahlah menjadi Kesultanan Dompu. Sultan pertama Dompu adalah Sultan Syamsudin yang bergelar Mawaa Tunggu, Beliau adalah putra dari Mawaa Taho. Merupakan raja ke- 9 Dompu, dilantik menjadi Sultan Dompu pada tanggal 24 September 1545 atau bertepatan tanggal 8 Rajib 952 H pada hari Jum'at. Mulai saat itu Dompu diperintah oleh seorang sultan dan Agama Islam menjadi agama resmi kerajaan.

Diantara beberapa sultan yang berkuasa di Dompu adalah Sultan Muhammad Sirajuddin pada tahun 1848 M. Dinobatkan sebagai sultan ke-20 di Kesultanan Dompu menggantikan ayahandanya Sultan Abdullah yang bergelar Membora Bara Neihi Neawa atau Mahidi Mbojo yang meninggal tanggal 25 Pebruari 1882. Sultan Abdullah adalah seorang sultan yang hidup sederhana, namun juga sangat taat menjalankan syareat Islam dan anti

dengan Belanda. Hal itulah yang dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Sirajuddin sebagai pewaris tahta Kesultanan Dompu.

Sultan Muhammad Sirajuddin dinobatkan sebagai Sultan ke – 20 pada tanggal 25 Pebruari 1882. Tanggal tersebut merupakan wafatnya Sultan Abdullah ayahandanya, sehingga beliau langsung menggantikannya. Berbagai sumber mengatakan bahwa Sultan Muhammad Sirajuddin dinobatkan pada tanggal 21 Oktober 1886. Sedangkan menurut Helius Syamsudin mengatakan bahwa Sultan Muhammad Sirajuddin sampai tiga kali mendapat surat keputusan pengukuhan dari pemerintah Hindia Belanda melalui pengesahan dari Gubernur Jenderal di Batavia (Jakarta) serta melalui Gubernur di Makasar dan Residen Timor yang berkedudukan di Kupang.³ Surat keputusan tersebut sebanyak tiga kali yaitu :

1. Tanggal 25 Pebruari 1882
2. Tanggal 21 Oktober 1886
3. Tanggal 18 Oktober 1887.

Berbagai analisis mengapa Sultan Muhammad Sirajuddin sampai tiga kali dilantik sebagai Sultan Dompu ke-20, semata-mata karena Sultan Muhammad Sirajuddin selalu membangkang terhadap Belanda, terutama semenjak perjanjian Bungaya tahun 1667 yang intinya berisi mengakui kekuasaan dan monopoli Belanda di atas kekuasaan kesultanan sebagai

³ Helius Syamsudin, dalam : *Sejarah Dompu, Sketsa Perubahan Sosial Politik Sebuah Masyarakat..* Tahun 1995.

politik Belanda dengan istilah Dominasi Dependensi (Menguasai dan dikuasai). Politik Dominasi Dependensi Belanda tersebut sangat merugikan pemerintahan kesultanan, terutama kesultanan yang berada di wilayah Indonesia timur seperti di Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil.⁴

Akibat dari pembangkangannya tersebut Sultan Muhammad Sirajuddin dibuang oleh pemerintah Hindia Belanda di Kupang Pulau Timor, bersama kedua putranya yakni Abdul Wahab Sirajuddin (Resma To' i) dan Abdullah Sirajuddin (Resma Goa). SK. Oleh Gubernur Hindia Belanda untuk mengasingkan Sultan Muhammad Sirajuddin bersama kedua orang anaknya tersebut adalah SK No. 11 tahun 1934. Berarti sejak tahun 1934 Sultan Muhammad Sirajuddin mengalami pembuangan di Kupang sampai wafatnya tahun 1937 tepatnya tanggal 14 Pebruari, dan dimakamkan di kompleks pemakaman Batu Kadera, Kampung Air Mata, Kupang. Kalau dihitung mulai pelantikan tahun 1886 sampai beliau diasingkan ke Kupang tahun 1934, maka Sultan Muhammad Sirajuddin merupakan Sultan Dompu yang paling lama berkuasa memangku jabatan sebagai sultan yaitu sekitar 48 tahun.

3.2. Menegakkan Syareat Islam.

Pengaruh Agama Islam Masuk di Dompu kira-kira sejak tahun 1628. Namun berbagai sumber mengatakan bahwa secara kecil-kecilan pengaruh

⁴ M.El. Hayyat Org. *Dompu Tempatku Mengahdi*. (Grobogan : Pustaka Jurnalistik, 2003), hlm. 67.

Islam sudah mulai masuk di Dompu sejak tahun 1528 yaitu ketika Agama Islam mulai memasuki Dompu melalui Jawa dan Sumatera. Ini berarti Islam di Dompu sudah mulai memberi pengaruh pada kebudayaan dan masyarakat Dompu.

Sebelum pengaruh Islam masuk, pengaruh Hindu telah masuk di Dompu dengan di taklukannya Dompu oleh Majapahit sekitar tahun 1357 dan berlangsung dan berlangsung sampai dikuasainya Dompu oleh Kerajaan Kembar Goa – Tallo (Makasar) sekitar tahun 1618, yaitu pada jaman pemerintahan Raja Goa ke-14 I Mangagerangi daeng Manrabria, Sultan Alaudin Tumenanga Ri Gaukenna yang memerintah tahun 1593 – 1639. Pengaruh ini menjadi lebih kuat lagi pada masa pemerintahan I Manuntungi Ri Papambatuna yang memerintah pada tahun 1639-1653. Kentalnya pengaruh Islam terlihat jelas dan membudaya sampai sekarang sejak jaman pemerintahan Raja Goa ke-16 I Malombasi Daeng Mattawang, Kareng Bonto Margape, Sultan Hasanuddin Tumengnga Ri Bala Pangkana yang memerintah mulai tahun 1653-1668.⁵ Dalam kaitan ini, kerajaan di Pulau Sumbawa (Bima, Dompu dan Sumbawa) menjadi daerah taklukan Kerajaan Makasar dengan perjanjian bahwa Agama Islam menjadi agama resmi kerajaan.⁶ Sejak saat itulah syareat Islam mulai ditegakkan di wilayah Dompu

⁵ Manggaukang Reba, Mars Ansory Wijaya, dalam : *Dompu Dulu, Kini dan Esok*, (Fakta-Fakta Tentang Dompu) (Dompu : Pemkab Dompu, 2002), hlm. 27.

⁶ *Ibid*, hlm.28.

oleh para sultan yang berkuasa secara turun-temurun, dari sejak dimulainya Kesultanan Dompu yaitu Sultan Syamsuddin atau Mawaa Tunggu.

Masa Islam di Dompu juga ditandai dengan berlakunya sistem politik pemerintahan yang berdasarkan hukum Islam dan sistem budaya yang Islami. Islamnya Raja Goa-Tallo telah memberi warna dan sangat menentukan bagi perkembangan Islam di kerajaan yang ada di Pulau Sumbawa. Peranan Makasar bagi kebangkitan Islam di Dompu amatlah besar. Bantuan diberikan berdasarkan ikatan darah (perkawinan) dan persamaan akidah disertai persamaan visi dan misi dalam menghadapi penjajah yaitu Belanda dan Portugis di belahan Nusantara wilayah timur. Namun berbagai bantuan dari Makasar tersebut telah disalah artikan oleh Belanda dan portugis. Menurut mereka lima kesultanan di Pulau Sumbawa (Bima, Dompu, Sanggar, Tambora dan Sumbawa) sejak tahun 1640 sudah menjadi jajahan Makasar. Di dalam Bo Sangaji Kai (Transkripsi) dikutip beberapa contoh penilaian subjektif dari pihak Belanda terhadap peranan Makasar. Menurut Dr. Noor diyn, Masa pemerintahan siltan I, hanya samar diketahui setelah kerajaan di Pulau Sumbawa dikalahkan dua kali oleh Armada Makasar, tahun 1618 dan tahun 1619 dan dijadikan "Budak " Makasar dengan kewajiban membayar upeti setiap tahun. Entah sengaja atau tidak Dr. Noor Diyn telah keliru memahami hubungan tersebut. Ia seolah-olah tidak tahu bahwa Roh dan Spirit Islamiah yang mendorong Makasar membantu teman-teman sedarah dan seakidah selama mereka

yang ditolong memiliki visi dan misi yang sama dengan Makasar. Tidak sama dengan kekuatan sejarah yang menggulirkan penjajahan di bumi nusantara yang dilakukan oleh Belanda dan Portugis.⁷

Roda sejarah Islam di Kesultanan yang ada di Pulau Sumbawa terus digulirkan oleh Roh Islam, termasuk juga di Kesultanan Dompu. Agama Islam dijadikan agama resmi kerajaan, para sultan berusaha menegakkan syariat Agama Islam. Semua kekuatan baru berpedoman pada nilai dan norma agama Islam serta adat yang islami. Semangat kehidupan dengan roh Agama Islam inilah yang nantinya merupakan salah satu pemicu perlawanan terhadap kekuasaan penjajah, karena mereka dianggapnya orang kafir. Kekentalan syariat Islam di Pulau Sumbawa mulai berkurang dengan kedatangan bangsa asing di wilayah nusantara, terutama setelah pemerintahan kesultanan mengadakan hubungan dengan bangsa barat, terutama Kolonial Belanda (VOC) antara tahun 1600-1800, baik hubungan dagang atau politik yang selalu merugikan pemerintahan kesultanan. Dengan keterkaitan tersebut sedikit demi sedikit budaya barat mempengaruhi budaya Islam.

Dalam kaitan menegakkan syariat Islam di Dompu, Sultan Muhammad Syamsuddin merupakan sultan yang hidupnya sederhana, namun sangat taat menjalankan syariat Islam dan anti penjajah. Watak dan

⁷ Hilir Ismail, "Pemahaman Kembali Sejarah Bima dan Daerah lain di pulau sumbawa (Suatu Tinjauan Sejarah Lokal)". Makalah yang disampaikan dalam Dialog Kesejarahan di Istana Bima dalam rangka "

kepemimpinan akhlaqul karimah yang dimiliki oleh ayahnya yaitu Sultan Abdullah telah menurun kepadanya. Keyakinan Sultan Abdullah tidak pernah bimbang dan ragu terhadap ajaran Islam yang di anut oleh Dou Dompou. Bahkan Sultan Abdullah telah menyaksikan sendiri kebesaran dari kekuasaan Tuhan tentang kebaikan dan keburukan apabila dikehendaki- Nya yaitu saat terjadi meletusnya Gunung Tambora tahun 1815.

Sultan Muhammad Sirajuddin bahkan lebih keras menentang kerja rodi dan penjualan candu dalam wilayahnya. Walaupun perjanjian panjang (Lange Contract) telah ditandatangani, tetapi Sultan merasa tersiksa dengan sikap penjajah yang sangat arogan. Sebagai salah seorang pemimpin yang sangat concern terhadap syareat Islam yang menjadi kewajiban bagi rakyat yang dipimpinnya, Sultan Muhammad Sirajuddin sangat tidak menyetujui ketidak-adilan penjajah yang mewajibkan rakyat kerja paksa (rodi). Sultan harus membayar upeti, sultan harus mengizinkan perdagangan candu (madat) yang tidak sesuai dengan syareat Islam yang telah diterapkan di wilayah Kesultanan Dompou. Apalagi rakyat sangat menderita akibat letusan Gunung Tambora yang mempengaruhi berbagai sendi kehidupan di Dompou sesudah tahun 1815.⁸

Dalam mengendalikan pemerintahannya, Sultan Muhammad Sirajuddin sangat kental menjalankan syareat Islam dan hukum

Lawatan Sejarah Sumbawa-Bima”, Juni 2003, hlm 14.

⁸ M. EL- Hayyat Ong, *op.cit.*, hlm.16.

pemerintahan Islam. Begitu taat dan patuhnya pada ajaran Islam, sultan sangat tegas menolak perdagangan candu. Contoh yang lain adalah wujud pakaian RIMPU (semacam cadar) bagi kaum perempuan. Pakaian rimpu ini sampai sekarang masih dapat ditemukan oleh kaum perempuan di dompu. Rimpu sesungguhnya sangat erat dan memiliki kesamaan dengan jilbab. Sultan Muhammad Sirajuddin selalu memberi motivasi dan dorongan kepada rakyatnya untuk membangun langgar, surau dan mushola, anjuran ini oleh rakyat disambut dengan suka cita. Sultan Muhammad Sirajuddin juga mewajibkan rakyatnya sejak anak-anak sampai pegawai hadat pemerintahan untuk bisa membaca Al- Qur'an, taat melakukan sholat lima waktu dan ibadah lainnya.

Sultan Muhammad Sirajuddin sangat anti penjajah dan Islami. Perjanjian Bungaya tahun 1667 telah menghasilkan dominasi dependensi yang sangat merugikan itu, benar-benar dirasakan oleh Kesultanan Dompu yang sangat miskin dan menderita. Watak kepemimpinan akhlaqul karimah sangat mendasar dalam pemerintahan Sultan Muhammad Sirajuddin yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Islam mengajarkan persamaan hak derajat, Islam melarang penindasan terhadap satu golongan oleh golongan lain. Yang dirasakan oleh Sultan Muhammad Sirajuddin, Belanda telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syareat Islam. Belanda telah melakukan penindasan terhadap rakyat dan menjajah negeri leluhur sejak mereka menginjakkan kaki di tanah mereka. Sultan Muhammad Sirajuddin

merasakan ketidak-adilan Belanda, oleh sebab itu sultan menentang semua kebijakan Belanda yang tidak sesuai dengan ajaran syareat Islam. Sampai-sampai Sultan Muhammad Sirajuddin terpaksa mengadakan 3 kali perjanjian dengan pihak Belanda untuk mendapatkan pengakuan sebagai Sultan yang sah yaitu 25 Pebruari 1882, 21 Oktober 1886 dan pada 18 Oktober 1887.⁹

Islam telah menjadi pedoman pelaksanaan pemerintahan dan petunjuk dalam kehidupan bermasyarakat di wilayah Kesultanan Dompu, bahkan sampai Sultan Muhammad Sirajuddin mengakhiri hidupnya di pengasingan. Dibuang Belanda pada tahun 1934 dan wafat tahun 1937 di Kupang, Pulau Timor, salah satunya adalah demi menegakkan syareat Islam di wilayah yang dipimpinnya yaitu Kesultanan Dompu.

3.3. Pembangkangan Yang DiLakukan.

Sultan Muhammad Sirajuddin yang dinobatkan menjadi Sultan ke—20, menandatangani kontrak panjang atau Lange Politick Contract pada tahun 1886. Sebagaimana sultan-sultan sebelumnya penandatanganan tersebut merupakan kelanjutan dari perjanjian sebelumnya yang setiap periode pemerintahan kontrak itu diperbaharui dengan penyesuaian dan perbaikan sampai pada abad ke-19 dan ke-20. Isi kontrak cukup luas yang mengakui keberadaan kesultanan dengan kewenangan penuh memerintah

⁹ *Ibid.* hlm. 32-33.

diwilayahnya sendiri dan memperlakukan hukum adatnya. Pemerintah Belanda berada di wilayah kerajaan hanya sebagai perwakilan dari Gubernemen (pemerintah) Hindia Belanda dengan ketentuan harus menghormati dan menjaga hak dan kewajiban sultan yang mempunyai wilayah.

Sebagaimana diketahui Dompu mendapat pengaruh kekuasaan Belanda hampir selama tiga abad atau sekitar 270 tahun. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari ditaklukkannya Dompu oleh Kerajaan Goa-Tallo (Makasar) pada tahun 1618 pada jaman pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alaudin Tu Menanga Ri Gauhana. Karena itu begitu raja Goa ke-16 Sultan Hasanuddin Tu Menanga Ri Balla Pangkana menandatangani perjanjian Bungaya atau cappaya Ri Bungaya pada tanggal 18 Nopember 1667 dengan Speelman, maka Dompu sebagai bagian dari taklukan Kerajaan Goa otomatis harus tunduk pada perjanjian tersebut. Sebab salah satu pasal dari 30 pasal perjanjian tersebut adalah Makasar mengakui monopoli VOC di seluruh nusantara bagian timur. Sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut, maka pada tahun 1669 diadakan perjanjian antara Dompu dengan VOC di Benteng Rotterdam Makasar. Sultan Dompu pada saat itu adalah Sultan Sirajuddin yang bergelar Manuru Bata. Sejak saat itu Dompu sering di sebut-sebut kawan VOC yang setia di seluruh Pulau Sumbawa.

Sultan Muhammad Sirajuddin termasuk Sultan Dompu yang menandatangani kontrak panjang dengan pihak Belanda pada tahun 1886

dan memperbaharui kontrak lagi pada tahun 1905 atau 19 tahun kemudian tepatnya pada 31 Desember 1905. Perjanjian Kontrak panjang tersebut tidak hanya dilakukan dengan kesultanan Dompu, melainkan dengan kesultanan lain seperti Bima dan Sumbawa. Isi perjanjian tersebut tentu saja mengikat dan membatasi kebebasan dari sebuah kerajaan yang berdaulat seperti halnya Kesultanan Dompu. Lambat atau cepat pasti akan terjadi benturan-benturan kepentingan antara pihak belanda yang menghendaki dipatuhinya semua ketentuan yang mengikat, sementara oleh sultan dan rakyatnya akan merasakan bahwa ketentuan tersebut sebagai pengekangan terhadap kepentingan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Beberapa isi perjanjian yang dipandang mengganggu kebebasan pemerintah Kesultanan antara lain :

- Keharusan melekukan penyeteran seluruh pajak kepada pemerintah.
- Keharusan untuk menerima sistem monopoli perdagangan hasil bumi hanya dengan Belanda.
- Keharusan untuk meminta persetujuan pemerintah Belanda dalam hal pergantian dan pengangkatan sultan.

Untuk mengawasi pelaksanaan isi perjanjian tersebut, Pemerintah Belanda menempatkan seorang controleur yang berkedudukan di Bima dan seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Sumbawa untuk ketiga kesultanan yaitu : Dompu, Bima dan Sumbawa.

Melalui pendekatan kontrak tersebut di atas, mulai tahun 1905 secara serempak sultan-sultan di Pulau Sumbawa kehilangan kontrak atas perdagangan diwilayahnya, karena pada tahun ini sultan-sultan telah menandatangani suatu kontrak yang isinya suatu ketentuan membatasi kewenangan mereka dalam pemasukan penghasilan pajak-pajak perdagangan terutama di pelabuhan-pelabuhan. Petugas pemerintah Belanda mulai melakukan kontrol langsung, mengatur pemasukan pajak di wilayah kesultanan, yang membawa akibat terjadi perubahan struktur pemerintahan sultan.¹⁰ Suatu perubahan kehidupan ekonomi dan struktur kekuasaan seperti di atas telah membawa pengaruh tidak hanya pada penghasilan sultan, tetapi juga posisi para pembesar lainnya di bawah sultan, dan penduduk yang diwajibkan membayar pajak penghasilan oleh pemerintah Belanda. Hal demikian akan terjadi benturan-benturan kepentingan dan kekecewaan di kalangan tokoh-tokoh penduduk dan cukup mendorong munculnya suatu perlawanan atau pembangkangan terhadap sistem kekuasaan baru tersebut. Maka terjadilah pergolakan seperti : Perang Ngali, Perang Dena, Perang Bolo, perlawanan rakyat Manggelewa Soriutu di Dompu, Perang Sapugara, Perang Baham di wilayah Kesultanan Sumbawa dan lain sebagainya. Dengan kejadian tersebut berbagai kekuasaan di Pulau Sumbawa tidak lagi terpecah ke dalam pemerintahan kerajaan – kerajaan

¹⁰ I Gde Parimartha, *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815-1915*. (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. 350.

yang berdiri sendiri atau merdeka satu dengan yang lain, tetapi kini disatukan di bawah payung kekuasaan pemerintah Belanda. Posisi sultan juga sangat sulit, mereka terjepit antara kepentingan Belanda dan rakyat. Hal tersebut juga menyebabkan kewibawaan sultan juga merosot.¹¹

Di Kesultanan Dompu, sekalipun beberapa anggapan bahwa semenjak Dompu menandatangani kontrak panjang dengan Belanda di anggap temebn setia Belanda, namun hal itu tidak berlaku ketika Sultan Muhammad Sirajuddin berkuasa dan memerintah. Berbagai perlawanan yang terjadi tahun 1905, ternyata juga menjadi motivasi bagi sultan Muhammad Sirajuddin melakukan perlawanan. Walaupun perjanjian panjang (Lange Contract) telah ditandatangani, hati sultan merasa tersiksa dengan sikap Belanda yang sangat arogan. Sultan Muhammad Sirajuddin sangat tidak menyukai ketidakadilan penjajah yang mewajibkan rakyat untuk kerja paksa (Rodi), membayar pajak, sultan harus membayar upeti, sultan harus mengizinkan perdagangan candu (mandat) yang tidak sesuai dengan syareat Islam yang telah diterapkan di Kesultanan Dompu. Apalagi rakyat sangat menderita akibat meletusnya gunung Tambora yang sangat berkepanjangan pada tahun 1815.

Jika dilihat dari perjalanan masa pemerintahan Sultan Muhammad Sirajuddin yang berkuasa sekitar 48 tahun maka penentangan atau

¹¹ *Ibid*, hal 354.

pembangkangan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Sirajuddin terhadap isi perjanjian tersebut tidak dilakukan secara terbuka dalam jangka waktu singkat, tetapi sedikit demi sedikit dengan mengabaikan beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan. Setelah penandatanganan kontrak tahun 1905 dengan Sultan Dompu, Sultan Bima, Sultan Sumbawa pemerintah Belanda mulai memasuki urusan administrasi untuk Bima dan Dompu ditetapkan Gekomiterdem Kas antara Bima – Dompu, uang pajak Dompu harus disetor ke Bima, kebijaksanaan ini secara terang-terangan ditolak oleh Sultan Dompu bersama hukumnya, namun hal tersebut tidak digubris oleh Residen Kupang (pemerintah Belanda).

Selain hal tersebut di atas, ada beberapa faktor yang menyebabkan Sultan Muhammad Sirajuddin menentang pemerintah Belanda, yaitu :

1. Belanda menjalankan politik yang tidak sesuai dengan syareat Islam yang sangat ketat di wilayah Kesultanan Dompu. Menurut Sultan Muhammad Sirajuddin, politik Belanda akan menghilangkan syareat / budaya Islam.
2. Sultan Muhammad Sirajuddin dipaksa untuk menyerahkan upeti kepada Belanda seperti sultan-sultan sebelumnya, sesuai dengan perjanjian Bongaya tahun 1667 dan politik Dominasi Dependensi.
3. Sultan Muhammad Sirajuddin tidak menyetujui kerja rodi (kerja paksa) bagi rakyatnya, karena rakyat masih menderita sebagai akibat meletusnya Gunung Tambora tahun 1815, sejak jaman pemerintahan ayahandanya Sultan abdulah.

4. Sultan Muhammad Sirajuddin tidak mengizinkan di wilayah kesultanan Dompu beredar perdagangan madat/candu/minuman keras, karena bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

Dalam beberapa hal, hampir dalam waktu yang jarang pemerintah Belanda melakukan pengawasan ke wilayah kesultanan Dompu. Namun seperti dikatakan di atas, bahwa dengan adanya keinginan dan kepentingan yang berlawanan antara sultan dengan pemerintah Belanda yang menuntut agar pelaksanaan butir-butir perjanjian selalu ditaati, maka bagaimanapun juga pasti terjadi benturan yang menyebabkan salah satu pihak pasti akan menggunakan tindakan kekerasan terhadap yang lain.

Benturan kepentingan tersebut tidak bisa dihindarkan lagi ketika pada tanggal 12 Maret 1908 Sultan Muhammad Sirajuddin melakukan pengangkatan salah seorang putranya yakni Abdul Wahab menjadi putra mahkota, sehingga api permusuhan antara pemerintah Belanda dengan Sultan mulai menyala. Awalnya Sultan Muhammad Sirajuddin mengirim surat pada pimpinan pemerintah Hindia Belanda di Makasar, agar yang menggantikan kelak yakni putra tertuanya Abdul Wahab. Hal itu sesuai dengan tradisi bahwa putra tertua harus menggantikan ayahnya menjadi sultan. Oleh Hadat / Hukum telah dinobatkan Abdul Wahab Sirajuddin menjadi raja muda (Reima To'i). Namun putranya yang kedua Abdullah,

menolak hal tersebut. Abdullah sangat menginginkan tahta kerajaan, karena merasa berpendidikan lebih tinggi dari pada Abdul Wahab kakaknya.¹²

Selain putra tertua, alasan Sultan Muhammad Sirajuddin mengangkat Abdul Wahab sebagai penggantinya, menurutnya Abdul Wahab lebih beragama, lebih memperhatikan rakyat kecil, lebih berwatak seperti beliau sendiri bila dibandingkan dengan putranya yang kedua Abdullah Sirajuddin. Abdul Wahab lebih senang belajar Agama Islam daripada sekolah yang didirikan oleh Belanda. Sedangkan putranya yang kedua, Abdullah lebih senang belajar di sekolah yang didirikan oleh Belanda dari pada belajar Agama Islam. Menurut Abdullah belajar di sekolah yang didirikan oleh Belanda merupakan modernisasi dan demokrasi sesuai dengan perkembangan jaman pada waktu itu. Watak kedua putra sultan tersebut sangat bertentangan, putra kedua sangat mementingkan pengaruh-pengaruh modernisasi dan demokrasi barat.¹³ Pertentangan kedua putra Sultan Muhammad Sirajuddin kian bertambah, bahkan Abdullah berhasil mendapat dukungan sehingga terjadi dua kelompok yaitu kelompok yang mendukung Abdul wahab dan kelompok yang mendukung Abdullah. Kedua kelompok ini sangat fanatik sehingga keributan makin hari makin meningkat dan meruncing. Kejadian tersebut didengar oleh Residen Kupang pada tahun 1930- an. Kemudian Residen Kupang memanggil Sultan Muhammad

¹² El. Hayyat Ong, *Dompu Kampung Halamanku*, (Grobogan : Ummul Qura Press, 2002), hal. 16.

¹³ El.Hayyat Ong, *Dompu Tempatku Mengabdi*. (Grobogan, Pustaka Junalista, 2003), hlm. 68.

sirajuddin dengan mengirimkan kapal putih ke pelabuhan Bima untuk menjemput Sultan Dompu. Setelah sampai di Kupang, Residen Kupang menegur Sultan Muhammad Sirajuddin dengan mengatakan bahwa “ Sumber keributan yang terjadi di Dompu diatur oleh Tuan Sultan karena tidak setuju dengan Gekomiterden Kas Bima-Dompu. Saya minta setelah sultan tiba kembali ke Dompu agar keributan yang tuan sultan atur karena tidak setuju dengan Gekomiterden dapat ditentramkan kembali”.

Sekembali Sultan Muhammad Sirajuddin dari Kupang, Sultan yang pada waktu itu usianya sudah mencapai 90 tahun, beliau tidak dapat memilih antara kedua putranya mana yang harus dirangkul dan yang mana harus ditepis, namun keributan bukannya mereda melainkan bertambah memuncak.

Belanda yang telah mulai merasa tidak simpati kepada Sultan Mumammad Sirajuddin karena pembangkangannya terhadap isi perjanjian dalam kontrak panjang dan ditambah pelanggaran yang dilakukan oleh Sultan terhadap keharusan untuk meminta persetujuan atas pengangkatan putra mahkota itu, akhirnya menambah kemarahan Belanda. Keadaan yang semakin tegang di Kesultanan Dompu ini sangat menguntungkan politik memecah belah Belanda, sehingga surat yang dikirim oleh Sultan Muhammad Sirajuddin tidak dibalas bahkan tidak diperhatikan sama sekali. Kesempatan ini bahkan digunakan Belanda untuk mengadu domba antara kedua putra sultan tersebut. Kekeruhan politik di Kesultanan Dompu itu

merupakan kesempatan bagi Belanda untuk menghilangkan kekuasaan Muhammad Sirajuddin dari wilayahnya.

Akhirnya Belanda berhasil melakukan politik adu domba dengan terus melakukan provokasi agar permusuhan di tubuh keluarga sultan terus berlangsung dengan menebar berbagai isu pertentangan antara kedua putra sultan, Abdul Wahab, dengan saudaranya Abdullah yang kian lama kian membesar hingga mencapai puncak titik kulminasinya pada tahun 1934, Di mana Belanda mengumumkan bahwa di Kesultanan Dompu telah terjadi perang saudara perebutan kekuasaan yang dinilai sangat memalukan. Akhirnya diputuskan bahwa Sultan Muhammad Sirajuddin dan kedua orang putranya Abdul Wahab dan Abdullah harus diasingkan seumur hidup keluar dari Pulau Sumbawa.

3.4. Diasingkan Ke Kupang.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, kekeruhan politik di Kesultanan Dompu merupakan kesempatan bagi Belanda untuk menghilangkan kekuasaan Sultan Muhammad Sirajuddin dari wilayahnya. Dengan alasan tidak mampu mengamankan wilayahnya, tidak mentaati perjanjian Bungaya, tidak mau membayar upeti dan tidak mengizinkan perdagangan candu (madat) serta tidak rela mengizinkan rakyatnya kerja rodi (kerja paksa). Maka dikeluarkanlah Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 11 tahun 1934 yang menetapkan bahwa Sultan Muhammad Sirajuddin dengan

kedua putranya harus diasingkan seumur hidup di Kupang. Dengan demikian mulai saat itu Sultan Muhammad Sirajuddin bersama kedua putranya yaitu Abdul Wahab Sirajuddin dan Abdullah Sirajuddin dihukum dengan hukuman pengasingan atau dibuang di Kupang Pulau Timor.

Selain kedua putranya, Sultan Muhammad Sirajuddin ketika diasingkan ke Kupang juga disertai oleh Abdurahman M. Amin alias La HB. Berbagai sumber mengatakan bahwa Abdurahman M. Amin yang mempunyai nama kecil La HB ini merupakan putra M. Amin salah seorang warga Bara sahabat dekat Sultan Muhammad Sirajuddin dan orang kepercayaan sultan. Persahabatan antara M. Amin dengan Sultan Muhammad Sirajuddin dilanjutkan oleh anaknya La HB. Sehingga ketika Sultan Muhammad Sirajuddin diasingkan ke Kupang La HB tetap diajak oleh sultan untuk mendampingi yang waktu itu usianya baru 12 tahun. Kesetiaan La HB terhadap Sultan Muhammad Sirajuddin, ternyata dibuktikan hingga sampai akhir hayat sultan, bahkan La HB sendiri tetap tinggal dan wafat di Kupang pada tahun 1970 asli Kupang bernama Gaminiko Talib dan menetap di Kampung Bonipoi Kupang.¹⁴

Selain La HB atau Abdurahman M. Amin, menurut berbagai sumber ikut diasingkan bersama Sultan. Masih ada dua orang wanita yang ikut serta mendampingi Sultan selama di pengasingan. Kedua wanita setengah baya

tersebut oleh tetangga sekitar di mana sultan tinggal di kenal dengan nama Ina laru dan la ria. Kalau wanita itu sehari-hari bertugas memasak dan mencuci serta mengurus keperluan Sultan Sirajuddin selama dipengasingan. Kedua wanita tersebut jarang bergaul dengan tetangga. Keberadaan wanita tersebut beberapa tahun setelah sultan wafat tidak diketahui keberadaannya. Ketika Jepang datang ke Kupang Ina La Ru dan La Ria sudah tidak nampak lagi berada di Kupang. Hanya La Hbsaja yang tinggal dan menetap di Kupang.¹⁵

Menurut penuturan George Nisy Noi, cucu Raja Kupang Nicolas Nisy Noi, tempat atau lokasi yang pertama kali untuk mendarat rombongan Sultan Muhammad Sirajuddin adalah di Pelabuhan Lama Kupang. Kapal milik Belanda yang membawa Sultan Muhammad Sirajuddin adalah kapal milik Belanda yang bernama kapal putih. Pada Sultan dan rombongan turun dari kapal di pelabuhan tersebut sudah disambut oleh Raja Kupang Nicolas Nisy Noi beserta para pejabat kerajaan lainnya. Penyerahan Sultan Muhammad Sirajuddin pada Raja Kupang Nicolas Nisy Noi oleh pemerintah Belanda dilakukan dengan upacara resmi. Intinya Belanda menitipkan Sultan Domp

¹⁴ Agus Suryanto, Abdurahim, *Proses Pemindahan Kerangka Jenasah Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin dari Kupang NTT ke Kabupaten Dompus-NTB. Januari 2002. (Kembalinya Sultan Muhammad Sirajuddin ke Bumi Nggehi Rawi Pahu)*. (Dompus : Pemkab Dompus, 2003), hal. 24.

¹⁵ *Ibid*, hal. 48.

itu kepada Raja Kupang dan selama di Kupang sultan diperlakukan dengan baik serta dihormati oleh pemerintah Kerajaan Kupang.¹⁶

Setelah serah terima di pelabuhan tersebut, kapal milik Belanda yang membawa Sultan Muhammad Sirajuddin pergi meninggalkan Kupang. Selanjutnya Sultan Muhammad Sirajuddin dibawa ke istana raja dan tinggal bersama keluarga kerajaan selama dua bulan. Atas inisistif Raja Nicolas Nisy Noi akhirnya Sultan Muhammad Sirajuddin dipindahkan ke kampung air mata, dengan pertimbangan di Kampung air mata mayoritas warganya beragama Islam. Sultan tinggal di rumah kontrakan milik warga muslim keturunan Arab bernama Bajuber, tinggal kurang lebih selama dua tahun. Setelah kontrak habis selanjutnya oleh pemerintah Kerajaan Kupang, Sultan Muhammad Sirajuddin kemudian dipindahkan ke rumah sewaan milik warga keturunan Cina (sekitar 100 meter dari rumah kontrak sebelumnya).¹⁷

Di Kampung Air Mata inilah pada tahun 1937, Sultan Muhammad Sirajuddin wafat. Setelah tinggal selama sekitar 3 tahun, Sultan Muhammad Sirajuddin dimakamkan di kompleks pemakaman muslim Batu Kadera. Sedangkan kedua putra Sultan Muhammad Sirajuddin yaitu Abdul Wahab Sirajuddin dan Abdullah Sirajuddin pada waktu kedatangan Jepang dan berkuasanya Jepang berhasil kembali ke Dompu lewat Makasar (Ujung Pandang). Abdul Wahab Sirajuddin wafat di Dompu sedangkan Abdullah

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

Sirajuddin wafat di Jakarta. Oleh pemerintah Kabupaten Dompu, pada tanggal 9 Januari 2002, makam Sultan Muhammad Sirajuddin di Batu Kadera digali untuk diambil kerangka jenastahnya. Kemudian dibawa ke Dompu untuk dimakamkan kembali di tanah kelahirannya pada tanggal 22 Januari 2002 di kompleks pemakaman Masjid Agung Baiturahman Dompu. Sultan Muhammad Sirajuddin mendapat gelar Sultan Manuru Kupa (Sultan yang wafat di kupang).

3.5. Dompu Setelah Kepergian Sultan Muhammad Sirajuddin.

Dengan tindakan pemerintah Belanda mengasingkan Sultan Muhammad Sirajuddin beserta kedua orang putranya, hal tersebut cukup menggoyahkan pilar Kesultanan Dompu yang berdiri kokoh dan telah berusia ratusan tahun yang diperintah oleh raja dan sultan secara turun-temurun. Pemerintah Hindia Belanda hendak mengurangi hak maupun status secara langsung, dengan membentuk sebuah dewan pemerintah yang disebut Zelfbestuur Commisi yang beranggotakan enam orang termasuk di dalamnya Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin (cucu Sultan Muhammad Sirajuddin) yang melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari.

Sejak saat itu, tampak pemerintah Kesultanan Dompu di bawah pemerintah langsung Hindia Belanda yang di kuasai oleh Vander Plass dan dibantu oleh dua Jeneli yaitu Jeneli Dompu dan Jeneli Kempo.¹⁸ Setelah

¹⁸ El-Hayyat Ong, *op.cit.*, hal.17.

kedatangan Jepang, atas permintaan Bima Jepang memasukkan Dompu ke dalam wilayah Kesultanan Bima. Hal ini diperkuat dengan perjanjian antara pemerintah Dai Nippon dengan Kerajaan Bima tanggal 11 Mei 1942 yang menetapkan bahwa Kerajaan Dompu masuk ke dalam wilayah Kerajaan Bima.¹⁹

Setelah Jepang pergi, bersama-sama dengan Bima, Sumbawa dan Dompu masuk ke Negara Indonesia Timur (NIT). Sebelumnya pada tahun 1939 untuk mengatasi kevakuman karena tidak adanya sultan dengan keputusan komisi gabungan, tanggal 14 April 1939 Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin ditetapkan dan disahkan menjadi penguasa dengan gelar calon Sultan Dompu. Kemudian setelah Kesultanan Dompu dihidupkan kembali (dipisahkan dari kerajaan Bima) saat Negara Indonesia Timur (NIT) Sultan Muhammad Tajul Sirajuddin dilantik menjadi sultan terakhir Dompu pada tanggal 12 September 1947. Walaupun Residen Kupang tidak menyetujui hal tersebut, namun rakyat Dompu tetap mengakuinya sebagai sultan terakhir Dompu. Setelah itu Dompu berturut-turut menjadi daerah Swapraja, Daerah swatantra Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II dan terakhir menjadi daerah otonom (kabupaten) sejak berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999.

¹⁹ Mengenai Isi Perjanjian dan tanggapan rakyat Dompu terhadap isi perjanjian tersebut. baca : Manggaukang Raba, Mars Ansory Wijaya, *op.cit.*, hal.. 35.

BAB IV

PEMINDAHAN KERANGKA JENAZAH ALMARHUM SULTAN MUHAMMAD SIRAJUDDIN DARI KUPANG KE DOMPU ¹

4.1 Perencanaan

Dompu sebagai sebuah wilayah Kabupaten, dulunya pernah berstatus sebagai sebuah kerajaan dan berkembang menjadi sebuah Kesultanan setelah agama Islam secara resmi masuk ke wilayah tersebut. Pemerintah Kabupaten Dompu yang sekarang ini berusaha untuk mengembalikan masa kejayaan dan kebesaran tersebut dengan menggali sejarah dan budayanya agar kesinambungan sejarah dan nilai-nilai budaya yang ada tidak putus di tengah jalan. Berbagai upaya telah dijalankan, salah satu diantaranya adalah dengan memboyong kembali kerangka jenazah almarhum Sultan Muhammad Sirajudin atau Sultan Dompu ke-20 yang wafat di Kupang serta dimakamkan di pemakaman muslim Batu Kadera, untuk dimakamkan kembali ke tanah kelahirannya Dompu.

Rencana untuk memboyong kembali jenazah tersebut sebenarnya sudah lama, namun hal itu baru dapat direalisasikan pada tahun 2002 di

¹ Isi dari Bab IV ini disarikan dari tulisan, R.M. Agus Suryanto dan Abd. Rahim, yang berjudul : *Proses Pemindahan Kerangka Jenazah Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin Dari Kupang Nusa Tenggara Timur ke Kabupaten Dompu NTB- Januari 2002. (Kembalinya Sultan Muhammad Sirajuddin Ke Bumi Nggahi Rawi Pahu)*. (Dompu : Pemkab Dompu, 2003).

bawah kepemimpinan Bupati Dompu H. Abu Bakar Ahmad, S.H. Pemindahan kerangka jenazah Sultan Dompu tersebut bertujuan untuk membuktikan kepada generasi yang sekarang maupun yang akan datang bahwa Kesultanan Dompu itu telah lama berdiri dan ada serta dikenal sejak jaman Majapahit. Oleh sebab itu maka Makam Sultan Muhammad Sirajuddin itu ditempatkan di dalam kompleks pemakaman keluarga raja-raja Dompu di sekitar Masjid Baiturahman Dompu. Lokasi tersebut dahulu merupakan bekas pusat pemerintahan atau Istana Kesultanan Dompu.

Berbagai rencana dan usaha untuk mengembalikan kerangka jenazah Almarhum Sultan Dompu tersebut terus berjalan dan semakin diintensifkan oleh Pemerintah Kabupaten Dompu. Setelah melalui berbagai perencanaan, koordinasi dan konsultasi dengan keluarga almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin baik yang ada di Dompu, Bima maupun Jakarta serta beberapa tokoh masyarakat Dompu lainnya. Akhirnya DPRD Dompu mengeluarkan Surat Keputusan Dewan No. 01 Januari 2002 tentang Persetujuan Pemindahan Kerangka Jenazah Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin dari Kupang Nusa Tenggara Timur ke Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat. Selain itu juga dibuatkan usulan kepada pemerintah pusat agar Beliau diangkat menjadi Pahlawan Nasional.

Perjalanan rombongan dari Dompu ke Kupang dibagi dalam dua Tim. Rombongan Tim I berangkat dibawah pimpinan Asisten I Tatapraja Setda Dompu Drs. Sudirman A. Madjid bersama Drs. Syafrin A. Mansyur (mewakili

keluarga Almarhum Sultan), A. Madjid, MT. (mewakili DPRD Dompu) serta Badaruddin H. Mahmud dari bagian Humas Pemkab Dompu. Tugas Tim I ini adalah melakukan lobi dengan Pemerintah Kota Kupang dan Pemda Tk. I Nusa Tenggara Timur serta mengurus masalah administrasi proses penggalan kerangka jenazah di makam muslim Batu Kadera, Kupang.

Tim II yang menyusul Tim I, dipimpin langsung oleh Bupati Dompu H. Abubakar Ahmad, S.H., didampingi sebagian jajaran Muspida Dompu dan unsur dari keluarga lainnya, yaitu :

1. Ketua DPRD Dompu : Drs. H. Farouk Abdurrahim
2. Dandim 1614 : Letkol. Inf. Agus Nedi Zaini. S.Sos
3. Kapolres Dompu : AKBP. Drs. Revianto, S.H.
4. MUI Kabupaten Dompu : K.H. Salman Farid, BA
5. Ketua Komisi E DPRD Dompu : H. Yusuf Jamaluddin, BA
6. Anggota DPRD Dompu : Drs. H. M. Ali Muhammad, S.Ag
7. Keluarga Sultan : M. Rifa'l
8. Humas Setda : Abdurrahim Usman, BA
9. Ajudan Bupati : Andy Amir
10. Wartawan NTB Post : R. Muhammad Agus Suryanto.

4.2 Pelaksanaan

4.2.1 Keberangkatan ke Kupang

Pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2002, Tim II yang dipimpin langsung oleh Bupati Dompu H. Abu Bakar Ahmad, S.H, berangkat ke Kupang melalui pelabuhan Bima dengan menumpang Kapal Ferry Cepat (KCF Barito). Berangkat dari Bima pukul 02.00 Wita dan tiba di pelabuhan Kupang sekitar pukul 18.00 Wita. Setibanya di pelabuhan Tenau, rombongan ini dijemput oleh Tim I yang tiba di Kupang lebih dahulu dan pihak Pemerintah Kota Kupang yang diwakili oleh Asisten Tatapraja Kota Kupang Drs. H.M. Kasim. Rombongan selanjutnya menuju Hotel Flobamor II, di Hotel inilah segala sesuatu persiapan dan kegiatan Penggalian dan Pemindahan kerangka Jenazah Sultan Muhammad Sirajuddin dipisahkan.

Pada hari Jum'at tanggal 18 Januari 2002, rombongan Bupati Dompu bersilaturahmi dengan Walikota Kupang Kol. Inf. (Purn) Samuel Kristian Leric yang didampingi oleh Ketua DPRD Kupang Melly Jakub, S.H, serta beberapa pejabat Muspida Kota Kupang lainnya. Selain bersilaturahmi kunjungan tersebut sekaligus membahas rencana penggalian makam Sultan. Pada dasarnya Pemerintah Kupang tidak keberatan atas rencana tersebut, namun secara jujur sebenarnya sangat berat untuk melepas almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin yang hampir sekitar 65 tahun bersemayam di Bumi Cendana Kupang. Seperti apa yang dikatakan oleh Walikota Kupang Samuel Kristian Leric yang sekaligus mewakili pemerintah dan masyarakat Kupang : *"Terus terang, sebenarnya kami pemerintah Kupang dan seluruh masyarakat Kupang yang ada sangat berat untuk melepas Sultan Muhammad Sirajuddin*

ke kampung halamannya di kota Dompus. Namun, barangkali itulah yang terbaik karena almarhum tuanku Sultan akan lebih tenang jika kembali bersanding bersama keluarga dan masyarakat Dompus”.

Rombongan kemudian melanjutkan silaturahmi ke Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur dengan didampingi oleh Walikota Kupang. Sesampainya di Kantor Gubernur, rombongan diterima oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Piet Alexander Tallo serta disambut dengan upacara pengalungan selendang khas Nusa Tenggara Timur kepada Bupati Dompus dan Rombongan. Hal tersebut juga dilakukan ketika penyambutan di Kantor Walikota Kupang, acara ini merupakan suatu adat untuk penyambutan tamu sekaligus pemberian cinderamata dari pemerintah dan rakyat Kupang.

Pada acara silaturahmi dengan Gubernur tersebut, Pemerintah Nusa Tenggara Timur pada umumnya dan pemerintah Kupang pada khususnya sangat mendukung rencana Pemerintah Kabupaten Dompus untuk memboyong kembali kerangka jenazah Sultan Muhammad Sirajuddin ke Kabupaten Dompus. Menurut Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang pada jaman pemerintahan Hindia Belanda merupakan salah satu kota yang tempat pembuangan atau pengasingan para Raja, Sultan atau tokoh pejuang lainnya yang ada di wilayah nusantara. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya Sultan atau Raja yang diasingkan di Kupang oleh Belanda setelah wafat lalu dimakamkan di kompleks pemakaman muslim Batu Kadera yang berada di kelurahan Air Mata kecamatan Kupang. Selain Sultan Muhammad

Sirajuddin dari Dompu, dimakamkan pula antara lain Sultan Badaruddin dari Sumatera, Seorang pengikut atau salah satu Panglima Perang Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta, Sultan Pontianak Kalimantan Habib Syarif Abdurrahman Abubakar Algadrie yang wafat pada tahun 1899.

Usai acara pertemuan dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur, rombongan kembali sejenak ke Hotel Flobamor II. Kemudian Rombongan Bupati Dompu bersama masyarakat muslim kelurahan Air Mata melakukan sholat Jum'at di Masjid Baitul Qodim. Usai sholat Jum'at Bupati dan rombongan melakukan silaturahmi dan ramah tamah dengan tokoh muslim Kupang dan warga Bima-Dompu yang tinggal di kota Kupang.

Masjid Baitul Qodim yang terletak di jalan Tri Kora kelurahan Air Mata Kupang, menurut berbagai sumber dulunya merupakan tempat almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin melakukan sholat dan mengajar mengaji terhadap warga muslim yang ada disekitarnya. Masjid Baitul Qodim ini pernah direnovasi oleh Menteri Sosial Republik Indonesia yang pada waktu adalah Ny. Inten Suweno, mempunyai keistimewaan tersendiri bahkan di bilang masih keramat sekali. Pada tahun 90-an, saat terjadi kerusuhan di kota Kupang hanya masjid Baitul Qodim saja yang luput dari sasaran amulkan massa, masjid-masjid lain di kota Kupang banyak yang mengalami kerusakan namun hanya masjid Baitul Qodim saja yang luput dari kerusakan akibat adanya kerusuhan. Beberapa warga kelurahan Air Mata percaya bahwa masjid Baitul Qodim yang dulunya dijadikan tempat sholat dan

mengajar mengaji oleh Sultan Muhammad Sirajuddin ini tergolong masjid yang mempunyai kharisma tersendiri dan sangat disakralkan oleh warga muslim Kupang.

Di sekitar masjid Baitul Qodim atau Jalan Trikora no. 48, tinggal seorang keluarga H. Hasan Toha Mustafa yang masih menyimpan beberapa benda keramat milik almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin. Benda tersebut antara lain berupa tasbih ukuran kecil berwarna hitam yang terbuat dari pohon sawo serta alat pemotong pinang terbuat dari besi, atau dalam bahasa Timor disebut "*cekaraty*". Diceritakan pula bahwa Tuanku Sultan Muhammad Sirajuddin tidak suka merokok melainkan hanya mengunyah daun sirih dicampur dengan buah pinang. Setelah ada kesepakatan dan musyawarah, akhirnya Keluarga H. Hasan Toha Mustafa bertekad akan menyerahkan benda-benda peninggalan Sultan itu kepada pihak pemerintah Dompu melalui Bupati Dompu H. Abubakar Ahmad, SH.

Pada malam harinya Bupati Dompu dan rombongan dijamu makan malam oleh Walikota Kupang beserta jajaran Muspida setempat secara meriah bertempat di restoran Teluk Kupang sekaligus diadakan hiburan malam. Acara tersebut diliput oleh berbagai mess media baik cetak maupun elektronik yang ada di Kupang. Sambutan tersebut bagi Walikota Kupang Kol. Inf. (Purn) Samuel Kristian Lerik bukan hanya sambutan seorang Bupati Dompu, melainkan sambutan seorang teman yang lama tak bertemu, karena dulu mereka sama teman sekolah saat Lemhannas di Jakarta.

4.2.2 Penggalian Makam Sultan Muhammad Sirajuddin

Pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2002, segala sesuatu untuk upacara penggalian makam Sultan telah disiapkan di kompleks pemakaman muslim Batu Kadera oleh pemerintah Kota Kupang. Beberapa warga masyarakat Kupang turut hadir untuk menyaksikan penggalian kembali jenazah Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin yang sudah bersemayam selama 65 tahun di kompleks pemakaman tersebut. Makam yang dipagari dengan pagar besi berwarna biru tua ukuran sekitar 2x2 meter persegi serta ada hiasan keramik berwarna putih saat itu menjadi pusat perhatian warga masyarakat dan seluruh undangan yang ada di tempat tersebut. Karena sesaat lagi makam tua yang sudah puluhan tahun menjadi saksi bisu sejarah anak bangsa dalam pengasingannya demi perjuangan untuk bebas dari belenggu penjajahan dari bumi nusantara ini, akan segera diboyong ke kampung halamannya bersanding dengan kerabat dan keluarga serta masyarakat kabupaten Dompus.

Sebelum penggalian, diawali dengan sholat jenazah di atas pusara makam Sultan dipimpin oleh Wakil Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Dompus KH. Salman Faris, B.A. dan dilanjutkan dengan penggalian secara simbolis oleh Bupati Dompus diikuti oleh para kerabat almarhum Sultan, baru kemudian oleh warga masyarakat Muslim Kupang dan juga dibantu oleh para

warga Bima-Dompu yang tinggal di Kupang. Penggalian ini dipimpin oleh Modin Ahmad Aladin seorang tokoh agama dari Kelurahan Air Mata.

Setelah beberapa waktu penggalian sekitar pukul 13.20 Wita, dengan kedalaman galian sekitar 2,65 meter akhirnya kerangka jenazah Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin ditemukan oleh para penggali yang dipimpin oleh Modin Ahmad Aladin dan anaknya Saleh Alidin. Begitu kerangka jenazah ditemukan dengan spontan warga yang ada di sekitar langsung bertakbir "Allohu Akbar" serta mengumandangkan Sholawat yang tak henti-hentinya. Kejadian tersebut membuat lega para hadirin terutama Bupati Dompu dan Walikota Kupang yang sebelumnya merasa khawatir jika kerangka Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin tidak ditemukan.

Sebelum para penggali menemukan kerangka jenazah Sultan Muhammad Sirajuddin, modin Ahmad Aladin dengan dibantu anaknya Saleh Alidin yang berada di lobang makam menemukan beberapa papan kayu penutup jenazah, sebagian kayu-kayu tersebut masih utuh bahkan kondisinya kelihatan lebih mengeras. Setelah papan tersebut diangkat baru kemudian para penggali menemukan beberapa tulang tubuh jenazah seperti tulang kaki, tulang tangan serta sepihan-serpihan tulang lainnya. Tulang-tulang tersebut sebagian masih utuh, tulang-tulang tersebut sebelum diangkat oleh modin Ahmad Aladin dan anaknya terlebih dahulu dibersihkan baru kemudian diangkat ke atas. Ada suatu kejadian aneh saat modin Ahmad Aladin akan mengangkat tengkorak kepala almarhum Sultan, begitu tengkorak

kepala diangkat, tiba-tiba keluar mata air yang langsung menyembur keluar sehingga sebagian lobang kubur digenangi oleh air tersebut.

Setelah hampir 6 jam proses penggalian, akhirnya kerangka jenazah dapat dikumpulkan dan langsung dikafani yang dipimpin oleh KH. Salman Faris, BA dibantu oleh beberapa tokoh masyarakat setempat. Kerangka jenazah tersebut dikafani layaknya jenazah pada umumnya, selanjutnya dimasukkan ke dalam peti yang terbuat dari kayu jati untuk dilakukan upacara serah terima dari Pemerintah Kota Kupang kepada Pemerintah Kabupaten Dompus.

Setelah kerangka jenazah dimasukkan ke dalam peti selanjutnya ditutup dengan bendera Merah Putih untuk dibawa ke lokasi upacara pemakaman yang jaraknya sekitar 100 meter dari makam. Upacara serah terima jenazah dari pihak Pemerintah Kupang kepada Pemerintah Kabupaten Dompus, masing-masing diwakili oleh Kol. Inf. (Purn) Samuel Kristian Lरिक kepada Bupati Dompus H. Abubakar Ahmad, SH. Sebelumnya dibacakan riwayat hidup singkat Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin oleh Ketua DPRD Dompus Drs. Farouk Abdurahim.

Upacara serah terima selesai, kemudian kerangka jenazah Sultan langsung dibawa menuju Masjid Baitul Qodim dan disambut oleh Lurah Air Mata Hasan Karabi dan warga muslim lainnya. Peti jenazah yang masih ditutup dengan bendera Merah Putih itu langsung dibawa masuk ke masjid untuk disemayamkan selama dua malam, sebelum diboyong ke Kabupaten

Dompu. Selama dua mala itu warga kelurahan Air Mata dan warga muslim lainnya mengadakan doa dan tahlilan bersama untuk arwah Almarhum Sultan. Selama acara berlangsung Masjid Baitul Qodim selalu dipenuhi warga muslim untuk acara tahlilan, bahkan Pemerintah Kota Kupang ikut berperan aktif pula. Bupati Dompu beserta rombongan juga tetap aktif selama dua malam untuk mengisi yasinan dan tahlilan bersama warga masyarakat lainnya. Acara tahlilan tersebut dipimpin langsung oleh Imam Masjid Baitul Qodim yaitu Imam Bawaris, SH.

Di sela-sela menunggu keberangkatan ke Dompu kembali, Bupati Dompu juga menerima kunjungan silaturahmi dengan warga masyarakat Dompu-Bima, bertempat di Aula Hotel Flobamor II Kupanga pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2002. Pada hari Minggu malam Senin, bertempat di Masjid Baitul Qodim Bupati Dompudan rombongan mengadakan silaturahmi sekaligus malam perpisahan bersama warga muslim yang ada di kelurahan Air Mata, karena pada esoknya yakni Senin 21 Januari kerangka jenazah Almarhum akan diberangkatkan menuju Kabupaten Dompu. Pada malam tersebut juga diadakan upacara penyerahan dua benda pusaka yaitu berupa tasbih dan pengiris pinang yang merupakan benda pusaka milik almarhum Sultan secara resmi dari keluarga H. Hasan Toha Mustafa kepada Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Bupati Dompu H. Abubakar Ahmad, SH. Acara tersebut disaksikan oleh warga masyarakat setempat juga dari

pihak Pemerintah Kota Kupang yang diwakili oleh Asisten Tata Praja Drs. HM. Kasim Dahlan.

4.2.3 Membawa Kembali Kerangka Jenazah Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin ke Dompu.

Setelah dua malam disemayamkan di Masjid Baitul Qodim, maka pada hari Senin tanggal 21 Januari 2002 sekitar pukul 08.30 Wita peti kerangka jenazah Almarhum Sultan Dompu dengan diantar oleh warga setempat dan juga pihak Pemerintah Kota Kupang beserta Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang masing-masing diwakili oleh Asisten Tata Praja Drs. HM. Kasim Dahlan serta Sekda Kota Kupang, meninggalkan Kota Kupang menuju pelabuhan Tenau, untuk diberangkatkan kembali ke Dompu.

Suasana tampak haru ketika peti jenazah perlahan-perlahan diangkat oleh warga muslim kampung Air Mata keluar dari Masjid Baitul Qodim, bahkan sebagian warga yang hadir di acara pelepasan tersebut nampak meneteskan air mata, seakan seperti akan kehilangan orang tua yang baru saja ditinggalkan untuk selamanya. Karena Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin sudah dianggap menjadi bagian dari sejarah Bumi Cendana Kupang. Peti Jenazah yang ditutup dengan bendera Merah Putih selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil ambulan, sebelumnya diadakan doa sekaligus

kata-kata pamitan dari pihak Pemerintah Kabupaten Dompu yang diwakili Bupati H. Abubakat Ahmad, SH.

Diiringi dengan gema takbir dan sholawat nabi, perlahan-perlahan rombongan pengantar jenazah meninggalkan kampung Air Mata menuju pelabuhan Tenau. Kampung Air mata telah mengukir dalam lembaran sejarah kehidupan Almarhum Sultan Dompu selama berpuluh-puluh tahun berada dalam rengkuhan Bumi Cendana Kupang, seorang pejuang yang ingin melepaskan diri dari jeratan dan belenggu penjajah.

Dalam kesempatan tersebut pihak pemerintah Kota Kupang mengutus salah seorang pejabatnya untuk mengantar jenazah ke Dompu yaitu Kepala Badab Kota Kupang Dr. Abdul Jalil didampingi oleh dua orang putri Almarhum Abdurrahman M. Amin alias La HB serta wartawati dari Harian Umum NTT Ekspres : Syarifiah, SE. yang mewakili dari media masa. Pada pukul 09.25 Wita Kapal Ferry Cepat (KFC) Serayu jurusan Kupang-Surabaya yang membawa peti Jenazah dan rombongan meninggalkan pelabuhan Tenau Kupang menuju pelabuhan Bima.

Pada saat peti jenazah akan dimasukkan dalam kapal banyak kendala yang dihadapi, karena pihak pengurus kapal cepat Serayu menolak untuk mengangkut peti Jenazah bahkan ada rumor yang berkembang atau semacam kepercayaan di lingkungan ABK maupun para penumpang kapal bahwa tidak baik atau akan ada kendala di tengah perjalanan jika kapal tersebut mengangkut peti jenazah atau orang yang sedang meninggal.

Melihat tersebut Bupati Dompu dibantu Asisten Tata Praja Kota Kupang melakukan negosiasi dengan pihak PT. Pelni dan para pengurus kapal Serayu. Setelah dijelaskan panjang lebar oleh Bupati soal peti jenazah beserta rombongan pihak PT. Pelni dan pengurus Kapal Cepat Serayu bisa memahami dan peti jenazah beserta rombongan dapat berangkat menggunakan Kapal Cepat Serayu jurusan Kupang-Surabaya.

4.2.4 Pemakaman Kembali Kerangka Jenazah Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin

Setelah menempuh perjalanan laut hampir 14 jam lamanya, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2002 sekitar pukul 24.30 Wita, Bupati dan rombongan yang membawa kerangka jenazah Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin akhirnya tiba di pelabuhan Bima. Kedatangan tersebut disambut secara resmi oleh Bupati Bima Drs. H. Zainul Arifin, Ketua DPRD Bima beserta keluarga besar Kesultanan Bima beserta seluruh jajaran dinas instansi Kabupaten Bima dan Dompu.

Perlahan-lahan peti jenazah almarhum yang ditutup dengan bendera Merah Putih dikeluarkan dari kapal oleh beberapa orang anggota Satpol P.P. Pemkab. Dompu menuju lokasi penyambutan di pelataran halaman pelabuhan Bima sebelum menuju ke Dompu dengan mobil ambulance, setelah beberapa saat beramah-tamah dengan jajaran Muspida Bima serta keluarga besar Kesultanan Bima, puluhan mobil dinas dan pengawal peti jenazah

meninggalkan Bima menuju Dompu dan dikawal oleh pasukan dari Polres Dompu, warga masyarakat menyaksikan dengan perhatian penuh sepanjang pinggir jalan antara Bima-Dompu.

Sekitar pukul 02.45 Wita dinihari, rombongan pengawal peti jenazah Almarhum tiba dengan selamat di Pendopo Kabupaten Dompu untuk disemayamkan di kompleks Masjid Agung Baiturrahman Dompu. Beberapa pejabat Muspida beserta jajarannya, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, tokoh pemuda dan ratusan warga masyarakat Dompu sudah menunggu kedatangan peti jenazah sambil mengadakan doa dan tahlilan di aula pendopo kabuapten yang dipimpin oleh Ustadz Abdarab.

Sebagian anggota kerabat dan keluarga Kesultanan Dompu hadir di Aula Pendopo untuk menyambut kedatangan almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin kembali ke Dompu untuk berkumpul bersama keluarga dan rakyatnya setelah berpuluh-puluh tahun meninggalkan Dompu menuju kota pengasingan Kupang Nusa Tenggara Timur. Tampak hadir para mantan Bupati Dompu yaitu : Drs. Hidayat Ali, Drs. HM. Yakub MT. dua mantan bupati yang sekaligus masih keluarga besar Sultan Muhammad Sirajuddin. Disamping kedua tokoh tersebut hadir pula Istri Almarhum Sultan Dompu terakhir Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin Hj. St. Hadijah MT. Sirajuddin, Abdul Azis Sirajuddin alias Dae Kupa yang datang dari Jakarta. Dae Kupa adalah putra tertua dari Abdullah Sirajuddin (Ruma Goa) atau cucu dari

almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin, serta didampingi oleh keluarga besar Kesultanan Dompu lainnya.

Pada pagi harinya, Selasa tanggal 22 Januari 2002 sekitar pukul 08.15 Wita peti jenazah Almarhum diberangkatkan menuju pemakaman dari pendopo Kabupaten Dompu. Sebelumnya diadakan prosesi upacara penyerahan peti jenazah dari pihak keluarga yang diwakili oleh Ir. Syaiful Islam kepada Bupati Dompu H. Abubakar Ahmad, SH. untuk dimakam secara militer oleh Pemerintah Kabupaten Dompu.

Usai acara penyerahan peti jenazah Almarhum Sultan Dompu yang ke-20 itu langsung diboyong ke kompleks pemakaman. Peti jenazah yang ditutup dengan bendera Merah Putih dan diusung oleh beberapa anggota Polres Dompu dan anggota Kodim 1614 Dompu itu perlahan-lahan meninggalkan pendopo sambil diiringi gema takbir dan shalawat nabi. Ribuan masyarakat Dompu pada saat itu berdatangan untuk menyaksikan prosesi pemakaman kembali kerangka jenazah Sultan Muhammad Sirajuddin. Jalan antara pendopo dengan kompleks Masjid Baiturrahman sekitar 3 km dipenuhi oleh warga masyarakat yang datang dari berbagai pelosok wilayah Dompu untuk melihat secara langsung prosesi pemakaman tersebut. Hampir seluruh pelajar dari tingkat Taman Kanak-Kanak sampai SMTA dengan menggunakan pakaian seragam mereka tampak ikut menyaksikan dan menyambut upacara Pemakaman kembali Sultan Muhammad Sirajuddin. Puluhan spanduk yang bertuliskan "Selamat Datang Sultan Muhammad

Sirajuddin di Bumi Nggahi Rawi Pahu”, tampak terpampang hampir di sepanjang jalan kota maupun yang ada di sudut jalan-jalan kota Dompus.

Foto lukisan Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin yang berukuran sekitar 1 meter dibawa oleh salah seorang anggota Polres Dompus dan berada tepat di depan barisan pembawa peti jenazah. Foto tersebut tampaknya menjadi perhatian khusus bagi warga masyarakat yang selama ini belum mengenal wajah dari almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin. Lukisan Foto hitam putih dimana posisi Almarhum dalam lukisan foto itu menghadap ke samping seperti dalam foto aslinya dengan pakaian kebesaran Sultan ditambah kumis almarhum yang sangat tebal berwarna putih tampak menyisakan kegagahan dan kewibawaan dari Almarhum semasa hidupnya.

Upacara militer pemakaman kembali Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin di kompleks pemakaman Kesultanan Dompus di Masjid Agung Baiturahman Dompus berlangsung sekitar 3 jam lebih. Upacara tersebut dihadiri pula oleh Bupati Bima Drs. H. Zainul Arifin beserta anggota dan pimpinan Muspida Bima, Ketua DPRD Kabupaten Bima beserta para kerabat Kesultanan Bima. Tampak pula kakak kandung dari Almarhum Abdul Kahir (Sultan Bima terakhir) yaitu Hj. St. Maryam R. Salahudin atau yang dikenal dengan panggilan Uma Ka’u Mary yang didampingi oleh Hj. St. Hadijah MT. Sirajuddin (Istri dari Almarhum Sultan Dompus terakhir Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin) Kedua tokoh sepuh tersebut duduk tafakur persis berada di

pinggir makam sambil mengikuti dengan hikmat setiap prosesi acara pemakaman kembali Sultan Dompu tersebut.

Upacara secara militer pemakaman kembali Sultan Dompu tersebut dipimpin oleh Inspektur Upacara Bupati Dompu H. Abubakar Ahmad, SH., serta Komandan Upacara Lettu Inf. Syahrudin, seorang Perwira dari Kodim 1614 Dompu. Bupati dalam sambutannya mengatakan bahwa pemindahan makam almarhum Sultan Dompu dari Kupang ke Dompu, bukan semacam mengorbankan perasaan para keluarga dan mereka yang merasa memiliki kedekatan batin dengan almarhum di Kupang, juga bukan demi kebanggaan kalangan keluarga yang ada di Dompu termasuk popularitas siapapun. Hal ini semata-mata sebagai ungkapan rasa hormat yang tinggi serta bangga masyarakat Dompu terhadap para leluhurnya. Bagi Pemerintah Kabupaten Dompu pemindahan kerangka jenazah almarhum ini juga sangat berarti dan bermakna demi kepentingan sejarah pemerintahan bahkan untuk menjadi salah satu acuan motivasi moral untuk membangun Dompu ke depan dengan lebih bersemangat dan bersatu padu. Sedangkan sambutan dari pihak keluarga Almarhum, diwakili oleh Abdul Aziz Sirajuddin alias Dae Kupang.

Dengan diiringi dengan suara adzan yang dikumandangkan dari Masjid Baiturrahman serta diiringi pula oleh suara tembakan salvo oleh pasukan dari Kodim 1614 Dompu, perlahan-lahan peti jenazah almarhum Sultan diturunkan ke liang lahat sebagai tempat peristirahatan yang terakhir untuk menempuh perjalanan panjang menghadap Sang Illahi. Almarhum

Sultan Muhammad Sirajuddin akhirnya dapat kembali berkumpul dengan sanak keluarganya serta rakyat Dompu yang dicintainya setelah hampir 65 tahun bersemayam di Bumi Cendana Kupang Nusa Tenggara Timur. Sang Sultan akhirnya kini telah kembali ke Bumi Dompu atau Bumi Nggahi Rawi Pahu. Walaupun hanya jasad yang kembali namun roh dan jiwa Almarhum Sultan tetap hadir dan menyatu dengan rakyat Dompu yang dicintainya hingga akhir hayatnya. Pukul 11.00 Wita upacara secara Militer pemakaman kembali almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin berakhir dengan aman, tertib dan lancar.

Kini almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin telah bersemayam di negeri dimana Beliau dilahirkan, dibesarkan dan negeri leluhur yang pernah ditinggalkan berjuang untuk negeri dan rakyatnya. Lokasi makam terletak di sebelah kanan masjid Agung Baiturrahman Dompu, dengan luas tanah dan bangunan makam 4 x 5 m. Ketinggian bangunan makam sekitar 4,5 m. Arsiteknya dirancang oleh putra-putra Dompu, dimana bangunan yang berfungsi sebagai pelindung dibuat dari kayu-kayu yang diberi pagar besi dengan paduan tembok semen berwarna putih keperak-perakan. Pada sisi Timur tembok terpampang papan nama makam almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin. Lantai makam dan bangunan nisan dibuat dari keramik putih. Tiang penyangga bangunan makam ada 6 buah tiang yang terdiri dari kayu pilihan berwarna coklat tua setinggi 2,5 meter. Pada bagian

atapnya yang bersusun menggunakan genteng super berwarna coklat kemerah-merahan.

Pada bagian bangunan nisan tepatnya di sebelah utara dipasang sebuah prasasti yang terbuat dari keramik berwarna hitam keabu-abuan dan ditulis Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin, lahir di Dompu pada tahun 1848, Wafat di Kupang Tahun 1937 dan dimakamkan kembali di Dompu tanggal 22 Januari 2002. Tulisan yang dipahat di atas batu marmer berwarna kuning emas tersebut, pada bagian bawahnya juga dibubuhi tanda tangan Bupati Dompu H. Abubakar Ahmad, SH.

Pada bagian kiri atas prasasti yang berfungsi menopang lempengan prasasti itu terdapat sebuah lempeng batu cadas alam berwarna putih kekuning-kuningan yang bentuknya mirip dengan bentuk kubah masjid dengan berat sekitar 500 kg. Lempengan batu cadas alam yang menghiasi makam sultan tersebut berukuran kurang lebih 120 x 90 cm. Menurut pimpinan pelaksana pekerjaan pembangunan makam, Drs. Satria Irawan, batu cadas alam tersebut diambil dari gunung atau bukit yang terdapat di desa Lepadi Kecamatan Dompu. Lokasi bangunan makam tersebut sangat strategis, hanya 4 m dari jalan raya, disamping Masjid Agung Baiturrahman Dompu.

Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan makam tersebut selama 12 hari, sejak tanggal 10 sampai 22 Maret 2002, bertepatan dengan kegiatan Seleksi Tilawtil Qur'an Tingkat Propinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten

Dompu. Dana berasal dari Subdin Kebudayaan Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Dompu, melalui anggaran rutin APBD II Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2002. Pengunjung yang akan masuk ke makam Sultan, terlebih dahulu harus masuk melalui pintu utama kompleks pemakaman keluarga kesultanan Dompu yang terletak di bagian utara.

Untuk mengenang jasa dan proses pemindahan Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin, Pemerintah Kabupaten Dompu dan masyarakat Dompu tepatnya pada tanggal 22 Januari setiap tahunnya melaksanakan Sultan. Acara Haul tersebut diisi dengan kegiatan Yassinan tingkat Kabupaten yang dipusatkan di Masjid Agung Baiturrahman dan seluruh Masjid yang ada di wilayah Kabupaten Dompu. Karena bagi masyarakat Dompu nama almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin tentu sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan, bahkan nama besa Almarhum dikenal di beberapa kerajaan saat itu. Lebih-lebih lagi di Kupang keberadaan Beliau sangat dihormati dan diagung-agungkan sehingga makamnya atau kuburannya dianggap sebagai tempat yang keramat serta banyak dikunjungi (Ziarah) oleh warga masyarakat setempat yang tidak saja kaum muslim, akan tetapi umat Kristianipun mendatangi makam tersebut.

4.3 Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional

Setelah prosesi pemindahan kerangka jenazah Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin dari Kupang ke Dompu, maka Pemerintah Kabupaten

Dompu melalui surat No. 469.2/004/PEM tertanggal 25 Januari 2002. Mengirim surat Usul untuk memperoleh Tanda Penghargaan sebagai Pahlawan Nasional bagi Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin, surat ditujukan kepada Menko Kesra, Menteri Sosial, Menteri Dalam Negeri, Menpan dan Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta. Gubernur Nusa Tenggara Barat juga telah memberi Surat Rekomendasi dengan Nomor. 2994/II.4/KESOSPP, tentang Pengakuan Sebagai Calon Pahlawan Nasional atas Nama Sultan Muhammad Sirajuddin. Hal tersebut memang tepat apabila Sultan Muhammad Sirajuddin disetujui untuk diangkat sebagai Pahlawan Nasional, karena atas perjuangan seperti yang diungkapkan oleh para ahli waris Almarhum berdasarkan bukti dokumen, cerita dari para ayah ahli waris yang turut diasingkan ke Kupang, perjuangan almarhum antara lain :

1. Menentang atas paksaan kerja rodi pada rakyat Dompu, karena sebagaimana diketahui rakyat Dompu sumber kehidupannya adalah kerja di sawah/pertanian.
2. Menentang Permintaan paksa memungut pajak kepala, untuk menjadi upeti kepada pemerintah Hindia Belanda melalui Asisten Residen di Raba/Bima.
3. Menentang pelaksanaan kontrak panjang yang telah dibuat/ditandatangani oleh Sultan Abdullah (Ayahanda Sultan Muhammad Sirajuddin) yang bertentangan dengan kemaslahatan rakyat Dompu, yang pada akhirnya Almarhum Sultan Muhammad

Sirajuddin tak pernah menandatangani dari kontrak panjang pada tahun 1905.

4. Menentang permintaan Pemerintah Hindia Belanda untuk menyerahkan sebagian wilayah Kesultanan Dompu kepada HPB Controlir Belanda untuk dijadikan Daerah kekuasaannya/pengawasan Pemerintah Hindia Belanda (Gemeente Stad) di Dompu.
5. Menolak tawaran dari pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan sebuah istana yang terbuat dari semen-beton sebagai pengganti istana kayu yang didirikan/dibangun oleh rakyat Dompu.
6. Mengembalikan Bintang Kehormatan Kerajaan Belanda (Willem Orde Van Orange Nassau) yang pernah dihadiahkan oleh Pemerintah Hindia Belanda ketika menduduki tahta Kesultnan Dompu pada tahun 1927 (sudah 30 tahun di atas tahta) kepada Residen Timor di Kupang pada bulan Februari 1934, karena Beliau merasa dirinya telah ditipu oleh Pemerintah Hindia Belanda dengan pengasingan seumur hidup pada tanggal 15 Januari 1934 dengan Besluit/SK. No. 11.

Itulah berbagai pertimbangan yang kiranya bisa mendukung atas usulan pengangkatan Sultan Muhammad Sirajuddin sebagai Pahlawan Nasional, berbagai bukti, fakta telah disampaikan. Mudah-mudahan usulan tersebut bisa terealisasi.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Sebelum terbentuknya suatu kerajaan di Dompu terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang disebut *Nyaka*, *nyaka-nyaka* tersebut kemudian bergabung menjadi kelompok yang lebih besar yang dipimpin seorang kepala suku yang disebut *ncuhi*. Pada sekitar abad ke 11 Masehi, Dompu baru meninggalkan periode jaman *ncuhi* (jaman proto sejarah) dan memasuki jaman sejarah dengan terbentuknya Kerajaan Dompu. Kerajaan Dompu berubah menjadi Kesultanan Dompu setelah adanya pengaruh Agama Islam pada sekitar abad ke 17.

Dompu merupakan salah satu kerajaan / kesultanan yang termasuk Kesultanan Besar “ *State Government* “ yang ada di Pulau Sumbawa selain Kerajaan atau Kesultanan Bima dan Sumbawa. Sedangkan tiga yang lainnya termasuk unit politik kecil atau kerajaan kecil “ *Minimal Government*” yaitu Sanggar, Tambora dan Papekat. Sebelum menjadi sebuah Kesultanan Dompu telah terbentuk sebuah kerajaan yang berdaulat, keberadaannya telah ada sejak tahun 1364.

Sultan Muhammad Sirajuddin dinobatkan sebagai sultan ke-20 pada tahun 1848 M di Kesultanan Dompu menggantikan ayahandanya Sultan Abdullah, beliau seorang sultan yang hidup sederhana, namun juga sangat

taat menjalankan syareat Islam dan anti dengan Belanda. Hal itulah yang dilanjutkan oleh Sultan Muhammad Sirajuddin sebagai pewaris tahta Kesultanan Dompu.

Sultan Muhammad Sirajuddin sampai tiga kali mendapat surat keputusan pengukuhan dari pemerintah Hindia Belanda melalui pengesahan dari Gubernur Jenderal di Batavia (Jakarta) serta melalui Gubernur di Makasar dan Residen Timor yang berkedudukan di Kupang. Surat keputusan tersebut sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 25 Pebruari 1882, pada tanggal 21 Oktober 1886 dan pada tanggal 18 Oktober 1887. Berbagai analisis mengapa Sultan Muhammad Sirajuddin sampai tiga kali dilantik sebagai Sultan Dompu ke-20, semata-mata karena Sultan Muhammad Sirajuddin selalu membangkang terhadap Belanda.

Setelah adanya pengaruh agama Islam di kesultanan, para sultan berusaha menegakkan syareat Agama Islam. Semua kekuatan baru berpedoman pada nilai dan norma agama Islam serta adat yang Islami. Semangat kehidupan dengan roh Agama Islam inilah yang nantinya merupakan salah satu pemicu perlawanan terhadap kekuasaan penjajah, karena mereka dianggapnya orang kafir.

Sultan Muhammad Sirajuddin bahkan lebih keras menentang kerja rodi dan penjualan candu dalam wilayahnya. Walaupun perjanjian panjang (*Lange Contract*) telah ditandatangani, tetapi Sultan merasa tersiksa dengan sikap penjajah yang sangat arogan. Sebagai salah seorang pemimpin yang

sangat perhatian terhadap syareat Islam yang menjadi kewajiban bagi rakyat yang dipimpinnya, Sultan Muhammad Sirajuddin sangat tidak menyetujui ketidak-adilan penjajah yang mewajibkan rakyat kerja paksa (rodi). Sultan harus membayar upeti, sultan harus mengizinkan perdagangan candu (madat) yang tidak sesuai dengan syareat Islam yang telah diterapkan di wilayah Kesultanan Dompu.

Selain hal tersebut di atas, ada beberapa faktor yang menyebabkan Sultan Muhammad Sirajuddin menentang pemerintah Belanda, yaitu :

1. Belanda menjalankan politik yang tidak sesuai dengan syareat Islam yang sangat ketat di wilayah Kesultanan Dompu. Menurut Sultan Muhammad Sirajuddin, politik Belanda akan menghilangkan syareat / budaya Islam.
2. Sultan Muhammad Sirajuddin dipaksa untuk menyerahkan upeti kepada Belanda seperti sultan-sultan sebelumnya, sesuai dengan perjanjian Bongaya tahun 1667 dan politik Dominasi Dependensi.
3. Sultan Muhammad Sirajuddin tidak menyetujui kerja rodi (kerja paksa) bagi rakyatnya, karena rakyat masih menderita sebagai akibat meletusnya Gunung Tambora tahun 1815, sejak jaman pemerintahan ayahandanya Sultan abduhah.
4. Sultan Muhammad Sirajuddin tidak mengizinkan di wilayah kesultanan Dompu beredar perdagangan madat/candu/minuman keras, karena bertentangan dengan ajaran Agama Islam.

Belanda yang telah mulai merasa tidak simpati kepada Sultan Mumammad Sirajuddin karena pembangkangannya terhadap isi perjanjian dalam kontrak panjang dan ditambah pelanggaran yang dilakukan oleh Sultan terhadap keharusan untuk meminta persetujuan atas pengangkatan putra mahkota itu, akhirnya menambah kemarahan Belanda. Keadaan yang semakin tegang di Kesultanan Dompu ini sangat menguntungkan politik memecah belah Belanda, sehingga surat yang dikirim oleh Sultan Muhammad Sirajuddin tidak dibalas bahkan tidak diperhatikan sama sekali. Kesempatan ini bahkan digunakan Belanda untuk mengadu domba antara kedua putra sultan tersebut. Dengan demikian terjadi kekeruhan politik di Kesultanan Dompu. Pertikaian antara kedua putra sultan semakin memuncak pada tahun 1934 yang kemudian Belanda mengumumkan adanya perang saudara dan perebutan kekuasaan di Kesultanan Dompu yang akhirnya menjadikan Belanda memutuskan untuk mengasingkan Sultan Muhammad Sirajuddin beserta kedua putranya ke Kupang.

Di Kupang, Belanda menitipkan Sultan Muhammad Sirajuddin kepada Raja Kupang Nicholas Nisy Noi, setelah dua bulan tinggal di istana, atas inisiatif beliau Sultan Muhammad Sirajuddin kemudian dipindahkan ke Kampung Air Mata dimana mayoritas penduduknya beragama Islam. Di kampung inilah Sultan Muhammad Sirajuddin wafat pada tahun 1937, kemudian beliau dimakamkan di kompleks pemakaman muslim Batu Kadera.

Setelah Sultan Muhammad Sirajuddin dibuang ke Kupang, pemerintah Hindia Belanda hendak mengurangi hak maupun status secara langsung, dengan membentuk sebuah dewan pemerintah yang disebut *Zelfbestuur Commisi* yang beranggotakan enam orang termasuk di dalamnya Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin (cucu Sultan Muhammad Sirajuddin) yang melaksanakan tugas pemerintahan sehari-hari.

Kemudian Kesultanan Dompu pada jaman pendudukan Jepang atas permintaan Bima dihapus dan digabungkan dengan Kesultanan Bima. Dalam lingkungan Kesultanan Bima wilayah Dompu dibagi menjadi dua *kejenelian* yaitu *Jeneli* Dompu dan *Jeneli* Kempo. Sejak saat itu pula Dompu tidak mempunyai kepala pemerintahan seorang Sultan melainkan langsung oleh Belanda melalui *Gezaghebber* yaitu Van Derplas yang dibantu kedua Jeneli tersebut. Penguasaan Belanda terhadap Dompu berakhir pada tahun 1942 dengan mendaratnya Jepang di Sumbawa. Pada masa penjajahan Jepang Kesultanan Dompu tetap berada dalam wilayah Kesultanan Bima, namun kondisi tersebut banyak ditentang rakyat Dompu yang ingin mengembalikan kekuasaan kesultanan. Kedua putra Sultan Muhammad Sirajuddin yaitu Abdul Wahab Sirajuddin dan Abdullah Sirajuddin pada waktu kedatangan Jepang dan berkuasanya Jepang berhasil kembali ke Dompu lewat Makasar (Ujung Pandang). Abdul Wahab Sirajuddin wafat di Dompu sedangkan Abdullah Sirajuddin wafat di Jakarta.

Akhirnya Kesultanan Dompu dihidupkan kembali pada masa Negara Indonesia Timur dengan dilantiknya Sultan Muhammad Tajul Arifin pada tanggal 12 September 1947. Walaupun Residen Kupang tidak menyetujui hal tersebut, namun rakyat Dompu tetap mengakuinya sebagai sultan terakhir Dompu. Setelah itu Dompu berturut-turut menjadi daerah Swapraja, Daerah swatantra Tingkat II, Kabupaten Daerah Tingkat II dan terakhir menjadi daerah otonom (kabupaten) sejak berlakunya UU Nomor 22 tahun 1999.

Oleh pemerintah Kabupaten Dompu, pada tanggal 19 Januari 2002, makam Sultan Muhammad Sirajuddin di Batu Kadera digali untuk diambil kerangka jenasahnya. Kemudian dibawa ke Dompu untuk dimakamkan kembali di tanah kelahirannya pada tanggal 22 Januari 2002 di kompleks pemakaman Mesjid Agung Baiturahman Dompu. Sultan Muhammad Sirajuddin mendapat gelar Sultan Manuru Kupa (Sultan yang wafat di kupang).

5.2. Saran-saran

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan antara lain:

1. Berkat kegigihan perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Sirajuddin menentang pemerintah Belanda pada masa itu dapatlah kiranya pengusulan Sultan Muhammad Sirajuddin sebagai pahlawan nasional untuk dikabulkan.

2. Diharapkan dengan hasil tulisan ini dapat menjadi sumber informasi yang dapat bermanfaat untuk masyarakat dan pemerintah dalam menyusun kebijakan.
3. Dengan adanya tulisan ini kiranya dapat memperkaya pengetahuan sejarah lokal sekaligus akan menambah perbendaharaan khasanah sejarah nasional.
4. Tulisan sejarah mengenai Sultan Muhammad Sirajuddin menentang Belanda ini kiranya dapat dijadikan bahan untuk pembuatan kurikulum muatan lokal di bidang sejarah di wilayah Dompu maupun Nusa Tenggara Barat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Hasan, 1985. *Memikirkan Makna Dompu dalam Mencari Identitasnya, Sebuah Refleksi Hermeneutik*. Yogyakarta: Semesta
- Abdullah Masin, 1982. *Bo: Suatu Catatan Kuno Daerah Bima*. Mataram: Proyek Pengembangan Permuseuman Nusa Tenggara Barat.
- Agus Suryanto dan Abdurahim, 2003. *Proses Pemandangan Kerangka Jenasah Almarhum Sultan Muhammad Sirajuddin dari Kupang ke Kabupaten_Dompu NTB, Januari 2002 (Kembalinya Sultan Muhammad Sirajuddin ke_Bumi Nggahi Rawi, Pahu)*. Dompu: Pemkab Dompu.
- Dami N Toda, 1999. *Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi*. Ende, Flores: Nusa Indah.
- El Hayyat Ong, 2002. *Dompu Kampung Halamanku*. Grobogan : Ummul Quro Press.
- , 2004. *Dompu Tempatku Mengabdikan*. Grobogan : Pustaka Journalista.
- Helius Syamsuddin, "Sumbawa Hubungan Antar Pulau dan Interaksi Suku Bangsa". Makalah Seminar Sejarah Lokal Tahun 1982.
- Helius Syamsudin, 1981. *Perang Ngali dan Perang Sapugara di Pulau Sumbawa Tahun 1908*. Jakarta: Depdikbud

- Henri Chambert – Loir dan Siti Maryam R. Salahuddin, 1999. *Bo' Sangaji Kai, Catatan Kerajaan Bima*. Jakarta: Ecole Francaise d'Extreme-Orient dan Yayasan Obor Indonesia.
- Hilir Ismail, "Pemahaman Kembali Sejarah Bima dan Daerah Lain di Pulau Sumbawa (Suatu Tinjauan Sejarah Lokal). Makalah pada Dialog Kesejarahan dalam Rangka Lawatan Sejarah Sumbawa – Bima di Istana Bima, Juni 2003.
- , 1988. "Peranan Kesultanan Bima dalam Perjalanan Sejarah Nusantara". Naskah belum diterbitkan.
- I Gde Parimartha, 2003. *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1915–1915*. Jakarta : Djambatan
- Khaerul Muslim, 2001. *Taho Ade, Taho Asa, Taho Rawi*. Mataram: Yayasan Suara Alam – Voice Of Nature
- , 2001. *Manusia (Dou) Dompu*. Mataram: Yayasan Suara Alam – Voice Of Nature
- Kuntowidjoyo, 1995. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya.
- Lalu Manca, 1984. *Sumbawa Pada Masa Lalu*. Surabaya : Rinta
- Lalu Wacana, dkk, 1983/1984. *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*. Jakarta : Depdikbud.
- , 1983/1984. *Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme dan Kolonialisme di Nusa Tenggara Barat*. Jakarta: Depdikbud.

- Louis Gotschalk, 1986. *Mengerti Sejarah*. (terjemahan Nugroho Notosusanto). Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Manggaukang Ruba dan Mars Ansory Wijaya, 2002. *Dompu: Dulu, Kini dan Esok (Fakta-fakta Tentang Dompu)*. Dompu: Pemerintah Kabupaten Dompu.
- Moh. Yamin, 2002. "Runtuhnya Kerajaan Sanggar Abad XVIII". Naskah belum diterbitkan.
- Ratsu, 1980. *Perang Sapugara*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sartono Kartodirdjo, 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- , 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Sigmun, MD.,1982. *Sultan Hasanuddin Menentang V.O.C*. Jakarta : Depdikbud
- Siti Maryam R. Salahuddin. "Selintas Sejarah Pulau Sumbawa". Makalah pada Dialog Kesejarahan dalam Rangka Lawatan Sejarah Sumbawa – Bima di Istana Bima, Juni 2003.
- Slamet Mulyono, 1965. *Menuju Puncak Kemegahan (Sejarah Kerajaan Majapahit)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Solihin Salam, 1981. *Sekitar Walisongo*. Kudus: Menara Kudus.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

FOTO - FOTO



Sultan Muhammad Sirajuddin



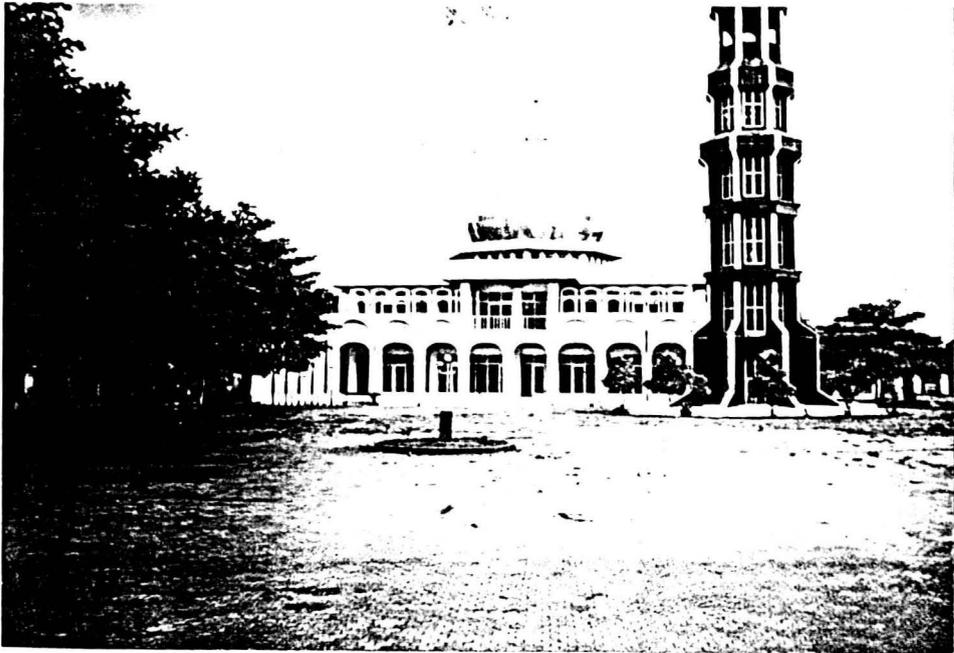
Serah terima Kerangka Jenazah Sultan Dompu dari Pihak Keluarga ke Pemerintah untuk dimakamkan secara militer



Abdullah M.Aim (la HB) dan Istri



Kelompok Sultan dari Wali Kota Kupang
Abubakar Ahmad SH



Masjid Agung Baiturrahman Dompu



Makam Sultan Muhammad Sirajuddin di Dompu





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
(DPRD)
KABUPATEN DOMPU

Jalan Soekarno - Hatta No 17 Telp. (0375) 21520 Dompu.

K E P I T U S A N D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H K A B U P A T E N D O M P U

N O M O R : 01 T A H U N 2002

T E N T A N G

P E R S E T U J U A N P E M I N D A H A N K E R A N G K A J E N A Z A H
A L M A R H U M S U L T A N M U H A M M A D S I R A D J U D D I N
D A R I K U P A N G K E D O M P U
D A N P E N G U S U L A N U N T U K M E N J A D I P A H L A W A N N A S I O N A L

D E W A N P E R W A K I L A N R A K Y A T D A E R A H K A B U P A T E N D O M P U

Membaca

Surat - surat Pernyataan Persetujuan Ahli Waris / Keluarga Almarhum Sultan Muhammad Siredjuddin dan Surat-surat pernyataan masyarakat yang mendukung pemindahan kerangka Jenazah Almarhum Sultan Muhammad Siredjuddin.

Menimbang

- a. Bahwa Almarhum Sultan Muhammad Siredjuddin adalah Tokoh khairinatik yang menjadi panutan masyarakat Dompu.
- b. Bahwa Almarhum Sultan Muhammad Siredjuddin adalah Pejuang yang menentang Penjajah (Belanda) sehingga ditangkap dan diasingkan sampai Wafat dan dimakamkan di Kupang - NTT;
- c. Bahwa berdasarkan kesepakatan Pemerintah dan seluruh masyarakat Dompu agar kerangka Jenazah Almarhum Sultan Muhammad Siredjuddin dipindahkan dari Kupang - NTT ke Dompu - NTB;
- d. Bahwa untuk melaksanakan Pemindahan Kerangka Jenazah Almarhum Sultan Muhammad Siredjuddin dari Kupang ke Dompu maka Dewan memandang perlu untuk memberkahi Persetujuan.

- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Dompu tentang persetujuan Pemindahan Kerangka Jenazah Almarhum Sultan Muhammad Siradjuddin dari Kupang ke Dompu dan Pengusulan untuk menjadi Pahlawan Nasional

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang - Undang Nomor : 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Keputusan DPRD Kabupaten Dompu Nomor : 10/KPES/DPRD/1999 tanggal 6 Desember 1999 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Dompu ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor : 25 Tahun 2001 Tentang APBD II Kab. Dompu Tahun 2001.

Memperhatikan

1. Surat Bupati Dompu tanggal 11 Januari 2002 Nomor : 188 / 61 / Kum. Perihal Pemindahan Kerangka Jenazah Almarhum Sultan Muhammad Siradjuddin dari Kupang ke Dompu .
2. Surat Pemerintah Propinsi NTB tanggal 12 Januari 2002 Nomor : 370 / 10 / PEM / Perihal : Pemindahan kerangka jenazah Almarhum Sultan Dompu
3. Kesimpulan yang diambil dalam Rapat Pleno DPRD Kabupaten Dompu tanggal 15 Januari 2002 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Dewan mencatat dan menghargai nilai - nilai positif kepemimpinan Sultan Dompu Almarhum Sultan Muhammad Siradjuddin yang senantiasa didasarkan atas Musyawarah Mufakat dan nilai - nilai kepahlawanan menentang Penjajah Belanda selama pemerintahannya di Kerajaan Dompu

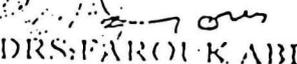
- KE DUA : Menyetujui Beaandahar (Kerangka Jengrah Almarhum Sultan Muhammad Siradjuddin dari Kupang ke Dompu).
- KE TIGA : Pemerintah Kabupaten Dompu supaya memperjuangkan Almarhum Sultan Muhammad Siradjuddin untuk menjadi Pahlawan Nasional.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada APBD II Kabupaten Dompu Tahun 2001.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : D o m p u .
 Pada Tanggal : 15 Januari 2002.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DOMPU
 K E T U A ,

WAKIL KETUA

 M. NURSALAM


 DR. FAROUK ABD RAHIM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Dompu di - Dompu;

Penyusunan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Presiden RI di - Jakarta.
2. Ketua DPR - RI di - Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri RI di - Jakarta.
4. Menteri Sosial RI di - Jakarta.
5. Gubernur Nusa Tenggara Barat di - Mataram.
6. Gubernur Nusa Tenggara Timur di - Kupang.
7. Ketua DPRD Propinsi NTB di - Mataram.
8. Ketua DPRD Propinsi NTT di - Kupang.
9. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Wanita Propinsi NTB di - Mataram.
10. Walikota Kupang di - Kupang.
11. Ketua DPRD Kota Kupang di - Kupang.
12. Dandim 1614 Dompu di - Dompu.
13. Kapolres Dompu di - Dompu.
14. Kepala Kejaksaan Negeri Dompu di - Dompu.
15. Ketua Pengadilan Negeri Dompu di - Dompu.
16. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu di - Dompu.
17. Para Ahli Waris / Keluarga Alm Sultan Muhammad Siradjuddin.



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

REKOMENDASI

Nomor : 2994 / II.4/KESOSPP.

TENTANG :
PENGAKUAN SEBAGAI CALON PAHLAWAN NASIONAL
ATAS NAMA SULTAN MUHAMMAD SIRAJUDDIN

Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram, setelah membaca surat Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 2968/II.4/KESOS.PP tanggal 9 Oktober 2002, dengan ini mendukung dan memberikan Rekomendasi kepada :

- Alrn. Sultan Muhammad Sirajuddin.

Untuk di usulkan sebagai calon Pahlawan Nasional, atas jasa-jasanya dalam perjuangan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia sesuai dengan maksud surat Edaran Direktur Jenderal Bina Kesejahteraan Sosial, Departemen Sosial RI nomor: 137/DIR/IV/BKS/V/1999 tentang persyaratan/kriteria, prosedur dan mekanisme pengusulan Gelar Pahlawan Nasional.

Demikian untuk maklum dan dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram 10 Oktober 2002

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,



[Signature]
DRS. H. HARUN AL RASYID, MSi



BUPATI DOMPU

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 460 / 163 / 464.1

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ABUBAKAR AHMAD
Jabatan : Bupati Dompu
Alamat : Jalan Beringin Nomor 1 Dompu

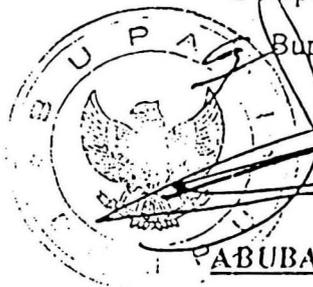
Dengan ini menyatakan bahwa sangat mendukung Pengajuan permohonan dari Keluarga Almarhum SULTAN MUHAMMAD SIRAJUDDIN untuk memperoleh Gelar Pahlawan Nasional / Perintis Kemerdekaan.

Berdasarkan hasil kajian kami tentang Riwayat Hidup dan Riwayat Perjuangan SULTAN MUIHAMMAD SIRAJUDDIN baik sebelum Kemerdekaan maupun pada masa Perjuangan Rakyat merebut Kemerdekaan betul-betul sangat berjasa.

Demikian rekomendasi ini kami buat untuk menjadi bahan pertimbangan.

Dompu, 24 Mei 2002

Bupati Dompu,



ABUBAKAR AHMAD

THU, 13 JUN 02 8:28

WARTEL UNTERMAN

LI 58670029

Koepang, 12 September 1947

Residen Timor dan Daerah Kekuasaannya.

Memperhatikan keadaan pemerintahan terakhir dari Sultan Dompu Mochammad Siradjuddin yang berdasarkan keputusan dari Yang Mulia Gubernur Jendral pada tanggal 15 Januari 1934 No. 11 telah dilaksanakan dan pada tanggal 14 february 1937 yang bersangkutan telah meninggal dunia di Koepang, sedangkan putera-puteranya Abdul Wahab dan Abdoellah masih dalam pengasingan seumur hidup diluar pulau Sumbawa. Bahwa pada saat itu Swapraja Dompu terdapat Komisi Pemerintahan Gabungan.

Bahwa Moehammad Tadjul Arifin Siradjuddin adalah cucu lelaki dari Moehammad Siradjuddin yang meninggal dunia dalam pengasingan. Berdasarkan keputusan Komisi Pemerintahan Cabanguan pada tanggal 14 April 1939 No. 27, yang bersangkutan ditetapkan sebagai penguasa di Dompu dengan gelar Calon Sultan Dompu. Setelah memperhatikan pasal 5 dalam ketentuan perjanjian-politik antara Pemerintah Hindia Belanda dengan Kesultanan Dompu teranggal 31 Desember 1905.

Setelah mendengar Hoekoem-Adat dari Swapraja Dompu, maka saya, Residen, menyetujui keseluruhannya atas pengangkatan Moehammad Tadjul Arifin Siradjuddin sebagai Kepala Pemerintahan Kesultanan Dompu. tambahan pula, setelah membaca surat keputusan dari Yang Mulia Menteri dalam Negeri Negara Indonesia Timur tertanggal 6 Agustus 1947 No. PR. 14/3/20, yang telah menetapkan pengangkatan Kepala Pemerintahan dari bekas Kesultanan yang sebelumnya pernah diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda, terhadap :

Tembusan diperuntukkan kepada :

1. Y.M Letnan Gubernur Djendral
2. Para Komisaris Pemerintahan Umum
3. Komisaris Kerajaan Belanda untuk Indonesia Timur
4. Y.M. Paduka Presiden Negara Indonesia Timur.
5. Y.M. Perdana Menteri Negara Indonesia Timur.
6. Y.M. Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur
7. Assisten Residen Sumbawa
8. Kontrolir Bima
9. Sultan Sumbawa
10. Sultan Bima
11. Pelaksana Pemerintah Kesultanan Doinpu

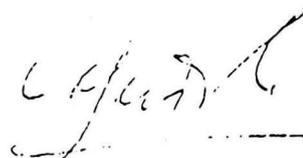
Kepada
Sultan Bima
di Raba-Bima

Tercatat dan didaftarkan
Sekretaris Residen

tdt

J. HEEMSTRA

Terjemahan bebas oleh



(H.A. AZIS SIRADJUDDIN)

KLARIFIKASI RIWAYAT HIDUP

Almarhum Tuanku Sri Sultan Muhammad Sirajuddin yang dibacakan Ketua DPRD II Dompu pada Upacara Pemakaman kembali kerangka pada hari Selasa Tanggal 22 Januari 2002.

- Almarhum Tuanku Sri Sultan Muhammad Sirajuddin dilahirkan di Dompu pada Tahun 1867 Masehi
- Almarhum Tuanku Sri Sultan Muhammad Sirajuddin adalah Putra kedua dari Almarhum Sri Sultan Abdullah (Sultan yang ke 19)
- Almarhum Tuanku Sri Sultan Muhammad Sirajuddin dinobatkan sebagai Sri Sultan Dompu pada tanggal 21 Oktober 1897 sebagai Sri Sultan yang ke 20, dan merupakan Sultan Dompu yang terlama dalam memangku Jabatan Pemerintahan (dari tahun 1897 s/d 1934 selama lebih kurang 37 tahun).
- Almarhum Tuanku Sri Sultan Muhammad Sirajuddin mempunyai 4 (Empat) orang istri yaitu :
 - 1. Komalasari (Tidak mempunyai keturunan)
 - 2. Hafsah (Tidak mempunyai keturunan)
 - 3. Ajizah (Jaju Na'e)
 - 4. Hadijah (Jaju To'I)
- Almarhum Tuanku Sri Sultan Muhammad Sirajuddin dengan istrinya Ajizah (Jaju Na'e) dikaruniai putra dan putri sebagai berikut :
 - 1. St. Fatimah / Uma Tari (Tidak mempunyai keturunan)
 - 2. Abdul Wahab Sirajuddin (Ruma To'I)
 - 3. St. Mariam / Uma Tene
 - 4. Abdullah Sirajuddin (Ruma Gowa)

Putra kedua Sultan Abdul Wahab Sirajuddin menikah dengan St. Misbah (Uma Bau) dikarunia putra-putri sebagai berikut :

1. Muhammad Tajul Arifin Sirajuddin
(MT Sirajuddin / Hawo) Sultan terakhir
melahirkan keturunan Uma Ka' u Khahrul Zaman Cs
2. St. Saleha (Uma luhu)
melahirkan keturunan Syafrin Cs

Selanjutnya Abdul Wahab Sirajuddin menikah lagi dengan Siti Halimah Imo / Uma Amu (Istri kedua) dikaruniai seorang putri yaitu Hafsah.

Kemudian menikah dengan Siti Rukayah (Istri ketiga) dikaruniai seorang putra bernama Muhammad (almarhum) dan istri keempat Abdul Wahab Sirajuddin bernama Rukiyah dikaruniai seorang putri bernama Rusmalia.

Putra ke 4 Almarhum yaitu Abdullah Sirajuddin (Ruma Gowa) menikah dengan St. Hadijah / Lala Doji (Istri pertama) dikaruniai seorang putri yaitu :

- Putri Tangaya (Ina Ka' u Aya) melahirkan keturunan Emi Cs

Istri kedua Abdullah Sirajuddin (Ruma Gowa) yaitu Lala Ica dikaruniai 9 (sembilan) orang putra-putri sebagai berikut :

- Abdul karim Ama Ka' u Kari (meninggal di Kupang)
- H. Azis Sirajuddin (Ama Ka' u Kupang)
- St. Hadijah (Ina Ka' u Doji)
- Rifaid Sirajuddin (Ama Ka' u Faid)
- Asikin Sirajuddin (Ama Ka' u Sikin)
- Sarce (Ina Ka' u Cace)
- Syarifuddin (Ama Ka' u Sari)
- Agus Dahlan (Ama Ka' u Dahlan)
- Hj. Nurlaila (Ina Ka' u Ella)

Putri ketiga yaitu St. Mariam (Uma Tene) menikah dengan Harun Al Rasyid (Uma Reso) dikaruniai putra putri sebagai berikut :

- Abdul Majid melahirkan keturunan Asni Cs
- Jauhar Manikam Uma Mene (Tidak ada keturunan)
- St. Imamah Uma Mami melahirkan keturunan Hidayat Ali Cs (Mantan Bupati Dompu)
- Abdurrahman melahirkan keturunan Rus
- Abdul Mutalid UmaTole melahirkanketurunan Abdullah Cs

Almarhum Tuanku Sri Sultan Muhammad Sirajuddin dengan istrinya yang keempat yakni Hadijah (Jaju To'I) dikaruniai putri yang bernama St. Asiyah yang kemudian melangsungkan pernikahan dengan Sri Sultan Muhammad Salahuddin (Sultan Bima) serta dikarunia putra-putri sebagai berikut :

- Putra H. Abdul Kahir (Ama Ka'u Kahi)
- Putri Hj. St. Maryam SH (Ina Ka'u Mari)
- Putri Emmy (Ina Ka'u Emi)
- Putri Johar (Ina Ka'u Joha)

Demikian klarifikasi urutan keturunan semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Dompu, 22 Januari 2002

KELUARGA BESAR SULTAN MUHAMMAD SIRAJUDDIN

1. KELUARGA ABDUL WAHAB SIRAJUDDIN
2. KELUARGA SITI MARIAM SIRAJUDDIN
3. KELUARGA ABDULLAH SIRAJUDDIN.

Inkomsten met inlandsche vorsten in den Oost-Indischen Archipel.

1. 10 - junyus pengastenting des
Dahat regni Dompou (1015)

DOMPO.

CONTRACT.

Nº. 9.

TRACT onder nadere goedkeuring van den Gouverneur-Generaal van Nederl.-Indië gesloten tusschen Henry de Vogel Mathieu Henrizon, Controleur ter beschikking van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden voor de politieke aanrakingen met de zelfbesturen ten deze handelende voor en namens het Gouvernement van Nederlandsch-Indië, en Moehamad Siradjoedin bestuurder van het landschap Dompou en zijne landsgrootten (radatsleden).

mael het wenschelijk is voorgekomen om de wederzijdsche en verplichtingen tusschen het Nederlandsch-Indisch eement en den bestuurder van het landschap Dompou in de bestaande overeenkomsten in overeenstemming te brengen met de eischen van den tegenwoordigen tijd zoodat den 31sten December 1905 nadere goedkeuring Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië tusschen de Controleur Vogel Mathieu Henrizon, Controleur ter beschikking van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden voor de aanrakingen met de zelfbesturen, ten deze handelende voor en namens het Nederlandsch-Indisch Gouvernement, en den Siradjoedin bestuurder van het landschap Dompou gesloten als volgt.

(31-12-1905)

Artikel een.

De bestuurder en de mantri's van het landschap Dompou erkennen dat dit landschap behoort tot het grondgebied van Nederlandsch-Indië en dat zij mitsdien Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden, vertegenwoordigd door den Gouverneur van Nederlandsch-Indië, als wettige Oppergehoofden erkennen en loven derhalve aan het Gouvernement van Nederlandsch-Indië aan zijne vertegenwoordigers trouw, gehoorzaamheid en overgave.

Artikel twee.

De afgegraneerde gebied van het landschap Dompou wordt begrensd: noordelijk door Sanggar en de Javazee; westelijk door Bima; zuidelijk door Sumbawa en de baai van Saleh en noordelijk door den Indischen Oceaan; het gebied wordt verstaan te zijn samengesteld uit de landen en eilanden welke hieronder zijn omschreven bij de aan dit contract gehechte oorkonde A. De bestuurder en de mantri's verklaren zich onvoorwaardelijk onderwerpen aan de beslissing van het Gouvernement in alle gevallen van grensgeschil met de aangrenzende landen.

Artikel drie.

De afgegraneerde gebied van het landschap Dompou wordt als leen afgestaan aan Moehamad Siradjoedin, Sultan van Dompou onder de uitdrukkelijke voorwaarde van stipte en trouwe nakoming der in dit contract vervatte verplichtingen.

De bestuurder verklaart dit leen op die voorwaarde aanvaardden.

Artikel vier.

De bestuurder van het landschap Dompou noch zijne mantri's zullen het landschap ooit aan eenige andere natie dan de Nederlanders overgeven, noch met eenige andere Mogendheid, noch met eenigen onderdaan van zoodanige Mogendheid eenig verbond of eenige overeenkomst aangaan, of briefwisseling houden, noch geschenken of zendingen ontvangen van of zenden aan zoodanige Mogendheid of zoodanigen onderdaan, noch toelaten dat zulks door of namens hunne kinderen of andere bloedverwanten of door of namens hunne onderdanen plaats vinde.

Artikel vijf.

Aan het Gouvernement van Nederlandsch-Indië blijft het recht voorbehouden om de bestuurder van het landschap Dompou wanneer daartoe redenen bestaan, te ontslaan en na raadpleging der mantri's een vervanger te benoemen.

De landsgrootten (mantri's) worden benoemd en ontslagen door den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden in overleg met den bestuurder en de mantri's.

Ingeval van overlijden van den bestuurder geven de landsgrootten daarvan onverwijld kennis aan den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden en wordt het bestuur des lands voorloopig gevoerd door een of meer landsgrootten door den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden aan te wijzen, in afwachting dat door het Gouvernement een vervanger zal zijn aangesteld.

Artikel zes.

De bestuurder en de mantri's zullen den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden als den vertegenwoordiger van het Gouvernement eerbiedigen en gehoorzamen en mitsdien alleen met hem dan wel met de onder hem dienende ambtenaren in overleg treden, omtrent alle aangelegenheden, de wederzijdsche belangen betreffende.

Artikel zeven.

De Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden en de betrokken plaatselijk besturende ambtenaren hebben het recht alle vergaderingen van het landsbestuur, waarin rechtszaken of belangrijke bestuursaangelegenheden behandeld worden, bij te wonen.

Artikel acht.

De bestuurder en de mantri's verbinden zich vrede en vriendschap te onderhouden met de bestuurders der naburige of van andere tot het grondgebied van Nederlandsch-Indië behoorende landen, en zullen mitsdien zonder voorkennis en toestemming

Gouvernement van Nederlandsch-Indië tegen zoodanige geene vijandelijkheden plegen, noch daartoe uitruis-voorbereidelen maken, noch versterkingen binnen landschap opwerpen.

en zich niet mengen in de aangelegenheden van en van hun land, die daarbuiten mochten gevestigd zich geheel er van onthouden om zich in eenige ische aangelegenheid van een ander landschap te singen die met voorkennis van het Gouvernement t landschap mochten bestaan of nader opgericht zullen op eerste aanzegging van dat Gouvernement worden.

Artikel negen.

bestuurder en de mantri's van het landschap Dompo hunne onderdanen zullen zoo te land als ter zee de ische vlag voeren en niet toelaten dat in plaats van evens deze eene andere gevoerd wordt.

den bestuurder echter toegelaten om persoonlijk zijn of herkenningsslag gelijktijdig met, doch onder de ische te voeren.

Artikel tien.

el Gouvernement blijft het recht voorbehouden om, lig of noodig oordeelende, te allen tijde een of meeri die of Inlandsche ambtenaren en het noodig overige over het landschap aan te stellen.

Artikel elf.

het Gouvernement op welke plaats ook in het land- het vervolg mocht wenschen bezetting te leggen, gen op te werpen of etablissementen op te richten, bestuurder en de mantri's niet alleen zulks toestaan, k daartoe tegen billijke betaling en vergoeding voor daartuit voort te vloeien derving van inkomsten, alle e hulp en bijstand verleenen, terwijl zij voor elk van e bezettingen, versterkingen of etablissementen koste- beschikking van het Gouvernement zullen stellen zooveel e noodig zal blijken, ter plaatse naar de keuze van het ment, behoudens billijke schadeloosstelling aan recht- an.

Artikel twaalf.

bestuurder en de mantri's zullen met rechtvaardigheid het welzijn des volks bevorderen en alle hun door de woordigers van het Gouvernement dienaangaande ver- raadgevingen opvolgen.

ten geen concessies verleenen of andere overeenkomsten t strikt privaten aardsluiten zonder voorafgaande iing van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorig- diens vertegenwoordiger.

het landschap thuis behoorende schepen moeten voor- van een door den bestuurder uit te reiken zeebrief ene jaarpus, opgemaakt volgens de betrekkelijke voor- welke stukken echter niet zullen worden uitgereikt overeenstemming met den Gouverneur van Celebes en origheden of diens vertegenwoordiger, die ze daartoe derteekenen zal.

Artikel dertien.

bestuurder en de mantri's verbinden zich om aan Euro- en andere Oostersche of Westersche vreemdelingen gronden af te staan en hunne toelating of vestiging le havens van dat landschap niet te vergunnen, zonder nis en vooral verkregen toestemming van den naastbij ten gezagvoerenden Nederlandschen ambtenaar.

elaren echter zullen in de havens van dat landschap

ernementsonderaanen zijn als zoodanig onderwerpen

worden toegelaten en aldaar verblijf mogen houden zonder die voorkennis en toestemming, zoolang zij de orde en rust niet verstoren; zullende van hun meer dan drie maanden voortgezet verblijf in die havens door den bestuurder en de mantri's kennis mochten worden gegeven aan den naastbij geplaatsten gezag-voerenden Nederlandschen ambtenaar.

Het Gouvernement van Nederlandsch-Indië behoudt zich de bevoegdheid voor, om ten aanzien van de toelating en vestiging van Chineezen en andere Vreemde Oosterlingen in het land- schap te allen tijde zoodanige verordeningen uit te vaardigen als het in het algemeen belang van Nederlandsch-Indië of in het bijzonder belang van dat landschap zal noodig achten.

Personen die zonder verlof zich hebben verwijderd uit s Gouvernements militairen of maritiemen dienst, voortvluchtige veroordeelden of misdadigers en dergelijken zullen door den bestuurder in geen geval binnen het landschap geduld, maar overvrijd aan het Gouvernement uitgeleverd worden, indien zij zich daar vertoonen, en zulks ook zonder dat hunne uit- levering in elk voorkomend geval geëischt wordt.

Artikel veertien.

Het recht tot het verleenen van vergunningen tot het doen van mijnbouwkundige opsporingen, alsmede tot het verleenen van concessiën tot mijnontginning en tot ondernemingen van landbouw en boschexploitatie in het gebied van het landschap berust geheel bij het Gouvernement, dat echter steeds vooraf het Inlandsch zelfbestuur ter zake zal raadplegen en daaren- boven vooraf een onderzoek zal doen instellen naar de rechten van derden op de gronden, benodigd voor mijnbouwkundige opsporing, mijnontginning, landbouw- of boschexploitatie, terwijl het bij eventueele beschikking over zoodanige gronden voor billijke schadeloosstelling door den concessionaris zal zorg dragen.

Van de voor concessiën tot mijnontginning door het Gouver- nement te heffen eijns en vastrecht en van den door onder- nemingen van landbouw of boschexploitatie op te brengen pacht- of huurschat zal steeds de helft ten behoeve van het zelfbestuur worden afgestaan.

Het Gouvernement behoudt zich wijders het recht voor om voor eigen rekening mijnbouwkundige opsporingen, mijnont- ginningen en ondernemingen van landbouw of boschexploitatie in het gebied van het landschap te doen aanvangen en voort- zetten, behoudens billijke schadeloosstelling, wanneer daartoe aanleiding bestaat.

De bestuurder en de mantri's beloven zoodanige onderne- mingen steeds zooveel mogelijk te bevorderen.

De door den wetgever van Nederlandsch-Indië vastgestelde of nader uit te vaardigen verordeningen en bepalingen betref- fende opsporing en ontginning van delfstoffen, alsmede die betreffende het visschen naar parelschelpen, paarlemoerschelpen en trijang zijn voor het landschap en zijne ingezetenen van verbindende kracht.

Artikel vijftien.

De aan het zelfbestuur toekomende gelden wegens concessiën tot mijn-, land- en boschexploitatie, benevens de nader in overleg met den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden aan te wijzen inkomsten worden gestort in eene landschapskas, bestemd voor het bestrijden van uitgaven in het belang van land en volk.

Het beheer dier kas wordt door den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden geregeld.

Artikel zestien.

De bestuurder en de mantri's zullen, zonder toestemming van het Gouvernement geene andere belastingen heffen, dan die omschreven in de aan dit contract gehechte opgave Letter B en mitsdien zullen zonder die toestemming die belastingen, hetzij die in geld, in natura of in arbeid opgebracht worden, in geen geval verhoogd of verzaard worden.

De bestuurder en de mantri's verbinden zich in het algemeen

doen zorgen, dat in het landschap geen boven-
rettige heffingen, hoe ook genaamd, en door wien
bevolking geëischt worden.

omschreven belastingen zullen, behalve de in- en
en pachten, zoo die bestaan, niet van toepassing
vernehmens directe onderdanen.

nement behoudt zich het recht voor bestaande
allen tijde tegen schadevergoeding over te nemen.

Artikel zeventien.

tot het heffen van belastingen buiten de in het
bedoelde, berust bij het Gouvernement.

het Gouvernement vastgestelde of nader uit te
ordeningen en bepalingen, betreffende rechten,
en verpachtingen en in het algemeen betreffende
n van het Gouvernement hoe ook genaamd, zullen
bindende kracht zijn voor de ingezetenen zonder
van die plaatsen in het landschap, waar zoodanige
an het Gouvernement toekomen.

nder en de mantri's verklaren in het bijzonder zich
pen aan alle regelingen, welke het Gouvernement
ndsch-Indië nader mocht goedvinden vast te stellen
heffen van rechten van de vaartuigen, welke de
het landschap aandoen, zoomede van de ablaar in-
al wordende goederen.

ernement van Nederlandsch-Indië heeft het recht
te van zijne directe onderdanen alle zoodanige be-
te voeren als het noodig zal achten.

Artikel achttien.

rdanen van het landschap Dampo worden beschouwd
ien van welken landaard ook, die in dat landschap
aden en niet behooren tot een der in het volgende
schreven categorieën.

Artikel negentien.

streeksche onderdanen van het Gouvernement worden
dschap Dampo beschouwd:

1. Europeanen en daarmede gelijkgestelden;

2. bedienden van Europeanen en met dezen gelijk-
met uitzondering van hen, die behooren tot de in-
bevolking van het gouvernement Celebes en Onder-
en, doch met inbegrip van dezen laatsten voor zoover
landsche Christenen, niet behoorende tot de eigenlijke
van het landschap;

3. alle personen, onverschillig van welken landaard, ge-
innen de grenzen der Gouvernements-etablissemerten;

4. alle personen in dienst van het Gouvernement onver-
aan welken landaard;

5. alle gewezen dienaren van het Gouvernement, met uit-
g van hen, die behooren tot de inheemsche bevolking
Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden, doch
grip van deze laatsten voor zoover zij zijn Inlandsche
en, niet behoorende tot de eigenlijke bevolking van het
D;

6. alle Chineezzen, Arabieren en andere vreemde Oosterlingen;

7. alle niet tot de inheemsche bevolking van het gouver-
Celebes en Onderhoorigheden behorende personen ge-
op ondernemingen, die gedreven worden door onder-
van het Gouvernement, benevens alle andere personen,
onderscheid van landaard, die op zulke ondernemingen
an zijn krachtens door hen met hunne werkgevers op
oet der ter zake bestaande bepalingen gesloten overeen-
31.

8. vernementsonderdanen zijn als zoodanig onderworpen aan

de rechtspraak der Gouvernements-rechtbanken en rechters,
Wanneer zij ver lacht van eenig misdrijf of eenige overtreding
binnen het landschap Dampo zijn opgevat, worden zij door
den bestuurder en de mantri's aan de Gouvernements vertegen-
woordigers uitgeleverd.

Artikel twintig.

Aan de rechtspraak der rechtbanken en rechters van het
Gouvernement zijn mede onderworpen onderdanen van den be-
stuurder, die tezamen met onderdanen van het Gouvernement
aan misdrijven of overtredingen zich schuldig maken, misdrijven
plegen tegen het Gouvernement, zijn ambtenaren, militairen of
andere onderdanen of wei ten aanzien zijner eigendommen of
die zijner onderdanen; procederen in zaken van handel en
nijverheid of andere civiele gedingen, waarin onderdanen van
het Gouvernement betrokken zijn en zij, die zich schuldig
maken aan misdrijven en overtredingen ten aanzien der door
het Gouvernement uitgevaardigde, op de onderdanen van den
bestuurder toepasselijke verordeningen en bepalingen.

De ambtenaren van het Gouvernement zijn bevoegd tot op-
sporing van bovenbedoelde misdrijven en overtredingen en zullen
daarin door den bestuurder en de mantri's steeds zooveel
mogelijk worden bijgestaan. De bestuurder en de mantri's zullen
de vonnissen in de bovenbedoelde gevallen over hunne onder-
danen uitgesproken, steeds eerbiedigen en aan de uitvoering
daarvan bevorderlijk zijn.

Artikel een en twintig.

In de gevallen waarin volgens het bepaalde bij het voor-
gaande artikel onderdanen van den bestuurder voor de recht-
banken van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement terechtstaan,
zal hij bevoegd zijn in persoon of bij gemachtigde zitting te
nemen in de rechtbank, voor welke de zaak van zijn onder-
danen wordt behandeld, ten einde daarover zijn gevoelen uit
te spreken.

Artikel twee en twintig.

De zorg voor de politie binnen het landschap berust bij den
bestuurder en de mantri's, die dientengevolge aansprakelijk zijn
voor de orde en rust binnen hun land en zorgdragen voor de
opsporing der misdrijven en overtredingen, uitgezonderd voor
zooveel betreft de uitgestrektheid gronds voor etablissementen
of versterkingen afgestaan.

Voor zooveel betreft de binnen het landschap onder hunna
eigene door of van wege het Gouvernement aangestelde of
eventueel aan te stellen hoofden, gevestigde Chineezzen, is de
bestuurder bevoegd met opzicht tot die politiezorg de hulp en
tusschenkomst van gezegde hoofden in te roepen.

Artikel drie en twintig.

De rechtsmacht van den bestuurder en de mantri's bepaalt
zich tot de bevolking van het landschap Dampo niet behorende
tot 's Gouvernements onderdanen en behoudens het reeds be-
paalde in artikel twintig.

Civiele zaken worden volgens 's Lands gebruik afgedaan.

In crimineele zaken wordt het beginsel gehuldigd, dat elk
misdadiger zal worden gestraft volgens de wetten van en
op het land waar hij zijn misdrijf of overtreding gepleegd
heeft, met dien verstande, dat verminkende of martelende
straffen, waaronder ook de straf van rottanslagen wordt be-
gripen, niet mogen worden toegepast.

Het recht om personen wegens politieke redenen buiten het
gebied van het landschap te verwijderen, berust uitsluitend bij
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië, behoudens de
bevoegdheid van den bestuurder om tot zoodanigen maatregel
voorstellen aan den Gouverneur van Celebes en Onderhoorig-
heden te doen.

De bestuurder en de mantri's behouden echter de bevoegd-

om op personen behorende tot hunne onderdanen, verrijning uit het landschap als straf, wegens misdrijven begaait in het landschap, toe te passen.

Indien die gevallen wordt nadat de beschuldigde behoorlijk in verdediging gehoord is, de verbanning gelast bij een door bestuurder en de mantri's uit te vaardigen vormelijk bevel, dat echter voor de ten uitvoerlegging door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië moet zijn goedgekeurd, ook de plaats aanwijst, waar de banneling verblijf zal nemen.

Indien de mantri's missen waarbij de beklagde door den bestuurder en de mantri's is veroordeeld is tot dwangarbeid en verbanning buiten het landschap gedurende den tijd welken die dwangarbeid duren zijn niet onderworpen aan de goedkeuring van den Gouverneur-Generaal, maar worden door tusschenkomst van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden den Directeur van Justitie ter strafplaatsaanwijzing aangeboden.

Indien de door of namens den bestuurder opgelegde straffen niet door den Gouverneur-Generaal gratie verleen.

Artikel vier en twintig.

De bestuurder en de mantri's verbinden zich om de in hun bestaande wegen steeds in goeden staat te houden en om het Gouvernement zulkz mocht verlangen nieuwe wegen in hun land aan te leggen.

Artikel vijf en twintig.

In het landschap Dampo zijn slavernij, menschenroof en invoer van slaven verboden en zullen die misdadige bedrijven, door den bestuurder en de mantri's binnen hun land met geduld niet alle in hun bereik zijnde middelen krachtdadig tegenaan worden.

De bestuurder en de mantri's beloven krachtdadig te zullen werken tot de trapsgewijze afschaffing van het pandelings voor zooveel dat nog binnen hun land mocht bestaan.

Artikel zes en twintig.

De bestuurder en de mantri's zullen den zee- en rivierroof die in hun bereik zijnde middelen krachtdadig tegengaan en tevens tevens en geen schuilplaats noch eenige andere of medewerking toegestaan verleen, noch toelaten dat verleend worden aan zee- of rivierrovers, noch aan personen, die hun bekend zijn of aangewezen worden als zoodanig of uit te oefenen of daarin betrokken te zijn.

De mantri's zullen degenen, die daaraan schuldig of medeplichtig bevonden worden, aan den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden uitleveren dan wel hen volgens de wetten en inges des lands doen terechtstellen, naar gelang die ligen of medeplichtigen onder de jurisdictie van het Gouvernement dan wel die van den bestuurder en de mantri's

Artikel zeven en twintig.

De bestuurder en de mantri's verbinden zich, om aan alle in de rivieren en vaartuigen, welke langs de kusten of langs de rivieren binnen het gebied van het landschap Dampo in nood mochten vervallen, allen bijstand te verleen, bijbreukelingen te verzorgen en zich geen humer goeder te eigenen, noch te gedoogen dat iemand, wie ook, die toeijene.

De mantri's verbinden zich om schepen en vaartuigen of goederen, die aan het strand of langs de rivieren binnen het gebied van het landschap Dampo stranden of komen aandrijven of worden gebracht en welke eigenaren onbekend zijn, te heren, en het ten voordele van belanghebbenden in het openbaar te koop, indien die niet kunnen worden bewaard.

Indien het stranden van schepen en vaartuigen of aanbrengen van het strand of uit de rivieren opgevischte goederen

zullen de bestuurder en de mantri's onverwijld kennis geven aan den meest nabij zijnden ambtenaar van het Gouvernement.

De bestuurder en de mantri's kunnen hulp- en bergloos vorderen, waarvan het bedrag door hen zelven naarmate van de moeite wordt begroot.

Van die begrooting geven zij onverwijld kennis aan den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden, die na den bestuurder, de mantri's en de andere belanghebbenden te hebben gehoord, bevoegd is haar te wijzigen, zooals hem billijk zal voorkomen.

Daarna kunnen de daarbij betrokkenen, indien zij zich door de bedoelde begrooting, al dan niet door den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden gewijzigd, bezwaard gevoelen, door tusschenkomst van dien Gouverneur, de beslissing van den Gouverneur-Generaal inroepen aan welke beslissing de bestuurder en de mantri's zich zullen onderwerpen.

Artikel acht en twintig.

Op de onderdanen van den bestuurder zijn van toepassing de door het Gouvernement uitgevaardigde verordeningen en bepalingen betreffende.

a. den in-, uit- en doorvoer van vuurwapenen, buskruit en ammunitie;

b. de bescherming van telegraaflijnen en kabels en het telegrafisch verkeer.

Artikel negen en twintig.

De bestuurder en de mantri's erkennen dat door dit contract alle vroegere overeenkomsten door het Nederlandsch-Indisch Gouvernement met de bestuurders van het landschap Dampo gesloten — voor zooverre die met het tegenwoordige contract in strijd zijn — zijn vervallen.

Aldus ten dage en jare in den aanhef dezes vermeld te Bima overeengekomen, in triplo opgemaakt, ondertekend, bezegeld en plechtig beëdigd door den bestuurder van het landschap Dampo en zijne mantri's in tegenwoordigheid van mij, Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden, ten deze vertegenwoordigd door Henri de Vogel Mathieu Henrizoon, Controleur ter beschikking van den Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden voor de politieke aanrakingen met de Zelfbesturen.

Hier stonden de stempel en de handteekening van den bestuurder van Dampo, zoodmede de handteekeningen van zijne landsgrootten.

(w. g.) DE VOGEL,

Controleur ter beschikking.

In tegenwoordigheid:

De Civiel Gezaghebber,

(w. g.) G. E. A. MULLER.

De Inlandsche schrijver,

(w. g.) onleesbaar.

Dit contract is goedgekeurd en bekrachtigd op heden den 28sten Augustus 1906 onder voorbehoud, dat de bestuurder en de landsgrootten van Dampo instemmen met de in rooden in den Nederlandsche tekst van artikel 8, alinea 2 en artikel 25, alinea 1 en in den Maleischen tekst van alle artikelen, aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, strekkende ter verduidelijking en verbetering en om den Maleischen tekst beter met den Nederlandschen in overeenstemming te brengen.

op dat zij van deze instemming doen blijken door eene hieronder te stellen onderteekende en bezegelde verklaring.

De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië,
(w. g.) J. B. VAN HEESTZ.

Ter ordonnantie van den Gouverneur-Generaal:

De Algemeene Secretaris,
(w. g.) VAN REES.

Voor eensluidend afschrift:

De Gouvernements Secretaris,
(w. g.) HULSBORF POL.

Wij, Bestuurder en landsgrooten van Dampo, verklaren bij dezen in te stemmen met de in rooden inkt in den Nederlandschen tekst van artikel 8, alinea 2, en in artikel 25, alinea 1, en in den Maleischen tekst van alle artikelen van deze overeenkomst nagebrachte wijzigingen en aanvullingen, strekkende ter verduidelijking en verbetering en om den Maleischen tekst beter met den Nederlandschen in overeenstemming te brengen, ten blijke waarvan deze verklaring van onze handteekening en ons zegel is voorzien.

Hier stonden stempel en handteekening van den Sultan van Dampo en de handmerken en handteekeningen van de landsgrooten van dat landschap.

In onze tegenwoordigheid,

De Civiel Gezaghebber,
(w. g.) C. E. A. MULLER.

De tijdelijk waarnemend Inlandsche schrijver,
(w. g.) D. C. JOHANNES.

Opgave letter A behoorende bij artikel 2 van het met het Zelfbestuur van het landschap Dampo gesloten Contract dd. 31 December 1905.

Het landschap Dampo is samengesteld uit het vroeger gelijknamige rijk bestaande uit de dessa's Dampo, Kempo, Kawangko, Wonggo, Kilo, Hocoë, Daha, Adoe en Rangga. Waaraan na de groote uitbarsting van den vulkaan Tambora het toen totaal ontvolkte landschap Peka is toegevoegd.

Bovendien behoren daaraan de navolgende eilanden: Kawangko, Poeloe-Poeloe, Poeloe Sora en Satonda en Poeloe Rate.

Bima, den 31sten December 1905.

Hier stonden de stempel en de handteekening van den bestuurder van Dampo, zoodaer de handteekeningen van zijne landsgrooten.

(w. g.) DE VOGEL,
Controleur ter beschikking.

In onze tegenwoordigheid:

De Civiel Gezaghebber,
(w. g.) C. E. A. MULLER.

De inlandsche Schrijver,
(w. g.) onleesbaar.

Opgave letter B behoorende bij artikel 16 van het met het Zelfbestuur van het landschap Dampo gesloten Contract dd. 31 December 1905.

In het landschap Dampo worden gegeven:

1. in- en uitvoerrechten voor alle artikelen tot een bedrag N^o. 1. 9—10.

van 3% van de waarde met uitzondering van pa karbouwen waarvoor f 0.50 per stuk wordt betaald geelhout en was die een monopolie vormen van den Sultan vertiening van sawah's en tuinen.

3. de monopolie's van den Sultan als:

- a. geelhout dat aan den Sultan moet worden verko tegen f 2.50 à f 3 --.
 - b. bijenwas dat aan den Sultan moet worden verko tegen ± f 50.— de picol.
4. de gevorderde onbetaalde arbeid der bevolking wordt a: gevend voor:
- a. het bewerken van de sawah's en de andere gron van den sultan.
 - b. het doen van wachtdiensten bij den Sultan tot een ge van 10 man daags. Elke man blijft 3 tot 7 dagen elke man krijgt ongeveer eens in de 3 maanden een be
 - c. het bewerken van metalen enz. door handwerkslied indien de sultan dat werk noodig heeft.

Bima, den 31sten December 1905.

Hier stonden de stempel en de handteekening van den bestuurder van Dampo, zoodaer de handteekening van zijne landsgrooten

(w. g.) DE VOGEL,
Controleur ter beschikking.

In onze tegenwoordigheid:

De Civiel Gezaghebber,
(w. g.) C. E. A. MULLER.

De inlandsche Schrijver,
(w. g.) onleesbaar.

Opgave van de havens van het landschap Dampo be in artikel 13 van het contract van 31 December 1905.

Kempo.
Kawangko
Karombo
Kilo
Tjempi
Hocoë

Bima, den 31sten December 1905.

Hier stonden de stempel en de handteekening van den bestuurder van Dampo, zoodaer de handteekeningen van zijne landsgrooten.

(w. g.) DE VOGEL,

Controleur ter beschikking.

In onze tegenwoordigheid:

De Civiel Gezaghebber,
(w. g.) C. E. A. MULLER.

De inlandsche Schrijver,
(w. g.) onleesbaar.

Voor eensluidend afschrift:

*De Secretaris-Generaal bij h
Departement van Koloniën.*

(w. g.) A. E. BLIAS.

**Perpustakaan
Jenderal Keb**

959.80

NUR

p